



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI  
GERAKAN KHILAFATUL MUSLIMIN DI CIKEMBAR DAN  
KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI**

**TESIS**

**FIRMAN JULIANSYAH  
NIM : 120170102008**

Tesis yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
dalam mendapat gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

**BOGOR  
JANUARI 2019**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI GERAKAN KHILAFATUL MUSLIMIN DI CIKEMBAR DAN KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI**

**FIRMAN JULIANSYAH**

Penelitian ini menganalisis keberadaan Khilafatul Muslimin (KM) sebagai gerakan keagamaan yang mengusung ideologi khilafah. sementara itu, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, terdapat pertentangan interaksi diantara keduanya yang penting untuk dikaji dan ditemukan solusinya. KM merupakan organisasi khilafah yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada 1997. KM berpusat di Lampung. Beberapa lembaga menyebut bahwa KM merupakan pendukung ISIS di Indonesia. Penelitian ini menjadi menarik setelah pemerintah Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017. Pembubaran HTI mengindikasikan bahwa ideologi khilafah merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. masalah yang diteliti ialah bagaimana kondisi objektif KM, serta strategi Pemerintah dalam menangani gerakan KM di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa gerakan KM di Kabupaten Sukabumi, mulai berkembang pada tahun 2017. Pertentangan antara KM dan Negara nampak pada pemahaman dan sikap yang ditimbulkan. Sedangkan strategi yang dilakukan Pemerintah sejauh ini berupa pemantauan terhadap beberapa aktivitas KM, serta pendekatan persuasif. Disimpulkan bahwa pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi relatif stagnan. Anggota KM tercatat ±85 orang yang sebagian besar merupakan keluarga dekat. Pertentangan ideologis yang muncul antara KM dan Negara sebagian berwujud pada sikap anti pemerintah, seperti menolak membayar pajak. Selain itu, disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan memiliki banyak kelemahan, sehingga diperlukan strategi pemerintah yang memiliki lebih komprehensif untuk menangani gerakan KM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Sumbangan dari kajian ini adalah memberikan dasar analisis bagi Pemerintah untuk menggunakan pendekatan kultural, pendidikan, dan ekonomi kepada kelompok KM untuk membangun tatanan kebersamaan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Khilafatul Muslimin, dan Pertentangan

## **ABSTRACT**

### **THE GOVERNMENT STRATEGY IN FACING KHILAFATUL MUSLIMIN MOVEMENTS AT CIKEMBAR AND KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI**

**FIRMAN JULIANSYAH**

*This research analyzes the existence of Khilafatul Muslimin (KM) as a religion movement that promotes the caliphate. Meanwhile, Indonesia is a country based on Pancasila and UUD 1945. So that, there are conflicting interactions between the two that are important to studied and found a solutions. Khilafatul Muslimin (KM) is a Khilafaism organization founded by Abdul Qadir Hasan Baraja in 1997. KM originally based in Lampung. Some institutions note that KM is one of ISIS supporters in Indonesia. This research becomes interesting after Indonesian government dissolved Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) in 2017. The dispersal of HTI indicates that caliphate ideology is one of the nation state threats. The research question of this study to know how the objective conditions of KM, and the government strategy in facing KM movements in Kabupaten Sukabumi. This research was conducted by qualitatively method with phenomenological approach. The result of this research shows that KM movement in Sukabumi regency began to develop in 2017. The conflict between KM and Indonesia as a state reflected in their own idea and attitude that it caused. Whereas, government strategy shows their concern in monitoring several activities of KM and persuasive approach. It can be concluded that KM movements in Sukabumi is stagnant relatively. KM Members is about ± 85 members and most of them comes from their own relative family. The ideological conflicts that arise between KM and State partially are manifested as a contra-government act such as refuse to pay taxes. The strategy carried out by government has several weaknesses thus, government need to build more comprehensive approach in order to handle KM movements in Indonesia, especially in Kabupaten Sukabumi. Contributions of this study provide a basis analysis for the government to use cultural, education, and economics approaches towards KM groups to build togetherness.*

*Keywords: Government Strategy, Khilafatul Muslimin, Conflict*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan proposal tesis dengan judul: *Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi*, dapat diselesaikan.

Penyusunan Tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko selaku Rektor Universitas Pertahanan
2. Bapak Mayjen TNI Dr. Hipdizah, S.ADM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan
3. Bapak Kolonel Kav. Dr. Yusuf, S.Sos, M.M. selaku Sesprodi Peperangan Asimetris selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr.Aris Arif Mundayat, Ph.D selaku Pembimbing II
5. Mendiang Ibu Asiyah dan Bapak Ilyan, kedua orang tua yang semoga kini berada di tempat yang mulia di sisi Allah.
6. Istri dan anakku tercinta yang telah mendukung penyusunan tesis ini melalui doa dan motivasi
7. Rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris Cohort 6 Universitas Pertahanan: Adi Wijaya (Lampung), Juni Nasution (Bogor), Aditya Yando (Jambi), Aulia (Malang), AKBP Bambang WA (Den Gegana Kepri), Chastiti (Solo), Deka (Banten), Habib (Bandung), Hikmah (Jakarta), Hasan Karaeng Lewa (Selayar), Iswandi Ramen (Lombok), Pathresia (Malang), Palupi (Semarang),

Rudy (Jakarta), Syadli (Makasar), Suryadi (Palembang), Suryani (Riau), Teuku Raja Muda (Aceh), Yandri (Bandung), Yuni (Jakarta).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih krang sempurna, oleh karena itu, dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu di Universitas Pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam perumusan strategi kontra radikalisme yang masih menjadi ancaman nyata bagi pertahanan negara yang diprioritaskan.

Bogor, 28 Januari 2019

Firman Juliansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1 Manfaat Teoretis .....	12
1.5.2 Manfaat Praktis .....	12
BAB II KAJIAN TEORETIK .....	14
2.1 Deskripsi Konseptual .....	14
2.1.1 Konsep Ilmu Pertahanan.....	14
2.1.2 Konsep Pertahanan Negara.....	15
2.1.3 Teori Strategi.....	17
2.1.4 Teori Peperangan Asimetris.....	23
2.1.5 Teori Hegemoni.....	27
2.1.6 Teori Legitimasi.....	29

2.1.7	Teori Westpalian World Order .....	33
2.1.8	Teori Islamic World Order.....	34
2.1.9	Konsep Khilafah .....	37
2.1.10	Teori Gerakan Sosial .....	42
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
3.1	Desain penelitian.....	55
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian .....	56
3.1.1	Tempat Penelitian .....	56
3.1.2	Waktu Penelitian .....	56
3.3	Subyek dan Objek Penelitian .....	57
3.2.1	Subyek Penelitian .....	57
3.2.2	Objek Penelitian .....	60
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.3.1	Wawancara .....	60
3.3.2	Observasi .....	61
3.3.3	Studi Dokumen.....	61
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data .....	61
3.4.1	Kredibilitas.....	62
3.4.2	Reliabilitas .....	64
3.4.3	Konfirmabilitas.....	64
3.5	Teknik Analisis Data .....	64
3.5.1	Pengumpulan Data.....	65
3.5.2	Kondensasi Data .....	65
3.5.3	Penyajian Data .....	65
3.5.4	Tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1	HASIL PENELITIAN.....	66
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
4.1.1.1	Kabupaten Sukabumi .....	66

4.1.1.2	Khilafatul Muslimin.....	73
a.	Sejarah Singkat.....	73
b.	Keanggotaan .....	75
c.	Kegiatan Pendidikan .....	77
d.	Kegiatan Sosial Keagamaan.....	77
e.	Hubungan KM dan Negara .....	78
4.1.2	Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi .....	80
4.1.2.1	Khilafatul Muslimin Cikembar .....	80
4.1.2.2	Khilafatul Muslimin Kebon Pedes .....	87
4.1.3	Pertentangan antara Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi .....	92
4.1.4	Strategi Pemerintah dalam menangani Gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi.....	98
4.2	PEMBAHASAN .....	101
4.2.1	Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi .....	101
4.2.2	Pertentangan antara Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi.....	109
4.2.3	Strategi Pemerintah dalam menangani Gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....		119
5.1	KESIMPULAN.....	119
5.1.1	Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi .....	119
5.1.2	Pertentangan antara Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi.....	119

4.1.3 Strategi Pemerintah dalam menangani Gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi.....	120
5.2 REKOMENDASI .....	121
5.2.1 Rekomendasi Teoretis.....	121
5.2.2 Rekomendasi Praktis.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN .....	130
LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian.....	131
LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara .....	132
LAMPIRAN 3 Dokumen Pendukung .....	137
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kerawanan Polres Mataram tahun 2017 .....	7
Gambar 2.1 Ekspektasi Dampak Interaksi Strategis .....	26
Gambar 2.2 Dimensi Legitimasi .....	32
Gambar 2.3 Irisan Perbandingan Penelitian .....	48
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles dan Huberman.....	66
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sukabumi.....	68
Gambar 4.2 Lokasi Ponpes KM di Kampung Cihuni Cikembar.....	70
Gambar 4.3 Lokasi KM Kebon Pedes.....	72
Gambar 4.4 Abdul Qadir Hasan Baraja dan Maklumat .....	74
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Khilafatul Muslimin.....	76
Gambar 4.6 Peta Kerawanan Polres Mataram tahun 2017 .....	79
Gambar 4.7 Foto Peneliti dan Ust.Mukhliansyah.....	85
Gambar 4.8 Struktur Kepengurusan KM Kebon Pedes .....	88
Gambar 4.9 Foto Peneliti bersama Tokoh KM Kebon Pedes .....	92
Gambar 4.10 Pamphlet Kegiatan Syiar & Silaturahmi Kekhalifahan..	96
Gambar 4.11 Suasana Kawasan Azzikra 16 November 2018 .....	97
Gambar 4.12 Logo dan Baju Khas Jamaah KM.....	106
Gambar 4.13 Strategi Khilafatul Muslimin.....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 3.1: Jadwal Penelitian .....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sejak masa kemerdekaanya, Indonesia dideklarasikan sebagai negara berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan abstraksi cita-cita luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para tokoh bangsa, baik dari kalangan nasionalis maupun agamis. Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 terdapat dalam dokumen yang disebut "Piagam Jakarta". Dalam Piagam Jakarta, sila pertama dasar negara berbunyi: "*Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya.*" Namun, pada 18 Agustus 1945 rumusan tersebut berubah menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>1</sup> Perubahan ini terjadi karena dinamika lingkungan strategis yang terjadi di Indonesia saat itu. Setelah melalui proses panjang, lahirlah lima butir Pancasila yang disepakati dengan bunyi : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam perumus Pancasila kala itu, telah sepakat mengenai penghapusan tujuh kata sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta. Konsekuensinya, cita-cita mereka untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan hukum Islam harus terkubur dalam. Para tokoh Islam sepakat dengan bunyi sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Keputusan dihapuskannya kata "Syariat Islam" memang belum memuaskan sebagian umat Islam.

---

<sup>1</sup> Subarkah, Muhammad, "*Pancasila, Sukarno, Piagam Jakarta, dan Debat Dasar Negara*", dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/02/o83mzy385-pancasila-sukarno-piagam-jakarta-dan-debat-dasar-negara>

Sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu.<sup>2</sup>

Upaya untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut tidak jarang dilakukan dengan jalan membentuk organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan dianggap sebagai wadah yang tepat untuk menyalurkan segala bentuk aspirasi rakyat kepada negaranya. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, telah menjamin kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran bagi seluruh rakyatnya. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>3</sup> Jaminan Kebebasan berserikat ini diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang ini merupakan dasar legalitas bagi pendirian ormas-ormas di Indonesia.

Disadari bahwa Pasca Reformasi, Organisasi Kemasyarakatan bermunculan bagai cendawan di musim hujan, sehingga diperlukan batasan sekaligus dasar legalitas yang jelas untuk mengatur pergerakan Ormas di Indonesia. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas Kemudian dirubah dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017. Undang-undang tersebut salah satunya mengatur apa dan bagaimana prasyarat pendirian Ormas di Indonesia. Dalam Perppu tersebut diatur bahwa “Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang

---

<sup>2</sup> Galih, Bayu, "Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta", dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta>, diakses pada 25 Agustus 2018

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28.

bertentangan dengan Pancasila”.<sup>4</sup> Dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain: ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>5</sup>

Perppu inilah, salah satunya, yang kemudian mendasari pemerintah untuk mencabut status badan hukum keorganisasian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada pertengahan 2017 lalu. HTI dianggap sebagai organisasi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam doktrinnya, HTI menganggap bahwa sistem demokrasi adalah haram dan Pancasila harus dilenyapkan dari muka bumi ini.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa HTI dan Ideologi khilafahnya merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Khilafah merupakan konsepsi negara berbasis keumatan dan hukum Islam yang tidak mengenal batas teritorial. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep negara modern. Konsep negara modern mensyaratkan sebuah negara tidak hanya memiliki penduduk, tetapi juga memiliki batas-batas teritori yang jelas dan diakui. Sampai saat ini, beberapa prinsip negara Khilafah sebenarnya masih menjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama sendiri. Dalam istilah modern, konsep negara Khilafah merupakan konsep negara transnasional yang akan sangat sulit diwujudkan.

Menguatnya gerakan Khilafah di Indonesia diindikasikan sebagai dampak dari lahirnya Era Reformasi. Reformasi 1998 merupakan simbol lahirnya kebebasan mengemukakan pendapat. Reformasi telah memicu

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).

<sup>5</sup> *Ibid*, Penjelasan pasal 59 ayat (4c)

<sup>6</sup> Ma'arif, Ahmad Syafi'i, dkk., *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.27

munculnya aktor gerakan baru di kalangan kelompok muslim yang berada di luar kerangka kelompok arus utama. Organisasi atau kelompok gerakan baru ini mempunyai basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan berbeda dengan ormas-ormas Islam yang sudah ada sebelumnya. Gerakan baru ini dipandang radikal dengan ciri-ciri tidak akomodatif, militan, dan konfrontatif.<sup>7</sup> Seiring dengan itu, Pancasila sebagai ideologi negara cenderung mengalami pelemahan dari berbagai aspek. Nilai-nilai luhur budi pekerti Pancasila mulai luntur dari hati dan pemikiran generasi bangsa ini. Akibatnya, ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila mulai merasuki pemikiran bangsa dan menjadi ancaman nyata di kemudian hari.

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi kehidupan bangsa dan negara yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Dinamika ancaman pertahanan negara saat ini didominasi dengan ancaman nonmiliter. Radikalisme dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Salah satu sumber radikalisme yang berkembang di Indonesia ialah ideologi khilafah. Perkembangan ideologi khilafah akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, baik di tataran global, regional hingga nasional. Gerakan khilafah menggunakan cara-cara asimetris untuk memenangkan misi-misi geraknya. Mereka bergerak secara *underground* untuk memperluas pengaruhnya melalui masjid-masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, hingga kampus universitas dengan memanfaatkan perkembangan media informasi dan komunikasi. Gerakan khilafah cenderung non-akomodatif dengan pemerintah bahkan membentuk “negara di dalam negara”. Permasalahan gerakan khilafah dan negara dipandang sebagai bentuk konflik asimetris. Negara sebagai *the strong* berupaya membendung perkembangan khilafah karena dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa. Disisi lain, organisasi khilafah

---

<sup>7</sup> Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015) hlm.211

sebagai *the weak* terus mempekuat pengaruhnya dengan memanfaatkan situasi politik dan meningkatnya gelombang *civil distrust* di dalam negeri.

Meskipun HTI secara yuridis telah dibubarkan, namun bukan berarti ideologi khilafah telah hilang. Masih banyak organisasi berideologi khilafah lain yang terus aktif melakukan gerakan tarbiyah secara masif. Salah satunya ialah Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin (KM) merupakan organisasi Islam yang berideologi khilafah yang berpusat di Lampung. Organisasi ini didirikan tahun 1997 oleh Abdul Qodir Hasan Baraja, mantan Ketua DI/TII wilayah Lampung. Abdul Qadir Baraja dibai'at sebagai khalifah dalam KM hingga saat ini.<sup>8</sup> Asas pendirian KM ialah untuk mewujudkan misi Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.

Di Kabupaten Sukabumi, sebagai lokasi penelitian yang dipilih, Khilafatul Muslimin kini memiliki satu Ummul Quro (cabang) di Cikembar dan satu Kemas'ulan (ranting) di Kebon Pedes. Keduanya melakukan tarbiyah dengan menggunakan lembaga pesantren. Berbagai aktivitas yang dilakukan Khilafatul Muslimin meliputi pendidikan dan dakwah melalui Pondok Pesantren, pengajian di masjid-masjid, ceramah agama, penerbitan buku, jurnal, radio, internet, pertemuan, diskusi, kunjungan silaturahmi oleh pengurus dan diskusi atau dialog dengan pihak luar.<sup>9</sup> Sekitar tahun 2015, Jamaah Khilafatul Muslimin Kebon Pedes menolak untuk membayar pajak dan mengikuti pemilihan umum. hal ini dikaitkan dengan adanya dugaan dari pemerintah mengenai keterlibatan warganya dalam beberapa aksi teror. Sehingga pemerintah setempat pernah menjuluki Kebon Pedes sebagai "kampung teroris".<sup>10</sup>

Khilafatul Muslimin mengklaim bahwa kekhalifahannya berlaku untuk seluruh dunia. Mereka memiliki struktur pemerintahan khilafah yang lengkap hingga ke tingkat Kemas'ulan (ranting/ kecamatan).<sup>11</sup> Konsep

<sup>8</sup> Shidiq, Gulam, *Latar Belakang*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 mei 2018

<sup>9</sup> Asnawati dan Achmad Rosidi, *op.cit*, hlm.218

<sup>10</sup> Shidiq, Gulam, *Kembalinya Khilafah di Kampung Teroris*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 mei 2018

<sup>11</sup> Shidiq, Gulam, *op.cit*

Khilafah yang berbasis keumatan dan non-teritorial membuat organisasi ini mudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar tokoh pentingnya merupakan mantan anggota DI/TII dibawah SM.Kartusuwirjo. Setelah DI/TII dibubarkan tahun 1962, sebagian mantan anggotanya mulai kembali bersatu memperjuangkan khilafah dibawah naungan Khilafatul Muslimin sejak 1997.<sup>12</sup> Mursyid Ali, dalam penelitiannya tentang Khilafatul Muslimin, menyebut bahwa:

“Jamaah Khilafatul Muslimin ini berasaskan “Islam dan Kemerdekaan” bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia. Jamaah Khilafatul Muslimin cinta akan perdamaian, dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memerangnya”.<sup>13</sup>

Mengenai Khilafatul Muslimin, beberapa institusi menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan salah satu suporter ISIS di Indonesia. misalnya, BNPT dalam beberapa forum mencantumkan Khilafatul Muslimin sebagai suporter ISIS di Indonesia. senada dengan itu, Rohan Gunaratna dalam *9<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security (BCAS)*, sebuah konferensi yang diadakan oleh *German Institute for International and Security Affairs (SWP)* tahun 2015, juga menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin merupakan organisasi pendukung ISIS di Indonesia sejak juli 2014.<sup>14</sup> Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram, lokasi keberadaan Khilafatul Muslimin dimasukkan ke dalam peta daerah rawan radikalisme dan terorisme oleh Kepolisian setempat<sup>15</sup>. Sebagaimana tergambar dalam peta tematik berikut :

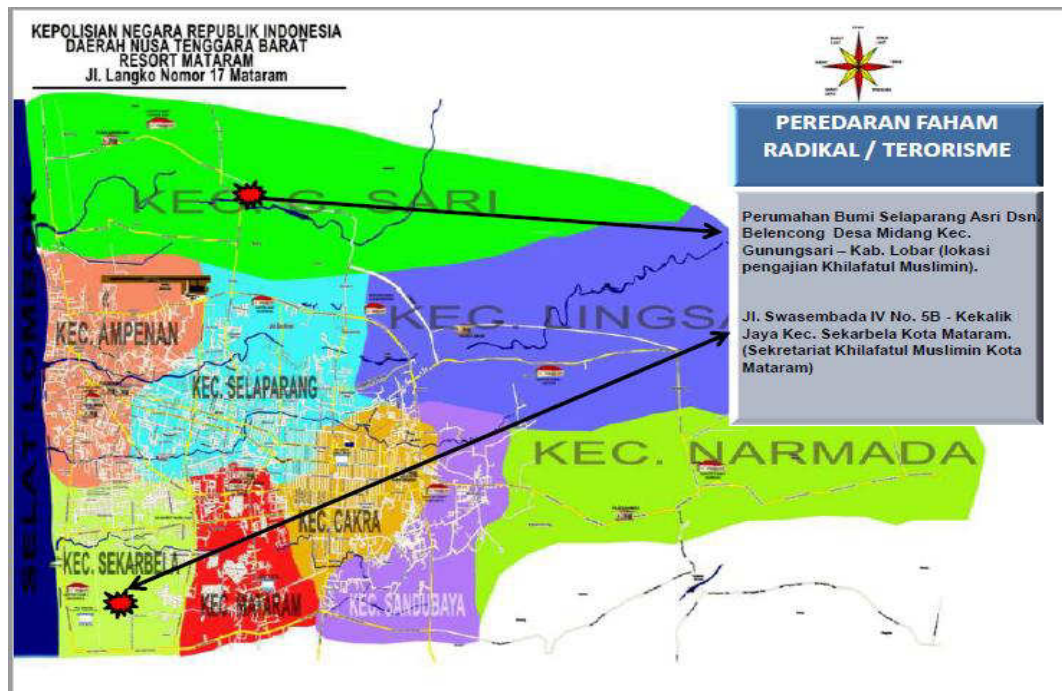
---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Asnawati dan Achmad Rosidi, *op.cit*, hlm.218

<sup>14</sup> Gunaratna, Rohan, *International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward: Islamic State and Asia*, 9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS):.A conference jointly organized by Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), (Berlinand Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS): Berlin, 2015),hlm.5.

<sup>15</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Mataram, *Peta Kerawanan Tahun 2017*, dalam [www.ntb.polri.go.id](http://www.ntb.polri.go.id), 2017, hal.7, diunduh pada 12 April 2018.



**Gambar 1.1 Peta Kerawanan Polres Mataram tahun 2017**

sumber: ntb.polri.go.id

Kelompok Khilafatul Muslimin menurut Kamran (Dosen IAIN Lampung), sebagaimana dikutip Asnawati, merupakan salah satu Gerakan Kelompok Fundamentalists yang bercita-cita menegakkan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadits melalui Sistem Kekhalifahan; satu pimpinan (*Amirul Mukminin*) untuk semua umat Islam di dunia. Fokus aktivitasnya di bidang dakwah dan pendidikan. Kelompok ini bersifat eksklusif dalam cara berpakaian (*gamis*), tidak bermadzhab, menganggap kelompoknya paling benar dan tidak punya konsep organisasi yang jelas.<sup>16</sup>

Khilafatul Muslimin sangat kuat menolak sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang dianggapnya sistem *taghut* atau kafir. Mereka juga menjadi komunitas yang tertutup, mengisolasi diri masyarakat melalui

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.216

cara berpakaian dan gaya hidup sehari-hari.<sup>17</sup> Abdul Qodir Baraja (khalifah), sebagaimana dikutip Ilham Mundzir, memandang bahwa :

“Masyarakat Muslim di Indonesia hidup dibawah hukum yang kafir. Sebab, Pancasila dan UUD 1945 serta KUHP yang menjadi turunannya, yang berlaku tidak memiliki pijakannya dalam Islam. Pelbagai produk undang-undang dan hukum adalah sepenuhnya buatan manusia (*man made*). Baginya, hukum Islam seperti *qishash*, potong tangan dan sebagainya harus ditegakkan. Sebab itulah yang dijelaskan al- Qur'an. Jika pemerintah tidak menegakkan hukum itu berarti tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam dan demikian kafir”.<sup>18</sup>

Pembubaran HTI merupakan langkah strategis pemerintah untuk membendung pergerakan HTI dengan ideologi khilafahnya. Namun HTI bukanlah satu-satunya organisasi lain yang memperjuangkan khilafah di Indonesia. Dalam versi yang lebih ekstrem, ideologi khilafah juga diperjuangkan oleh Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansorud Daulah (JAD), dua organisasi pecahan Jamaah Islamiyah (JI) yang dikategorikan organisasi teroris. Gerakan Khilafah yang lebih *soft* salah satunya ialah Khilafatul Muslimin (KM). Untuk mengatasi semua ini, Pemerintah dipandang perlu melakukan langkah-langkah strategis lanjutan, baik dengan pendekatan *soft approach* maupun *hard approach*. Kebijakan kontra-terorisme dan deradikalisasi, yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, masih dipertanyakan efektivitasnya.

sejauh ini, Strategi Pemerintah sebagian besar bersifat responsif dalam menghadapi pergerakan organisasi khilafah. sebaliknya upaya-upaya strategi yang bersifat antisipatif cenderung tidak dilakukan. Disisi lain, organisasi khilafah dengan leluasa memperluas dan memperkuat gerakannya di akar-rumput tanpa harus berkonfrontasi secara langsung dengan aparat Pemerintah. Dalam perjalanan KM sejak 1997 hingga saat ini, tidak banyak terjadi aksi-aksi radikalisme yang melibatkan kelompok ini. namun, ideologi radikal yang mereka bawa semakin berkembang

<sup>17</sup> Mundzir, Ilham, Sikap Muslim Terhadap Modernitas : Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung, *Jurnal Ilmu-Ilmi Keislaman Afkaruna Vol.9 No.1 Januari - Juni 2013*, (Jakarta : UHAMKA), hlm.68

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.73

dengan tetap menolak sistem Pemerintah yang berlaku. Salah satunya, saat ini KM telah berhasil melebarkan sayapnya hingga ke Kabupaten Sukabumi, yakni di Cikembar dan Kebon Pedes. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian: “*Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi*”.

## **1.2 FOKUS DAN SUB-FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian ini ialah pada strategi Pemerintah dalam menghadapi pergerakan organisasi Khilafatul Muslimin (KM), khususnya di Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah disampaikan, KM telah berhasil mendirikan dua cabangnya di Kabupaten Sukabumi. Melihat catatan KM di masa lalu, Tentunya pemerintah harus bersikap waspada terhadap setiap pergerakan KM.

Adapun sub-fokus penelitan pertama diarahkan pada perkembangan gerakan KM di Kabupaten Sukabumi. Ideologi khilafah saat ini dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya KM di Kabupaten Sukabumi tentunya tidak terlepas dari adanya faktor internal dan eksternal yang menopangnya. Faktor internal, misalnya, bagaimana strategi tarbiyah yang dilakukan oleh KM disana. Sedangkan faktor eksternal meliputi legitimasi masyarakat yang bersikap akomodatif terhadap keberadaan gerakan ini.

Kemudian, sub-fokus kedua diarahkan pada bagaimana pertentangan yang terjadi antara KM dan negara sejauh ini. pertentangan yang terjadi dapat menjadi potensi perang asimetris antara Khilafatul Muslimin dan Negara di kemudian hari. Cepat atau lambat, ideologi khilafah akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap konsep negara. KM jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah produk *thogut* dan bertentangan dengan Syariat Islam.

Setelah mengetahui perkembangan gerakan dan pertentangan yang dilakukan KM, tentunya dapat dianalisa bagaimana kondisi objektif

KM di Kabupaten Sukabumi. Sehingga pemerintah dapat mengetahui strategi apa yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, Sub-fokus selanjutnya yaitu pada strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menangani perkembangan gerakan KM di wilayahnya.

### 1.3 RUMUSAN MASALAH

Gerakan khilafah menggunakan cara-cara asimetris untuk memenangkan misi-misinya. Mereka bergerak secara *underground* untuk memperluas pengaruhnya melalui masjid-masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, hingga universitas dengan memanfaatkan perkembangan media informasi dan komunikasi. Gerakan khilafah cenderung non-akomodatif dengan pemerintah bahkan menjadi “negara didalam negara”. KM kini mampu memperluas gerakannya hingga ke wilayah Kabupaten Sukabumi, yakni di Cikembar dan Kebon pedes.

Perkembangan gerakan ini memicu pertentangan bahkan perang asimetris antara negara sebagai *the strong* dan KM sebagai *the weak*. Permasalahan gerakan khilafah dan negara dipandang sebagai bentuk peperangan asimetris. Di satu sisi, negara mengakui KM sebagai bagian dari negaranya, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Di sisi lain, KM memandang negara sebagai *thagut* yang tidak wajib dipatuhi segala aturannya. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya membendung perkembangan khilafah karena dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa. Di lain pihak, organisasi khilafah terus mempekuat pengaruhnya dengan memanfaatkan situasi politik dan meningkatnya gelombang *civil distrust* di dalam negeri.

Pemerintah dipandang perlu melakukan langkah-langkah strategis guna membendung pergerakan khilafah di Indonesia. Pembubaran HTI bukanlah akhir dari eksistensi gerakan khilafah di Indonesia. Masih banyak ditemukan organisasi berideologi serupa yang masih berkembang di Indonesia. salah satunya ialah KM. Beberapa ahli menilai program

deradikalisasi, yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, masih dipertanyakan efektivitasnya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana pertentangan antara gerakan Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam menangani gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi?

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan gerakan khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertentangan yang terjadi antara gerakan Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah dalam menangani gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini tentunya diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangsi wawasan keilmuan, dalam kajian radikalisme dan terorisme di Universitas Pertahanan khususnya, di Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, manfaat penelitian ini diuraikan dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Menjadi referensi untuk mengetahui perkembangan Gerakan Khilafah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi sampai saat ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memicu adanya penelitian lanjutan di kemudian hari, tentunya dengan tema dan subjek penelitian yang lebih berkembang.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Memberi rekomendasi kepada pemerintah dalam perancangan kebijakan dan strategi apa yang tepat dilakukan sebagai upaya *counter* terhadap ajaran khilafah yang berbahaya bagi kedaulatan negara. Pemerintah yang dimaksud ialah Pemda Kabupaten Sukabumi maupun Kementerian/ Lembaga yang membidangi hal itu.
2. Bagi lembaga Intelijen, penelitian ini dapat menambah informasi mengenai perkembangan ideologi khilafah, selanjutnya dapat menjadi *early warning sistem* terhadap potensi radikalisme di kabupaten Sukabumi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **2.1 DESKRIPSI KONSEPTUAL**

##### **2.1.1 Konsep Ilmu Pertahanan**

Ilmu Pertahanan di Indonesia tergolong rumpun ilmu baru yang dikategorikan rumpun Ilmu Sosial. Dengan demikian, tidak banyak referensi primer berbahasa Indonesia untuk mempelajari Ilmu Pertahanan secara tekstual. Sepintas ketika membahas Ilmu Pertahanan, pandangan umum selalu mengidentikannya dengan Ilmu Kemiliteran atau Ilmu Perang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Ilmu Perang dan Ilmu Militer merupakan cikal bakal dari adanya Ilmu Pertahanan. Para ahli perang sendiri sering mengatakan bahwa Ilmu Perang itu sebagai ilmu sekaligus seni. Sebagai salah satu pendiri Universitas Pertahanan, Makmur Supriyatno mencoba mendefinisikan Ilmu Pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.<sup>1</sup>

Definisi yang lebih general dinyatakan oleh Syaripudin Tippe. menurutnya, secara ontologi, Ilmu Pertahanan adalah ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>2</sup> Dalam pengembangannya, Ilmu Pertahanan bersifat multi-disipliner. artinya Ilmu Pertahanan bukan merupakan satu rumpun ilmu yang berdiri

---

<sup>1</sup> Supriyatno, Makmur, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), cetakan I, hlm. 29.

<sup>2</sup> Tippe, Syaripudin, *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, (Jakarta : Salemba Humanika. 2016), Hlm.51.

sendiri, namun juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lain sesuai perkembangan keilmuan masa kini. Sebagaimana dinyatakan pula oleh Makmur Supriyatno :

“Karena perkembangan perang dan teknologinya, dan peradaban manusia dari masa ke masa yang semakin beradab, maka pertahanan tidak hanya merupakan ilmu militer atau ilmu perang, tetapi sesuatu ilmu yang multi-multidisiplin, maka Ilmu Pertahanan juga mempelajari ilmu-ilmu lain, seperti geografi, demografi, sosiologi, hukum, sejarah, matematika, antropologi, psikologi, teknologi, dan berbagai ilmu lainnya...”<sup>3</sup>

Dari kedua pakar yang mencoba memberikan definisi mengenai Ilmu Pertahanan diatas, peneliti cenderung lebih sependapat dengan definisi kedua yang disampaikan Syarifudin Tippe, yakni Ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara. tujuan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana amanat UUD 1945, dirumuskan dalam tiga hal pokok, yakni menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.

Adapun objek kajian Ilmu Pertahanan ialah perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan.<sup>4</sup> Dengan demikian, diantara kajian Ilmu Pertahanan ialah berkaitan dengan strategi, manajemen, ekonomi, keamanan nasional dan teknologi yang didasari oleh sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Selanjutnya, sebagai wujud implementasi Ilmu Pertahanan di Indonesia tergambar dalam konsep Bela Negara, Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Keberadaan konsep Bela Negara, OMP dan OMSP secara filosofis dan aplikatif melekat pada pertahanan, baik pada tataran keilmuan maupun pada tataran praktis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Supriyatno, Makmur, *op.cit.*, hlm.30.

<sup>4</sup> Tippe, Syarifudin, *op.cit.*, hlm 51

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.164

### 2.1.2 Konsep Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah segala usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dinyatakan bahwa :

“Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>7</sup>

Selanjutnya, Sistem Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>8</sup> Demikian dikatakan Connie Rohakundini Bakrie dalam bukunya.

Adapun hakekat ancaman ialah Setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yg timbul di dalam negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman pada dasarnya adalah suatu konsep yang bersifat multidimensional yang memiliki empat dimensi utama, yaitu; militer-nonmiliter, konvensional-nonkonvensional, langsung-tidak langsung, dan eksternal-internal.<sup>9</sup>

Karakteristik ancaman terhadap pertahanan negara terbagi tiga, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida. Selanjutnya, ancaman dikategorikan kedalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Kategorisasi ini didasarkan pada bentuk dan aktor dari

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1, ayat (1).

<sup>7</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta : 2015), hlm.26

<sup>8</sup> Bakrie, Connie Rahakundini, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm 49

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.55

setiap ancaman. Ancaman militer ialah ancaman yang berbentuk serangan kekuatan militer bersenjata, seperti agresi dan invasi militer. Sedangkan ancaman non-militer merupakan ancaman yang berbasis pada ideologi, politik, sosial dan budaya. Adapun ancaman hibrida merupakan perpaduan dari keduanya. Kondisi dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>10</sup>

Berbicara masalah pertahanan negara selalu dikaitkan dengan hal pengerahan tentara (militer) dalam suatu peperangan. Akan tetapi menurut Indria Samego, sebagaimana dikutip Bakrie, mengatakan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara bukanlah semata-mata merupakan domain militer (TNI), dan tidak hanya terbatas pada persoalan mesin perang. Sistem pertahanan negara juga membutuhkan perangkat lunak (ideologi) seperti yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.20/1982 mengenai Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan, yang paparannya adalah sebagai berikut :

“upaya pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan, serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara.”<sup>11</sup>

Dengan demikian, Sistem Pertahanan di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pertahanan Semesta.

Salah satu faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain Sistem Pertahanan Negara ialah ancaman, baik ancaman yang bersiap aktual maupun ancaman potensial. Kementerian Pertahanan, melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia, telah menetapkan prediksi ancaman nyata di masa depan. Salah satu ancaman nyata yang menjadi

---

<sup>10</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm.2

<sup>11</sup> Bakrie, *op.cit.*, hlm.50

prioritas dalam penanganannya ialah ancaman terorisme dan radikalisme. Kedua ancaman ini merupakan ancaman berbasis ideologi. Terorisme dan radikalisme merupakan paham yang lahir dari pemahaman terhadap doktrin agama/kepercayaan yang mengakar, salah satunya ialah ideologi khilafah. ideologi khilafah diindikasikan sebagai salah satu ideologi radikal sejak terjadinya pemberontakan DI/TII hingga berdirinya HTI.

Persepsi akan ancaman lahir dari proses panjang analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis. Proses analisis strategis dalam merumuskan ancaman dilaksanakan secara terus-menerus terhadap data, fakta, dan kecenderungan situasi pada skala global, regional, dan nasional.<sup>12</sup> Menurut Bakrie, Persepsi ancaman harus dilihat dari dua hal pokok. *Pertama*, adanya kesepakatan bahwa penyesuaian tentang persepsi ancaman tidak hanya dilihat dari sisi tradisional-konvensional, tetapi disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ideologi; *Kedua*, ada kesepakatan bahwa NKRI merupakan sesuatu yang *given* atau *taken for granted*, yaitu perlunya mencermati faktor perubahan internasional dengan menekankan pada persoalan perkembangan teknologi dan komunikasi yang mempengaruhi terjadinya perubahan sifat dan bentuk ancaman serta perubahan karakter perang.<sup>13</sup>

### 2.1.3 Teori Strategi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori strategi, terlebih dahulu peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai konsep Strategi Pertahanan di Indonesia. Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. *Pertama*, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi lima sasaran strategis. *Kedua*, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan

---

<sup>12</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 5

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.52

Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. *Ketiga*, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang.<sup>14</sup>

Kemudian, strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk strategi pengkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan yang disiapkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang mungkin timbul serta ancaman lain yang ditetapkan presiden RI.<sup>15</sup> Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan negara dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri.<sup>16</sup>

Adapun fungsi penindakan dilakukan dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida dengan mengerahkan kekuatan pertahanan, baik militer dan nirmiliter, sesuai dengan mekanisme pertahanan semesta (Sishanta). Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah peyelamatan dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana nasional.<sup>17</sup>

Kemudian, fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara terpadu oleh kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat perang, pemberontakan atau serangan separatistis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, bencana alam, atau akibat ancaman nonmiliter lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Strategi Pertahanan Negara 2015, (Jakarta : Kemenhan RI, 2017), hlm.52-53

<sup>15</sup> Peraturan Panglima TNI nomor 66/IX/2010 tentang Strategi Militer, Bab V Pasal 20

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.30

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.31

Nampaknya konsepsi strategi pertahanan Indonesia menganut teori strateginya Clausewitz. Teori strategi Clausewitz dibangun berdasarkan tiga konsep dasar: *Ends, Means, Ways*. Teori strategi banyak dibahas beriringan dengan lahirnya seni berperang, oleh karena itu teori strategi menjadi identik dengan strategi dalam perang (militer). Menurut J.C.Waylie (1967), sebagaimana dikutip Yudistira, strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan; suatu tujuan bersama dengan suatu sistem pengukuran untuk pencapaiannya.<sup>19</sup> Keberhasilan sebuah strategi bergantung kepada kalkulasi dan koordinasi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dan metode yang digunakan. Strategi secara *inheren* bersifat komprehensif; tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi lingkungan strategis yang kompleks dan mudah berubah dengan cara memberikan arahan bagi pendayagunaan kekuatan nasional yang bijak untuk pencapaian tujuan nasional melalui kebijakan yang dibuat.<sup>20</sup>

Definisi Strategi yang pertama dituliskan Archduke Charles (1771-1847), seorang Komandan Habsburg dalam perang melawan Napoleon, menyatakan strategi sebagai Ilmu Perang, meliputi desain perencanaan, batasan-batasan (*circumscribes*), dan keputusan-keputusan dalam pembangunan operasi militer.<sup>21</sup> Henry Spenser Wilkinson, dalam diskusi operasi angkatan laut pada 1894, memberikan definisi strategi sebagai sebuah kebijakan yang merupakan aksi nasional yang diarahkan pada sebuah tujuan atau maksud tertentu. objek yang ditetapkan harus menjadi satu nilai dan apresiasi negara. kalau tidak, pemerintah tidak akan memiliki dukungan dalam upaya untuk mencapainya. Kemudian, sarana (*means*) yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin

---

<sup>19</sup> Yudistira, Arri, Teori Perang dan Strategi, dalam [https://www.academia.edu/11315420/teori\\_perang\\_dan\\_strategi](https://www.academia.edu/11315420/teori_perang_dan_strategi) diakses pada 14 Agustus 2018

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>21</sup> Heuser, Beatrice, *The Evolution of Strategy : Thinking war from Antiquity to the Present*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2010) hlm.6

dicapai (*ends*).<sup>22</sup> Begitupun Freedman, yang mendefinisikan Strategi adalah mengenai hubungan antara *ends* (politik) dan *Means* (Militer, ekonomi, politik, dll).<sup>23</sup> Saat ini teori strategi tidak hanya digunakan dalam dunia militer atau politik saja, namun digunakan di berbagai bidang kehidupan seperti bisnis dan ekonomi.

Menurut Harry Yarger, Strategi dalam perspektif Negara dapat didefinisikan sebagai Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer untuk menciptakan dampak strategis dalam melindungi atau memajukan kepentingan nasional di kawasan sesuai dengan panduan kebijakan. Strategi menuntut adanya sinergi dan simetri antara tujuan (*objectives*), konsep (*concept*), dan sumber daya (*resources*) yang dimiliki untuk meningkatkan probabilitas dan konsekuensi yang menguntungkan dari keberhasilan kebijakan dan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan sebuah kebijakan.<sup>24</sup>

Nampaknya, peneliti memandang teori strategi Yarger lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, hal ini mengingat keterbaruan teori serta kesesuaian dengan tema penelitian yang dipilih. Teori ini menjabarkan strategi dalam perspektif negara secara umum, berbeda dengan teori lain yang sering kali mengidentikan teori strategi pada perspektif strategi militer/perang.

Selanjutnya, Strategi dinyatakan dalam bentuk *ends*, *ways*, dan *means*. Ketiga unsur ini mengarahkan pada pencapaian hasil akhir yang diharapkan dalam batas-batas kelayakan, kesesuaian, dan penerimaan, serta risiko yang dapat diterima. Hal ini merupakan strategi yang valid untuk dipertimbangkan oleh setiap pembuat kebijakan.<sup>25</sup> Dalam bahasa

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Yarger, Harry R., *Strategic Theory For The 21<sup>st</sup> Century : The Little Book on Big Strategy*, ( USA: Strategic Studies Institut, 2006), hlm.65-66

<sup>25</sup> Yarger, Harry R., *op.cit*, hlm.69

Harry Yarger; *ends*, *ways*, dan *means* diganti dengan kata *objectives*, *concepts*, dan *resources*.

*Objectives* menjelaskan "apa" yang harus dicapai. *objectives* muncul dari pertimbangan kepentingan nasional dan faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi capaian hasil akhir yang diharapkan. Tujuan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu : panduan kebijakan, strategi yang lebih tinggi, sifat lingkungan strategis, kemampuan dan keterbatasan instrumen kekuatan nasional, dan sumber daya yang tersedia.<sup>26</sup> Dalam perumusan strategi, menentukan sebuah *objectives (ends)* dengan benar merupakan hal yang paling penting. Seringkali dalam pengembangan strategi, tidak cukup waktu untuk mempertimbangkan tujuan yang sesuai dalam konteks kebijakan yang diinginkan, kepentingan nasional, serta perkembangan lingkungan strategis. *Objectives* adalah fokus sebenarnya dalam perumusan strategi, jika tidak ditentukan dan diartikulasikan dengan benar, sebuah strategi yang diajukan pada dasarnya cacat dan tidak efektif.

Rumusan strategi menggunakan analisis untuk menentukan faktor-faktor yang relevan, berupa: fakta, masalah, ancaman, dan peluang yang terjadi atau berinteraksi sehingga memengaruhi kepentingan nasional. Faktor-faktor tersebut merupakan fokus utama dalam strategi; hubungannya dengan kepentingan dan panduan kebijakan negara mengarah pada *objectives* dan *concept* yang sesuai; apa yang harus dicapai dan bagaimana menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk mencapai tujuan tersebut.

*Concepts (ways)* berkaitan dengan "bagaimana" sebuah tujuan harus dipenuhi dengan mendayagunakan segenap instrumen kekuatan nasional. *concepts* menghubungkan sumber daya dan tujuan dengan menjawab siapa melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa, dengan jawaban yang menjelaskan "bagaimana" suatu tujuan akan tercapai. *Concepts* harus memberikan arahan dan batasan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*,

eksplisit kepada bawahan dalam perumusan strategi dan perencanaan yang lebih spesifik. Meski begitu, *concepts* tidak mesti terlalu rinci agar tidak menghilangkan kreativitas dan inisiatif strategi dan perencanaan di tingkat bawah.<sup>27</sup>

Fokus konsep dalam strategi adalah pada bagaimana sebuah konsep dapat berinteraksi sinergis dengan lingkungan strategis yang ada untuk memperoleh dampak yang diinginkan. Konsep yang baik ialah konsep yang memperhatikan aspek kesesuaian, penerimaan, dan keterjangkauan, serta mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuannya beradaptasi. Dengan demikian, rumusan strategi yang baik ialah tentang bagaimana menguji sebuah konsep yang layak.

*Resources* dalam perumusan strategi berfungsi untuk menentukan batas jenis dan tingkat modalitas pendukung yang tersedia untuk mencapai konsep strategi. Dalam strategi, sumber daya dapat berwujud (kekuatan, orang, peralatan, uang, dan fasilitas) atau tidak berwujud (kehendak, keberanian, semangat, atau kecerdasan). Sumber daya yang kedua ini tidak dapat diukur karena sifatnya yang selalu berubah-ubah.<sup>28</sup>

Sebagaimana telah disebutkan Strategi memiliki logika yang melekat pada tiga aspek: *kesesuaian* antara tujuan yang ingin dicapai serta elemen kekuatan nasional yang dimiliki; *kelayakan* konsep yang dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia; dan *penerimaan* (akseptabilitas), yakni memastikan dampak strategis yang ditimbulkan, metode yang digunakan, serta anggaran yang dikeluarkan dapat diterima oleh komunitas lokal dan internasional.<sup>29</sup> *Kesesuaian* berkaitan dengan akankah keberhasilan strategi tersebut menghasilkan dampak yang diinginkan. *Kelayakan* berkaitan dengan dapatkah tujuan itu dicapai dengan cara-cara (*concept*) yang tersedia. Akseptabilitas berkaitan dengan apakah dampak, metode, dan sumber daya yang digunakan untuk

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.70

<sup>29</sup> *Ibid*,

mencapai upaya-upaya itu dapat dibenarkan dan diterima oleh aktor politik.

Selain itu, dalam perumusan strategi juga harus mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari keberhasilan atau kegagalan dari sebuah strategi. Resiko dapat diklarifikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan: Asumsi apa yang dibuat dalam strategi ini, dan dampak apa yang timbul jika terjadi kegagalan?; Apa saja Faktor internal atau eksternal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan strategi? Baik itu berdampak positif, maupun negatif; Fleksibilitas atau kemampuan adaptasi apa yang dimiliki komponen strategi? Bagaimana strategi dapat dimodifikasi dan berapa anggaran yang diperlukan; Bagaimana reaksi dari aktor lain terhadap apa yang telah dicoba atau berhasil dicapai? Bagaimana reaksi mereka terhadap metode strategi tersebut?; Apakah konsekuensi antara maksud yang diinginkan dan yang tidak diinginkan seimbang?; Bagaimana peluang atau friksi aturan main dalam strategi tersebut?<sup>30</sup>

#### **2.1.4 Teori Peperangan Asimetris**

Dalam teori ini, peneliti merujuk pada teori konflik asimetris Ivan Arreguín-Toft. Dalam teorinya, Arreguín-Toft menggunakan kata “konflik” untuk menggantikan istilah “perang”. Sebagai contoh; terorisme, perang dagang, dan perselisihan buruh, dalam pandangan Arreguín-Toft, merupakan bentuk konflik yang memiliki dinamika yang sama dengan perang. Sejalan dengan pandangan itu, Tomes Robert berpendapat bahwa perang asimetris dapat dideskripsikan sebagai konflik, yaitu pertikaian antara dua pihak yang berbeda dalam hal sumber daya inti dan bentuk perjuangan. Perbedaan ini nampak pada cara interaksi dan upaya yang dilakukan untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan lawannya. Perjuangan tersebut sering berhubungan dengan strategi dan taktik perang non-konvensional. Perang asimetris berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.71

Perjuangan kelompok yang lemah (*the weak*), untuk mengimbangi entitas yang kuat (*the strong*). Oleh karena itu, aktor lemah menggunakan berbagai strategi dalam rangka mengimbangi kekurangan tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>31</sup>

Beberapa pakar lain yang juga menggunakan istilah konflik asimetris diantaranya Thazha Varkey Paul dalam bukunya *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*, menjelaskan bahwa konflik Asimetris adalah konflik yang melibatkan dua negara dengan perbedaan sumber daya kekuatan militer dan ekonomi secara keseluruhan.<sup>32</sup> Begitupun Stepanova, dia menggunakan istilah konflik asimetris dalam analisisnya mengenai aspek struktur dan ideologi terorisme. Menurutnya aksi terorisme merupakan bentuk kekerasan yang sangat melekat pada integrasi di satu sisi kekerasan pada masyarakat sipil, dengan perlawanan kekerasan secara asimetris melawan musuh yang lebih kuat, baik itu negara atau kelompok negara.<sup>33</sup> Demikian juga Robin Geiß, dalam penelitiannya mengenai struktur konflik asimetris. Geiß menyimpulkan bahwa saat ini konflik asimetris merupakan hal lumrah dan legal sebagai bagian konflik kontemporer. Di masa lalu, pola konflik asimetris tidak dapat diprediksi dan memiliki efek samping yang luas. Ketidak-seimbangan kekuatan militer menjadikan konflik selalu mendorong kemenangan pada pihak pemberontak yang lemah untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan menghindari standar hukum yang diterima untuk memimpin perlawanan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, Arreguín-Toft menjelaskan kunci dalam teori peperangan asimetris adalah interaksi strategis (*strategic interaction*). Logika interaksi strategis menyatakan bahwa Setiap strategi memiliki

---

<sup>31</sup> Tomes Robert, *Relearning Counterinsurgency Warfare*, (Parameter, US: Army War College, Spring 2004).

<sup>32</sup> Paul, Thazha Varkey, *Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers*, (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm.32

<sup>33</sup> Stepanova, Ekaterina, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*, *SIPRI Research Report No. 23*, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm.2

<sup>34</sup> Geiß, Robin, *Asymmetric Conflict Structures*, *International Review of The Red Cross*, *Volume 88 Number 864 December 2006*, (Germany: Bucerius Law School) hlm.776

kontra-strategi yang ideal. Aktor perang dapat melakukan prediksi-prediksi terhadap musuh mereka. Oleh karena itu, strategi dapat secara dramatis meningkatkan peluang kemenangan dengan memilih dan menerapkan strategi tersebut. Mao Zedong mengatakan bahwa ketika yang lemah melawan yang kuat, beberapa interaksi strategis akan mendukung yang lemah, sementara yang lain akan menyukai yang kuat.<sup>35</sup>

Menurut Arreguín-Toft, keseluruhan potensi strategi dan kontra-strategi dapat direduksi menjadi dua tipe ideal pendekatan strategis: strategi langsung dan strategi tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan menghancurkan kekuatan musuh saat pertempuran terjadi. Sedangkan pendekatan tidak langsung merupakan upaya untuk menghancurkan keinginan (niat) musuh untuk bertarung. Pendekatan interaksi yang sama (langsung-langsung atau tidak langsung-tidak langsung) berdampak pada kekalahan aktor yang lemah karena tidak adanya yang menengahi atau menangkis keunggulan kekuatan aktor yang kuat. Pola Interaksi ini akan dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, pendekatan interaksi yang berlawanan (langsung-tidak langsung atau tidak langsung-langsung) menyiratkan kemenangan untuk aktor yang lemah karena keunggulan kekuatan aktor yang kuat mampu ditangkis atau dihindari. Karena itu, Pola Ini cenderung membuat konflik menjadi berkepanjangan, dengan waktu yang mendukung aktor yang lemah.<sup>36</sup>

Terorisme, radikalisme, dan insurjensi merupakan contoh bentuk peperangan asimetris asimetris. Taktik yang dilakukan teroris dengan melakukan bom bunuh diri, atau taktik gerilia yang dilakukan insurjen merupakan interaksi strategis berpola langsung-tidak langsung. Kasus di Indonesia dan di beberapa negara lain, terorisme dan insurjensi merupakan perang berlarut yang merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi negara.

---

<sup>35</sup> Arreguín-Toft, Ivan, *How the Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict*, *Journal International Security*, Vol. 26, No. 1 (Summer 2001), pp. 93–128, (Harvard University) ,hlm.104

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.105

Menurut Arreguín-Toft, ketika pola interaksi strategis yang dilakukan cenderung berdampak pada peperangan yang berkepanjangan, maka negara (*the Strong*) cenderung kalah karena dua alasan. *Pertama*, Negara cenderung akan mengerahkan kekuatan militer besar dengan anggaran yang tentu juga besar. Hal ini dilakukan dengan harapan menghasilkan sebuah kemenangan bagi negara. selain itu, tekanan domestik untuk mengakhiri peperangan kemungkinan akan terjadi. *Kedua*, Aktor yang kuat juga kalah dalam perang asimetris ketika melakukan upaya-upaya menghindari kenaikan biaya, seperti menyatakan perang, memobilisasi kekuatan cadangan, menaikkan pajak, atau mengurangi jumlah korban.<sup>37</sup> Selanjutnya, sebagai bentuk frustrasi atas perang berkepanjangan tersebut, negara melakukan barbarisme yang akan berdampak pada pelanggaran HAM dan intervensi negara lain (PBB).

Untuk memperjelas teorinya, Arreguín-Toft mengilustrasikan dalam model berikut :

		<b>Weak-Actor Strategic Approach</b>	
		<b>Direct</b>	<b>Indirect</b>
<b>Strong-Actor Strategic Approach</b>	<b>Direct</b>	<b>Strong actor</b>	<b>Weak actor</b>
	<b>Indirect</b>	<b>Weak actor</b>	<b>Strong actor</b>

**Gambar 2.1 Ekspektasi Dampak Interaksi Strategis**

Sumber : Ivan Arreguin-Toft, 2005

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.106

Dari matrik diatas dapat dihasilkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

- 1) Ketika aktor kuat menyerang menggunakan strategi langsung dan aktor yang lemah bertahan menggunakan strategi langsung, aktor yang kuat pasti menang telak dengan cepat.
- 2) Ketika aktor kuat menyerang dengan strategi langsung dan aktor yang lemah bertahan menggunakan strategi tidak langsung, aktor yang lemah pasti menang.
- 3) Ketika aktor kuat menyerang menggunakan strategi tidak langsung dan aktor yang lemah mempertahankan menggunakan strategi langsung, aktor yang kuat pasti kalah.
- 4) Ketika aktor yang kuat menggunakan barbarisme untuk menyerang aktor yang lemah menggunakan taktik gerilya, aktor yang kuat pasti menang.
- 5) Aktor yang kuat lebih cenderung menang perang dengan pendekatan interaksi yang sama dan kalah apabila menggunakan interaksi dengan pendekatan berbeda.

### **2.1.5 Teori Hegemoni**

Teori Hegemoni berawal dari lahirnya perebutan monopoli kekuasaan antara negara dan kekuasaan gereja di Eropa. Gereja diibaratkan sebagai representasi kekuatan masyarakat sipil. Teori ini kemudian dikembangkan dalam menganalisis perlawanan gerakan kaum sosialis-komunis di Eropa. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni merupakan konsep yang lebih luas dari sebuah supremasi suatu kelompok sosial terhadap kelompok yang lain dalam hubungan sosial. Hegemoni juga dikarakteristikan ke dalam istilah “pengaruh kultural”, bukan hanya pada kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi. Teori hegemoni dibangun atas dasar pentingnya sebuah ide (ideologi) dalam melakukan kontrol sosial.

Melalui teori ini, Gramsci beragumen bahwa sebuah kekuasaan, agar langgeng, membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adanya perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang

bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh negara (*state*) melalui lembaga-lembaganya. *Kedua*, adanya perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranatanya untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok kepentingan (*interest group*).<sup>38</sup>

Dengan demikian, Hegemoni dapat digunakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang negara sebagai masyarakat politik dan sudut pandang masyarakat sipil. Baik negara maupun kelompok masyarakat sipil akan terus berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasainya. Kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui persetujuan, yang mencakup penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Berbeda dengan Negara yang cenderung koersif dan melahirkan dominasi kekuasaan. Dengan demikian, hegemoni hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, bukan oleh masyarakat politik (negara).

Menurut Gramsci, supaya pihak yang dikuasai mematuhi penguasanya, pihak ini tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa tersebut. Lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atas kedudukan mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni”, yakni menguasai berlandaskan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensus (kesepakatan bersama).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Gramsci, Antonio, *Selections From the Prison Notebooks*, (edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith), (New York: International Publisher, 1971), hlm. 244

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.245

Dalam masyarakat sipil, Hegemoni dihasilkan dari struktur-struktur kognitif yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh prinsip-prinsip kelompok masyarakat sipil. Hegemoni lebih menekankan pada aspek kultural (ideologis). Melalui produk-produknya, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar, baik secara moral maupun intelektual.

Hegemoni bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan bersama bagi seluruh masyarakat mengenai dunia. Teori ini menjelaskan bagaimana ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan legitimasi kepada kelompok penguasa.

Berdasarkan gambaran diatas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam analisis teori hegemoni, paling tidak dapat dilihat dari empat aspek. *Pertama*, bagaimana sebuah kelompok masyarakat sipil mempropagandakan ideologi mereka kepada audien targetnya. Selanjutnya, Ideologi menjadi alat kontrol sosial bagi anggota kelompok tersebut. *Kedua*, adanya upaya-upaya persuasif untuk membujuk target audien supaya mengikuti kehendak kelompok masyarakat sipil. *Ketiga*, terjadinya konsensus (kesepakatan, sumpah setia) antara anggota dengan pemimpin kelompok dengan segala konsekuensinya. *Keempat*, adanya struktur kognitif yang dimiliki kelompok masyarakat sipil sebagai sarana/media untuk menyuarakan kepentingan kelompok. Sebagai contoh, struktur kognitif dapat berupa lembaga pendidikan dan media informasi yang dimiliki suatu kelompok masyarakat sipil.

#### **2.1.6 Teori Legitimasi**

Telah banyak ilmuwan sosial mendefinisikan legitimasi dengan berbagai spesifikasi. Diantarnya ialah Dowling dan Pfeffer (1975), yang

mengkonotasikan legitimasi sebagai kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait dengan/ tersirat dalam sebuah kegiatan (organisasi) dengan norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar.<sup>40</sup> Meyer dan Scott (1991) juga menggambarkan bahwa legitimasi lahir dari keselarasan antara organisasi dan lingkungan budayanya.<sup>41</sup>

Definisi yang lebih kompleks ditulis oleh Suchman (1995), menurutnya, legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas merupakan sesuatu yang dibutuhkan, pantas atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi-definisi yang berkembang di masyarakat.<sup>42</sup> Legitimasi sering dikonseptualisasikan sebagai salah satu dari banyak sumber daya yang harus diperoleh organisasi dari lingkungan mereka.<sup>43</sup> Eksistensi sebuah organisasi/institusi tidak lepas dari adanya legitimasi dari lingkungan dimana ia berada. Sehingga, sebuah Institusi perlu mempertahankan legitimasi ini demi keberlangsungannya.

Selanjutnya, Suchman menambahkan bahwa Legitimasi adalah sebuah persepsi atau asumsi yang di dalamnya merepresentasikan reaksi dari siapapun yang memberikan pandangan terhadap suatu organisasi; Dengan demikian, legitimasi dimiliki secara obyektif, namun dibuat secara subyektif. Legitimasi merupakan bangunan sosial yang didalamnya tercermin keselarasan antara perilaku entitas yang dilegitimasi dan keyakinan bersama (atau diasumsikan bersama) dari beberapa kelompok

---

<sup>40</sup> Dowling, J., & Pfeffer, J, "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior". *Pacific Sociological Review*, 1975,18: 122-136.

<sup>41</sup> Meyer, J. W., & Scott, W. R.. *Centralization and the legitimacy problems of local government*. In J. W. Meyer & W. R. Scott (Eds.), *Organizational environments: Ritual and rationality*: 1983, 199-215. Beverly Hills, CA: Sage.

<sup>42</sup> Suchman, Mark.C. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches", *Journal The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1995), pp. 571-610. Academy of Management University of Wisconsin-Madison, 1995. Hlm.573.

<sup>43</sup> Tilling, Matthew.V., "Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting", *Commerce Research Paper Series No. 04-6 ISSN: 1441-3906*. Flinders University: South Australia.

masyarakat; dengan demikian, legitimasi tergantung pada persepsi orang secara kolektif, bukan bergantung pada persepsi sebagian orang.<sup>44</sup>

Subjek-subjek dari legitimasi ialah entitas masyarakat, struktur, tindakan, dan gagasan (ideologi) yang penerimaannya dalam penilaian.<sup>45</sup> Legitimasi bersumber dari internal dan eksternal audien, dalam hal ini ialah anggota komunitas maupun masyarakat setempat.

Selanjutnya Suchman membagi dimensi legitimasi menjadi tiga bagian dengan dua pola waktu. Tiga dimensi tersebut yaitu: Legitimasi Pragmatis, Legitimasi Moral dan Legitimasi Kognitif. Legitimasi Pragmatis terletak pada pertimbangan kepentingan praktis pribadi audien dari sebuah organisasi. seringkali, kepentingan praktis ini melibatkan pertukaran langsung antara organisasi dan audiens; namun hal ini juga dapat melibatkan interdependensi politik, ekonomi, atau sosial yang lebih luas, dimana tindakan organisasi tetap nampak mempengaruhi kesejahteraan audien.<sup>46</sup> legitimasi pragmatis yang terdiri pertukaran (saling memberi keuntungan), pengaruh, minat, dan karakter.<sup>47</sup>

Sedangkan Legitimasi Moral adalah "sosiotropik", yakni tidak terletak pada penilaian tentang apakah aktivitas tertentu menguntungkan evaluator (masyarakat), tetapi lebih pada penilaian tentang apakah kegiatan tersebut adalah "hal yang benar untuk dilakukan".<sup>48</sup> Legitimasi Moral terdiri dari konsekuensi (dampak), prosedur, orang (wibawa pemimpin), dan struktur.<sup>49</sup>

Adapun Legitimasi Kognitif adalah pelibatan dukungan afirmatif (penegasan) untuk suatu organisasi atau penerimaan organisasi yang diperlukan atau tidak dapat dielakkan berdasarkan pada beberapa akun

---

<sup>44</sup> Suchman, *loc.cit*, hlm. 574.

<sup>45</sup> Deephouse, David L. & Mark. Suchman, *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism : Legitimacy in Organizational Institutionalism*, (London: Sage Publication Ltd. 2008), Chapter I, hlm. 54.

<sup>46</sup> Suchman, *op.cit*, hlm.578.

<sup>47</sup> Deephouse, David L. & Mark. Suchman, *loc.cit*. hlm. 52.

<sup>48</sup> Suchman, *op.cit*, hlm.579

<sup>49</sup> Deephouse, David L. & Mark. Suchman, *op.cit*.

budaya yang diberikan untuk dapat diterima.<sup>50</sup> Legitimasi Kognitif terdiri dari prediktabilitas (keterdugaan), plausibilitas (kelogisan), inevitabilitas (sifat tidak bisa dihindari), dan permanensi (kelanggengan).<sup>51</sup> Berikut gambarannya :

	<b>Actions</b>	<b>Essences</b>	
<b>Episodic</b>	Exchange	Disposition	<b>Pragmatic Legitimacy</b>
<b>Continual</b>	Influence	Interest Character	
<b>Episodic</b>	Consequential	Personal	<b>Moral Legitimacy</b>
<b>Continual</b>	Procedural	Structural	
<b>Episodic</b>	Comprehensibility		<b>Cognitive Legitimacy</b>
	Predictability	Plausibility	
	Taken-for-Grantedness		
<b>Continual</b>	Inevitability	Permanence	

**Gambar 2.2 Dimensi Legitimasi**

Sumber : Suchman,1995

Adapun fungsi adanya legitimasi yang disebutkan Suchman ialah sebagai berikut:

1. Membentuk kontinuitas dan kredibilitas

Legitimasi dapat meningkatkan stabilitas dan komprehensibilitas pada aktivitas organisasi yang kemudian memicu adanya kontinuitas serta kredibilitas organisasi dalam pandangan masyarakat. Pada saat yang sama, legitimasi berdampak tidak hanya pada bagaimana orang-orang bersikap terhadap organisasi, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memahami organisasi tersebut. Dalam pengertian legitimasi, termasuk didalamnya ialah adanya kepercayaan dari anggota masyarakat, atau berupa pengujian rasional tentang apa yang

<sup>50</sup> Suchman, *op.cit*, hlm.582

<sup>51</sup> Deephouse, David L. & Mark. Suchman, *loc.cit*.

dilakukan organisasi dan alasan-alasannya. Kontinuitas dan kredibilitas merupakan dua unsur yang selalu saling memperkuat eksistensi sebuah organisasi.<sup>52</sup>

## 2. Memperoleh dukungan pasif ataupun dukungan aktif

Apabila ideologi yang dibawa organisasi dianggap rasional oleh masyarakat setempat, maka tahap selanjutnya akan terbentuk dukungan dari masyarakat, baik yang bersifat aktif maupun pasif.

Akhirnya, peneliti berkesimpulan bahwa legitimasi dapat dianalisis menggunakan empat aspek. Aspek pertama, ialah kesesuaian antara organisasi dan masyarakat dalam sistem norma, nilai, kepercayaan serta definisi-definisi yang berkembang di masyarakat. Aspek kedua, yaitu pada bagaimana persepsi atau asumsi masyarakat terhadap organisasi sebagai bentuk reaksinya. Hal ini merupakan bentuk penilaian masyarakat terhadap organisasi. Aspek selanjutnya, yaitu pada pertukaran kepentingan (pragmatis) yang terjadi antara individu masyarakat dengan organisasi. Aspek terakhir, yaitu bagaimana dukungan masyarakat terhadap organisasi, baik dukungan aktif maupun pasif.

### 2.1.7 Teori *Westphalian World Order*

Teori ini digunakan untuk menganalisis sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini, yakni Demokrasi Pancasila. Teori *Westphalian* ini merupakan antitesis teori *Islamic World Order*. Teori *Westphalian* merupakan dasar pembentukan negara sekuler modern, dimana kekuasaan keagamaan terpisah secara total dari kekuasaan negara. *Westphalian* merupakan awal mula pemisahan hegemoni kekaisaran gereja romawi dari fungsi kenegaraan. Sejak saat itu, bangsa-bangsa di Eropa membentuk negara sendiri berdasarkan akar kebangsaan masing-masing, yang kemudian melahirkan Konsep Negara Bangsa (*nation state*) dan nasionalisme. Teori ini didasarkan pada teori Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa "*people delivered their rights to*

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.575

*a sovereign power in return for the sovereign's provision of security for all within the state's borders. The sovereign state's monopoly on power was established as the only way to overcome the perpetual fear of violent death and war.*"<sup>53</sup> Teori ini kemudian melahirkan konsep batas-batas wilayah kenegaraan untuk melindungi hak-hak warga negara yang ada didalamnya.

Selain itu, ditentukannya batas-batas wilayah negara juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tatanan dunia (*balance of power*), seiring dengan berdirinya negara-negara baru. Dengan ditentukannya batas-batas kewilayahan suatu negara, maka timbul timbal-balik hak dan kewajiban antara Negara dan rakyatnya. Segala konsekuensi yang timbul dari ikatan kesepakatan antara negara dan warganya. Sebagai contoh, misalnya negara wajib membuatkan identitas penduduknya, sebagai pengakuan negara atas rakyatnya dan kesepatan rakyat sebagai warga negara; warga negara wajib mengikuti segala aturan hukum yang diberlakukan oleh negara tanpa terkecuali; segala hubungan dengan dunia (negara) luar harus dilakukan melalui mekanisme kenegaraan.

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia pun mengadopsi sistem negara Westphalian ini. Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan berdaulat. Sebagai negara berdaulat, negara bebas untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi negara lain. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam undang-undang negara yang jelas berdasarkan dasar-dasar negara yang disepakati.

### **2.1.8 Teori *Islamic World Order***

Teori *Islamic world order* dibangun berdasarkan sejarah lahirnya peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekkah dan Madinah. Disana, Nabi Muhammad dan para pengikutnya membangun kekuatan, didorong visi untuk membangun tatanan dunia baru. Nabi Muhammad dan komunitasnya mengorganisasi

---

<sup>53</sup> Kissinger, Henry, *World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History*, (New York : Penguin Press, 2014), hlm. 25.

suatu pemerintahan, menyatukan Semenanjung Arab, dan berdakwah untuk menggantikan agama-agama yang berlaku di wilayah itu (terutama Yudaisme, Kristen, dan Zoroastrianisme) dengan agama dalam visinya (Islam).<sup>54</sup> Visi yang dibawa Muhammad berhasil mempengaruhi separuh dunia, hingga Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia. Bermula dari semenanjung arab, para pengikut Muhammad mampu menyebarkan Islam hingga ke dataran Eropa, Rusia, China, India dan Asia Tenggara. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan diplomasi perdagangan dan penaklukan wilayah. Kekuatan muslim yang relatif kecil, ketika itu, mampu mengalahkan dua kekaisaran besar dunia yang sedang berkuasa, yaitu kekaisaran Persia dan Romawi.

Kemajuan Islam yang begitu cepat di tiga benua membuktikan kepada umatnya tentang misi ilahi-nya. Terdorong oleh keyakinan bahwa penyebaran Islam akan mempersatukan dan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia, Islam menjadi satu-satunya agama, superstate multietnis, dan tatanan dunia baru.<sup>55</sup> Wilayah kekuasaan Islam dibangun berdasarkan sistem kekhilafahan yang melahirkan dua konsepsi kewilayahan, yaitu *Dar al-Islam* (wilayah Islam) dan *Dar al-Harb* (wilayah perang) dengan segala ketentuannya. Konsepsi ini kemudian melahirkan konsep perjuangan yang disebut Jihad. Puncak kejayaan Islam, sebagai Negara transnasional, berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Ottoman tahun 1920-an. Sejak saat itu, dunia Islam berada dalam kondisi konfrontasi yang tidak terhindarkan dengan dunia luar.<sup>56</sup> Penjajahan masuk ke dunia islam dan menguasai tatanan pemerintahannya.

Berdasarkan teori ini, pasca keruntuhan Ottoman, umat Islam seolah kembali pada fase awal peradaban Islam. Yaitu peradaban ketika Muhammad mulai mengajarkan Islam di Mekkah. Dalam sistem Islam awal, perjanjian non-agresi dengan masyarakat non-Muslim (negara

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.66

sekuler) diperbolehkan.<sup>57</sup> Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara (*dar al-harb*), misalnya: patuh pada undang-undang *civil law* atau *anglo saxon*, membayar pajak, dan lain-lain. Masa-masa ini dimanfaatkan oleh umat Islam untuk kembali menggalang kekuatan untuk menegakan kembali misi kejayaan Islam. Perjanjian yang mereka sepakati bersifat temporal, artinya apabila kekuatan umat Islam sudah kembali kuat, mereka boleh untuk membatalkan perjanjian dan merebut kembali kekuasaan. Karena menurut mereka, Tatanan kedamaian dunia bergantung pada kemampuan untuk menempa dan memperluas entitas kesatuan Islam,<sup>58</sup> bukan pada keseimbangan muslim dan non-muslim.

Menurut Kissinger, tidak ada masyarakat tunggal yang pernah memiliki kekuatan, tidak ada pemimpin yang bertahan, dan tidak ada dinamisme keimanan yang dapat memaksakan doktrinnya secara terus-menerus di seluruh dunia. Universalitas telah terbukti sulit dipahami oleh penakluk manapun, termasuk Islam.<sup>59</sup> Selanjutnya Kissinger menggambarkan bagaimana Islam menjadi terpecah belah menjadi beberapa aliran setelah wafatnya Muhammad. Yang terjadi sampai hari ini, misalnya, bagaimana perdebatan politis teologis antara Sunni dan Syiah yang terus berlanjut. Perbedaan doktrinal ini semakin diperparah dengan pengaruh geopolitik yang terjadi. Beberapa kasus, misalnya: bagaimana konflik Irak dan Iran, atau konflik yang sekarang terjadi di Syria.

Gagasan universalitas Islam kembali bangkit dengan berdirinya Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. IM hadir untuk menjawab sekularisasi yang terjadi di dunia Islam, Arab khususnya. IM kemudian melahirkan sempalan organisasi yang lebih ekstrem yaitu Hizbut Tahrir dibawah pimpinan Taqiyuddin An-Nabhani. IM berdiri independen untuk mengkritik sistem pemerintahan sekuler yang mendominasi sebagian negara muslim.

---

<sup>57</sup> *Ibid*,

<sup>58</sup> *Ibid*,

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.67

Konsep khas IM yang dikenal hingga saat ini ialah gerakan Tarbiyah. Gerakan tarbiyah merevitalisasi fungsi masjid dan lembaga pendidikan sebagai wadah pembinaan umat Islam. Gagasan IM mampu menyebar dengan cepat keseluruh dunia muslim, termasuk ke Indonesia. Gagasan universalitas untuk membangun tatanan baru dunia Islam beberapa kali gagal dilakukan. Masalah utamanya adalah karena mereka sudah terikat dengan sistem negara bentukan barat yang ditentukan dengan batas-batas teritorial.

Akibatnya, para elit ini terpaksa harus berjuang beriringan dengan meningkatnya arus ketidakpuasan domestik yang menimbulkan ancaman bagi legitimasi mereka. Kelompok radikal berjanji untuk menggantikan sistem di Timur Tengah yang sudah ada dengan tatanan Timur Tengah yang berdasarkan agama.<sup>60</sup> Gerakan ini tercerminkan pada dua pendekatan universalitas berbeda untuk membangun tatanan dunia: versi Sunni, misalnya, ada Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada 1928, Hamas di Gaza pada 2007, dan gerakan teroris global al-Qaeda, serta ISIS tahun 2004; sedangkan versi Syiah, melalui revolusi Khomeini dan cabangnya yaitu Hizbullah di Lebanon. Dalam konflik kekerasan satu sama lain, mereka bersatu dalam komitmen mereka untuk membongkar tatanan regional yang ada dan membangunnya kembali sebagai sebuah sistem ilahi,<sup>61</sup> yakni Khilafah.

### 2.1.9 Konsep Khilafah

Dalam kajian politik Islam ada tiga kata yang bermakna sama dalam merujuk pengertian pemerintahan dalam Islam, yaitu: *Khilafah*, *Imamah* dan *Amirul Mukminin*. Rasyid Ridha mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan berdasarkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh untuk kemaslahatan agama dan dunia.<sup>62</sup> Penerapan Hukum Islam ini wajib dilaksanakan secara menyeluruh, total, dan sekaligus,

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.73

<sup>61</sup> *Ibid*,

<sup>62</sup> Rasyid Ridha, Muhammad, *Al-Khilafah*, (al-Maktabah al-Syamilah, 1935), *e-book*

bukan dengan cara bertahap. Karena itu penerapan dengan cara bertahap bertentangan dengan hukum-hukum Islam itu sendiri.<sup>63</sup> Sa'id at-Taftazani mendefinisikan *Imamah* sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi SAW.<sup>64</sup> Begitupun Al-Mawardi yang mendefinisikan *Imamah* sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Nabi dalam menjaga agama dan kehidupan politik dunia.<sup>65</sup>

Sebagian besar ulama *aqa'id* dan *fuqaha* dari madzhab-madzhab sunni tidak memberikan pendefinisian tentang khilafah, kecuali Imam ar-Razi, beliau yang menambahkan beberapa kaidah dalam definisinya. Menurut ar-Razi, Khilafah ialah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia kepada setiap individu dari komunitasnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menegakan khilafah adalah wajib bagi setiap muslim secara syariat.<sup>66</sup>

Abdul Qadim Zallun, dalam bukunya yang menyempurnakan buku Taqiyudin an-Nabhani<sup>67</sup>, menyatakan bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Menurutnya, mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan hukum pelaksanaannya sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah swt bagi seluruh kaum muslimin. Khilafah adalah suatu keharusan, sehingga tidak ada lagi pilihan dan santai dalam rangka menegakannya. Mengabaikan pelaksanaannya

---

<sup>63</sup> Zallun, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*, (Al-Izzah: Jawa Timur, 2002), hlm.298

<sup>64</sup> At-Taftazani, Said. dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafah*. (al-Maktabah al-Syamilah, 1935) *e-book*

<sup>65</sup> Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (al-Maktabah al-Syamilah, 450 H), *e-book*

<sup>66</sup> Ar-Razi. dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafah*. (al-Maktabah al-Syamilah, 1935), *e-book*

<sup>67</sup> Pendiri Hizbut Tahrir

merupakan kemaksiatan yang paling besar. Allah Swt akan mengadzab dengan adzab yang sangat pedih.<sup>68</sup>

Mengenai konsep kenegaraan, sebagaimana dinyatakan Mundayat:

“Khilafahisme meyakini bahwa konsep negara itu adalah bentukan barat, oleh karena itu harus ditiadakan dengan mendirikan Khilafah Islamiyah. Kewarganegaraan, dengan demikian, bukanlah hal yang penting bagi khilafahisme karena yang ingin mereka bangun adalah persaudaraan Islam dalam sistem khilafah.”<sup>69</sup>

Sistem pemerintahan Islam berdasarkan khilafah merupakan sistem pemerintahan dengan kedaulatan berada ditangan syariat, bukan ditangan rakyat. Sehingga hal ini bertolak-belakang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi berprinsip bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara tuhan). Rakyat menentukan kemana arah kebijakan dan aturan perundang-undangan dalam suatu negara. sedangkan dalam sistem khilafah, semua kebijakan dan aturan perundang-undangan didasarkan pada aturan syari’at, yakni al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber primer.

Sistem pemilihan dan pergantian kepemimpinan dalam khilafah didasarkan pada kriteria dan indikator-indikator yang ditetapkan dalam syariat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, penentuan kepemimpinan ditetapkan berdasarkan suara mayoritas rakyat dalam pemilu, sehingga pada hakikatnya rakyat yang menentukan kepemimpinan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dalam dakwah-dakwah ormas khilafah, seperti HTI, selalu mengkritik sistem demokrasi dalam pemerintahan indonesia. hal ini karena memang kedua sistem ini bertolak belakang secara prinsip.

Lebih lanjut, Zallun menyampaikan bahwa sistem khilafah terdiri atas empat pilar sebagai berikut :

1. Kedaulatan di tangan syariat. Yang dimaksud syariat adalah seluruh hukum-hukum Allah yang tertuang dalam al Qur’an dan al

<sup>68</sup> Zallum, Abdul Qodim, *Op.Cit.*, hlm.32.

<sup>69</sup> Mundayat, Aris Arif, *Khilafahisme : Mendayung Diantara “kepanikan Moral” dan Kekosongan Ideologi*”. Makalah disampaikan pada salah satu seminar di Universitas Pertahanan Bogor, 2017.

Hadits. Berbeda dengan sistem demokrasi yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Seorang khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya agar ia melaksanakan Kitabullah dan Sunnah tersebut, bukan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh manusia (umat) hingga apabila orang yang telah membaiat khilafah tersebut keluar dari ketentuan syara', maka khalifah akan memerangi mereka sampai mereka kembali lagi.<sup>70</sup>

2. Kekuasaan di Tangan Umat. Hal ini berkaitan dengan pengangkatan khalifah yang dilakukan oleh umat melalui *bai'at*-nya (sumpah setia). Dengan demikian, kekuasaan khalifah berada pada tangan umat. Atas dasar ini, maka umat taat kepada khalifah. Bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin.<sup>71</sup>
3. Mengangkat khalifah hukumnya fardhu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang menyatakan tentang kewajiban adanya bai'at diatas pundak setiap muslim baik secara langsung maupun tidak.
4. Hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Adapun struktur kekhalifahan terdiri dari delapan struktur, meliputi: (1) Khalifah (kepala Negara); (2) Mu'awin Tafwidh (pembantu khalifah bidang pemerintahan); (3) Mu'awin Tanfidz (Pembantu khalifah bidang administrasi); (4) Amirul Jihad (panglima perang); (5) Wali (pemimpin daerah tingkat I); (6) Qadhi (hakim); (7) Mashalih Daulah (Departemen Negara); dan (8) Majelis Umat ( lembaga wakil rakyat).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Zalum. Abdul Qodim, *Op.Cit*, hlm.41

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.42

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.47

Selanjutnya Zallun menegaskan bahwa kepemimpinan islam adalah kepemimpinan tunggal, bukan kolektif.<sup>73</sup> Kepemimpinan tunggal khalifah berlaku untuk seluruh dunia dan bersifat multietnis. Batas-batas kenegaraan dalam khilafah diwujudkan dalam dua konsep wilayah, yaitu wilayah islam (*darul Islam*) dan wilayah perang (*darul harb*). Praktek membentuk kepemimpinan kolektif yang mentradisi di negeri kaum muslimin, atas nama majelis, komite, lembaga eksekutif atau sejenisnya, yang memiliki wewenang kepemimpinan, maka semuanya jelas bertentangan dengan hukum syara'. Karena hal itu memberikan kepemimpinan tersebut kepada sekelompok orang. Hal itu jelas haram berdasarkan hadits-hadits Nabi.<sup>74</sup> Terkecuali apabila majelis tersebut diberikan tugas untuk bermusyawarah memberikan kritik dan masukan kepada khalifah.

Adapun terkait ketaatan, taat kepada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun dia dzalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap fardhu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin.<sup>75</sup> Namun, ketaatan dalam hal ini bukan berarti melakukan pembiaran terhadap kedzaliman yang dilakukan. Umat Islam tetap wajib melakukan kritik dan koreksi terhadap penguasa tersebut. apabila seorang penguasa telah nampak jelas melakukan kekufuran (keluar dari syariat Islam), maka umat Islam wajib memeranginya. Mendirikan partai politik dalam sistem khilafah hukumnya *fardhu kifayah* (representatif). Fungsi partai politik dalam hal ini ialah sebagai lembaga *amar maruf nahi munkar*, mengoreksi kebijakan penguasa yang dianggap menyimpang dari syariat, bukan sebagai musuh politik.

Dengan demikian, untuk menganalisis khilafah dapat dilakukan dengan memperhatikan empat konsep pemahaman, yaitu: (1) Khilafah

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.147

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.150.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.309

dipahami sebagai bagian dari kewajiban yang tidak boleh ditawar; (2) empat pilar yang diperlukan untuk menegakan khilafah; (3) adanya kepemimpinan tunggal yang bersifat global; dan (4) mengenal dua konsep wilayah, yakni wilayah islam (*darul Islam*) dan wilayah perang (*darul harb*).

### 2.1.10 Teori Gerakan Sosial

Sebagai alat untuk menganalisis gerakan khilafah, penulis juga menggunakan konsep gerakan sosial. John McCarty dan Mayer Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai seperangkat pendapat dan keyakinan di dalam kelompok yang mempresentasikan tuntutan perubahan yang bernilai sosial di beberapa elemen dalam struktur sosial.<sup>76</sup> Adapun Sidney Tarrow merumuskan gerakan sosial adalah aksi penentangan kolektif yang memiliki tujuan dalam konteks interaksi yang berkelanjutan terhadap kelompok elit, penguasa dan lawan.<sup>77</sup> Kata kunci dalam definisi terakhir ini ialah adanya penentangan yang berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk politik penentangan (*contentious politics*) yang lahir dari ketidak-puasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Gerakan sosial bersifat non-birokratis, bergerak untuk kepentingan yang luas untuk memberikan suatu perspektif perubahan secara makro yaitu sejauh itu menyangkut kepentingan masyarakat sipil yang tertindas.<sup>78</sup>

Untuk membedakan gerakan sosial dengan gerakan penentangan lain, Sidney Tarrow menuliskan beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Tantangan kolektif. hal ini merupakan modal dasar gerakan sosial. Aksi-aksi tantangan kolektif dilakukan dengan symbol-simbol berupa slogan, model pakaian, musik, atau melakukan penamaan atau pemberian istilah terhadap objek-objek tertentu. Hal ini mereka

<sup>76</sup> Asghar, Ali, *Men-teroris-kan Tuhan : Gerakan Sosial Baru*, (Jakarta : Pensil-324, 2014) hlm. 41

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.41-42

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 43

lakukan untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan atau pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan.<sup>79</sup>

- b. Tujuan Bersama. Tujuan bersama merupakan artikulasi dari nilai-nilai dan kepentingan bersama dalam gerakan sosial sebagai basis aksi mereka.<sup>80</sup> Hal ini lahir dari pertimbangan-pertimbangan rasional.
- c. Solidaritas dan Identitas Kolektif. Gerakan sosial berakar dari solidaritas dan identitas kolektif. Hal ini biasanya digali dari identitas nasional, etnisitas, atau agama. Mereka membentuk identitas kolektif untuk mengkonstruksikan diri yang membedakan dengan kelompok lawan dan musuh dengan wacana-wacana anti ketidak-adilan, tuntutan perubahan dan sebagainya.<sup>81</sup>
- d. Memelihara politik penentangan. Hal ini akan dapat merubah dari potensi individual menjadi aksi solidaritas bersama untuk melakukan gerakan sosial.

Dalam sebuah gerakan sosial, aktor organisasi berperan penting dalam membentuk wacana yang memungkinkan seseorang untuk dapat bergabung dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, beberapa peneliti gerakan sosial seperti McAdam, McCarthy dan Mayer N.Zaid melakukan pendekatan integratif terhadap teori gerakan sosial. Pendekatan integrative adalah upaya menggabungkan tiga faktor dalam menganalisis tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Tiga faktor tersebut dalam pemahamana konvensional lebih dikenal dengan istilah kesempatan politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilization structures*), dan proses pbingkaiian (*framing processes*).<sup>82</sup> pendekatan integratif akan dapat memahami kenapa seseorang bersedia ikut bergabung dalam gerakan sosial.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm.44

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.45

<sup>81</sup> *Ibid*,

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.59-60

Kesempatan Politik (*political opportunities*) merupakan konsep untuk menjelaskan bahwa kemunculan gerakan sosial sering kali dipicu oleh faktor perubahan besar dalam struktur politik. Perubahan struktur politik membuka kesempatan politik terhadap aktor-aktor gerakan untuk memprakarsai politik penentangan.<sup>83</sup> Untuk kasus di Indonesia, kesempatan politik itu muncul ketika terjadinya reformasi 1998. Reformasi 1998 merupakan simbol berakhirnya kekuasaan tertutup yang otoriter menuju politik terbuka yang demokratis. Pasca reformasi, organisasi-organisasi sosial bermunculan sebagai penanda lahirnya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pikiran.

Struktur mobilisasi (*mobilization structures*) merupakan alat untuk memahami aksi kolektif yang di dalamnya melibatkan organisasi, jaringan dan bagaimana mereka merancang taktik dan strategi yang dapat bergaung di antara partisipan. Tiga infrastruktur pendukung struktur mobilisasi, antara lain: basis keanggotaan, jejaring komunikasi dan tokoh gerakan.<sup>84</sup> Struktur mobilisasi dalam gerakan keislaman menggunakan paralelitas ideologi, seperti ideologi Khilafah, Salafi Wahabi, dan lain-lain. konsep ini kemudian melahirkan konsep yang disebut komunitas bayangan (*Imagined community*) oleh Asef Bayat, atau konsep solidaritas bayangan (*Imagined solidarity*) oleh Benedict Anderson.

Pembingkaiian (*framing*) dalam teori gerakan sosial, sebagaimana dinyatakan David Snow dan Robert Benford, merupakan skema penafsiran dimana aktor gerakan sosial menciptakan dan menyampaikan wacana yang dapat digelar dan bergema diantara mereka yang menjadi target mobilisasi. Menurutnya, pembingkaiian dalam gerakan sosial berfungsi untuk (1) diagnostik, yakni mengidentifikasi masalah dan aktor penanggung-jawabnya (sumber masalah); (2) prognostik, yaitu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam bentuk strategi, taktik, dan target; (3) memberikan alasan-alasan (dalil) untuk

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.161

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.67-68

melahirkan dukungan guna melakukan tindakan kolektif.<sup>85</sup> Dalam kasus gerakan khilafah, framing ini dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai alasan pembenaran.

## 2.2 HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Laporan hasil-hasil penelitian atau kajian terdahulu dapat berupa disertasi, tesis, jurnal atau karya-karya tulis ilmiah lainnya.<sup>86</sup> Berdasarkan penelusuran berbagai sumber, peneliti cukup kesulitan untuk menemukan penelitian yang memiliki objek yang sama. Meskipun begitu, peneliti mencoba memilih beberapa penelitian yang menurut pandangan etik cukup mendekati dengan objek penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan mengenai gambaran umum penelitian terdahulu yang dipilih.

Penelitian pertama yang cukup relevan ialah penelitian yang dilakukan Sidratahta Muhtar tahun 2016. Penelitiannya berjudul : "Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi". Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis secara komprehensif bagaimana strategi pemerintah menghadapi terorisme pasca orde baru. Sidratahta memandang bahwa pendekatan strategi *hard power* tidaklah efektif untuk menangani masalah terorisme dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan *soft power* kemudian dipilih oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan upaya deradikalisasi. Aspek lain yang juga penting ialah bagaimana penanggulangan terorisme ini dibangun melalui kemitraan dengan berbagai pihak termasuk melalui pemberdayaan masyarakat.<sup>87</sup>

Penelitian pada aspek strategi juga dilakukan oleh Gondo Utomo tahun 2016 dengan judul : "Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama". Secara kualitatif, Gondo Utomo mencoba

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.65

<sup>86</sup> Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas pertahanan, hlm.87

<sup>87</sup> Mukhtar, Sidratahta, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi: *Jurnal Reformasi E-ISSN 2407-6864 Vol. 6, No. 2, 2016* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2016) hlm.150-152

menawarkan analisis bagaimana penyusunan rencana strategi komunikasi yang tepat dalam kampanye informasi melawan radikalisme agama. Penelitian ini menggunakan perspektif ilmu komunikasi dalam melawan propaganda radikalisme. Gondo berkesimpulan bahwa perencanaan strategi komunikasi meliputi dimensi penentuan visi dan misi yang ingin dicapai, melakukan analisis situasi, menentukan target audiens, memilih sasaran komunikasi, membangun kerangka isu dan pesan, memilih strategi dan perangkat penyampai pesan, serta melakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan kampanye informasi melawan radikalisme agama.<sup>88</sup>

Selanjutnya, Muh.Khamdan pada tahun 2016 melakukan penelitian berjudul: “Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional”. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Kemenkumham dalam menangani radikalisme di Indonesia. Dalam pembahasannya, Khamdan terlebih dahulu membahas perkembangan gerakan radikal transnasional di Indonesia. Khamdan berkesimpulan bahwa Tiga pilar utama yang mendukung keberhasilan identifikasi potensi radikalisme gerakan transnasional adalah dengan menggabungkan antara pendekatan agama dengan pendekatan kebangsaan melalui kerjasama lintas sektoral. Hubungan kerjasama tersebut mesti didukung dengan pemanfaatan kekuatan struktural, dan otoritas keislaman.<sup>89</sup>

Penelitian terdahulu yang mencoba membahas khilafah di Indonesia ialah penelitian yang dilakukan Baidhowi tahun 2016 dengan judul: “Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila”. Baidhowi mencoba menganalisis eksistensi dan relevansi ideologi khilafah dengan perspektif filosofis, normative, dan historis bangsa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Khilafah, dalam arti negara Islam, kurang

---

<sup>88</sup> Utomo, Gondo, Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama : *Jurnal Komunikasi Islam ISSN 2088-6314 Volume 06, Nomor 01, Juni 2016*, (Surbaya : UIN Sunan Ampel, 2016), hlm.123-124

<sup>89</sup> Khamdan, Muh., Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional: *Jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016*, (Jakarta : Kemenkumham, 2016), hlm.228

relevan berdiri dan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika memaksakan khilafah dalam negara Pancasila, maka dapat dipahami sebagai keinginan untuk membubarkan Indonesia.<sup>90</sup>

Penelitian yang juga mencoba menganalisis gerakan khilafah di Indonesia dilakukan oleh Muhammad Sabri, dkk. Pada tahun 2016. Penelitian berjudul: “Gejala Fundamentalisme Agama di Indonesia: Membaca Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial” mencoba menganalisis HTI sebagai organisasi khilafah dari sudut pandang teori gerakan sosial. HTI dipandang memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan kelompok radikal-fundamentalis Islam yang lain, terutama dalam melihat relasi agama dan negara, termasuk sikap politik dalam menyuarakan dan melakukan aksi protes dan demonstrasi, HTI memilih paradigma integralistik, dan karena itu mengandalkan cara-cara damai, santun, dan anti kekerasan. Dengan dasar inilah, HTI mampu mendapat simpati dari publik di tanah air.<sup>91</sup>

Penelitian yang memiliki objek pada Khilafatul Muslimin ialah penelitian Ilham Mundzir pada tahun 2013, dengan judul penelitian “Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung” yang difokuskan di wilayah pusat KM di Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon KM terhadap perkembangan modernitas muncul dengan seruan untuk kembali kepada ajaran-ajaran agama yang murni. KM tetap mengusung misi besar untuk menegakkan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islami. Selain itu, mereka memahami kitab suci secara apa adanya dan mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan cetak biru dari kitab suci. Ilham Mundzir juga mendapat temuan bahwa

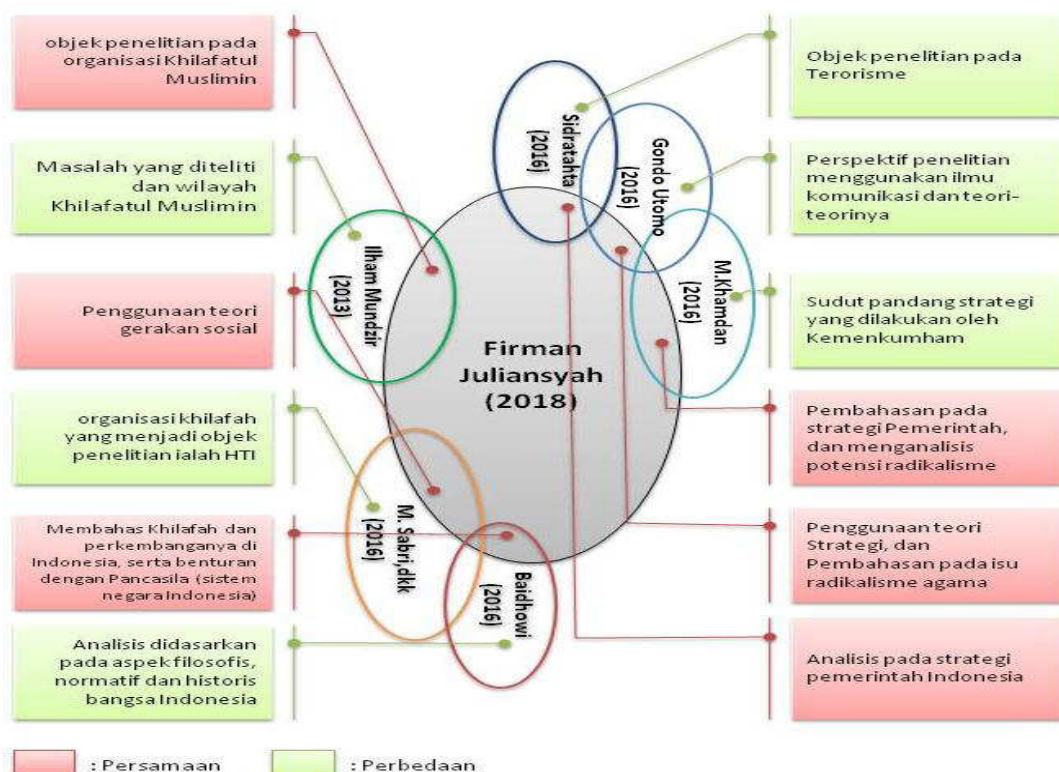
---

<sup>90</sup> Baidhowi, Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila : *Jurnal Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 497-516, ( Semarang : UNNES, 2016), hlm.515

<sup>91</sup> Sabri, Muhammad, dkk. Gejala Fundamentalisme Agama Di Indonesia: Membaca Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial: *Jurnal dalam International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) December 19-20, 2016*, (Makassar : 2016), hlm.7

peran perempuan cenderung dipinggirkan dari kehidupan publik, sehingga tidak memperoleh hak-haknya secara setara.<sup>92</sup>

Adapun keterbaruan penelitian ini ialah cara pandang penelitian dengan menggunakan pendekatan strategi pertahanan dan kajian peperangan asimetris. Ide penelitian ini juga muncul ketika pemerintah melakukan cara-cara represif untuk membubarkan gerakan khilafah HTI pada Juli 2017 lalu. Peneliti memandang bahwa sampai saat ini belum ditemukan kajian ataupun penelitian mengenai perkembangan ideologi Khilafah pasca dibubarkannya HTI. Selain itu, penelitian mengenai gerakan KM juga tidak banyak ditemukan. HTI dan KM memiliki banyak kemiripan terutama dalam hal ideologi yang diusung, yakni Khilafah. Berikut disajikan irisan perbandingan dengan penelitian terdahulu serta tabel struktur penelitian terdahulu:



**Gambar 2.3 Irisan Perbandingan Penelitian**

Sumber : dokumentasi pribadi (diolah)

<sup>92</sup> Mundzir, Ilham, Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung, *Jurnal ilmu-ilmu keislaman Afkaruna DOI 10.18196/AIJIS.2013.0020. 65-82*, (Jakarta: Universitas Pof. Dr. HAMKA, 2013) hlm.79-80.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode/ Teori	Permasalahan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sidratahta Mukhtar (2016)	<i>Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi</i>	Kualitatif/ Teori terorisme, teori partisipasi non konvensional (politik)	Bagaimana kebijakan negara dalam menghadapi kebangkitan terorisme di Indonesia pasca Era Orde Baru?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan penanggulangan teror dengan cara keras (<i>hard power</i>) tidak menyelesaikan ancaman teror dalam jangka panjang.</li> <li>- pendekatan penanggulangan terorisme yang kemudian dilakukan bersifat <i>soft power</i>. Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan langkah deradikalisasi terhadap pelaku terorisme dan keluarganya, pesantren-pesantren.</li> <li>- Kemitraan merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan. Pola kemitraan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk turut serta dalam</li> </ul>	Analisis pada strategi pemerintah Indonesia	Objek penelitian pada Terorisme

					<p>penanggulangan terorisme, terutama pada strategi pencegahan kepada kalangan masyarakat yang sudah terpengaruh atau mengalami radikalisasi.</p> <p>- Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Masyarakat dapat dilatih dan diberdayakan potensinya untuk membantu negara/ pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan terlibat aktif menyukseskan penanggulangan terorisme.</p>		
2	Gondo Utomo (2016)	<i>Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama</i>	Kualitatif/ teori strategi, teori kampanye informasi	Menganalisis bagaimana penyusunan rencana strategi komunikasi yang tepat dalam kampanye informasi melawan radikalisme agama.	- Kampanye informasi melawan radikalisme agama pada dasarnya adalah proses penyebaran informasi untuk meng-counter radikalisme agama dengan melewati berbagai tahapan perencanaan. Strategi	Penggunaan teori Strategi, dan Pembahasan pada isu radikalisme agama	- Perspektif penelitian menggunakan ilmu komunikasi dan teori-teorinya

					<p>perencanaan komunikasi melawan radikalisme agama memiliki keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaksananya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan strategi komunikasi meliputi dimensi penentuan visi dan misi yang ingin dicapai, melakukan analisis situasi, menentukan target audiens, memilih sasaran komunikasi, membangun kerangka isu dan pesan, memilih strategi dan perangkat penyampai pesan, serta melakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan kampanye informasi melawan radikalisme agama.</li> </ul>		
3	Muh. Khamdan (2016)	<i>Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi</i>	Kualitatif/ teori konflik, dan teori identitas sosial	Faktor apa yang menyebabkan lahirnya radikalisme di Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tekstual terhadap ajaran agama merupakan titik awal lahirnya radikalisme.</li> <li>- Tiga pilar utama yang</li> </ul>	Pembahasan pada strategi Pemerintah, dan menganalisis	Sudut pandang strategi yang dilakukan oleh

		<i>Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional</i>		Bagaimana strategi yang telah dilakukan pemerintah (Kemenkumham)?	mendukung keberhasilan identifikasi potensi radikalisme gerakan transnasional adalah dengan menggabungkan antara pendekatan agama dengan pendekatan kebangsaan melalui kerjasama lintas sektoral. Hubungan kerjasama mesti didukung dengan pemanfaatan kekuatan struktural, dan otoritas keislaman	potensi radikalisme	Kemenkumham
4	Baidhowi (2016)	<i>Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila</i>	Kualitatif/ Konsep pancasila, konsep khilafah	Bagaimana eksistensi khilafah dalam konteks negara pancasila?	Secara filosofis, normatif dan historis bangsa Indonesia, pendirian Khilafah dalam arti negara Islam kurang relevan berdiri dan menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika memaksakan khilafah dalam negara Pancasila, maka dapat dipahami ingin membubarkan Indonesia.	Membahas Khilafah dan perkembangan anyanya di Indonesia, serta benturan dengan Pancasila (sistem negara Indonesia)	Analisis didasarkan pada aspek filosofis, normatif dan historis bangsa Indonesia

5	M.Sabri dkk. (2016)	<i>Gejala Fundamentalisme Agama di Indonesia: Membaca Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial</i>	Kualitatif/ teori Gerakan Sosial	menganalisis HTI sebagai gerakan sosial ( <i>social movement</i> )	HTI sebagai sebuah institusi pergerakan Islam fundamentalis dan transnasional, memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan kelompok radikal-fundamentalis Islam yang lain. Terutama dalam melihat relasi agama dan negara, berikut sikap politik dalam menyuarakan dan melakukan aksi protes dan demonstrasi, HTI memilih paradigma —integralistik, dan karena itu mengandalkan cara-cara damai, santun, dan anti kekerasan. Dengan karakteristiknya itu, dapat dipahami mengapa HTI sebagai gerakan sosial, kendati secara tegas bercita-cita mendirikan negara transnasional <i>khilafah</i> , tetap mendapat simpati publik di tanah air.	Penggunaan teori gerakan sosial	organisasi khilafah yang menjadi objek penelitian ialah HTI
---	---------------------	--	-------------------------------------	--	--	---------------------------------	---

6	Ilham Mundzir (2013)	<i>Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung</i>	Kualitatif / teori modernitas. Teori fundamentalisme.	Menganalisis bagaimana khilafatul muslimin merespon modernisasi dalam mewujudkan cita-citanya mendirikan kekhilafahan islam di dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon khilafatul muslimin terhadap perkembangan modernitas muncul dengan seruan kembali kepada ajaran-ajaran agama yang murni.</li> <li>- Tetap mengusung misi besar untuk menegakkan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan Islami</li> <li>- memahami kitab suci secara apa adanya dan mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan cetak biru darinya</li> <li>- posisi Perempuan dipinggirkan dari kehidupan publik, sehingga tidak memperoleh hak-haknya secara setara</li> </ul>	objek penelitian pada organisasi Khilafatul Muslimin	fokus & Masalah yang diteliti dan wilayah Khilafatul Muslimin
---	----------------------	---	---	--	---	--	---

Sumber : dokumentasi pribadi (diolah)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. DESAIN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Fenomenologi. Studi Fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu.<sup>1</sup> Menurut John W. Creswell, studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait konsep atau fenomena.<sup>2</sup> Menurut Hasbiansyah, fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.<sup>3</sup>

Selanjutnya, tipe fenomenologi yang dipilih ialah fenomenologi transendental, yakni penelitian yang berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari partisipan.<sup>4</sup> Salah satu ciri fenomeologi transendental ialah bagaimana peneliti berusaha meneliti suatu fenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomena tersebut. Peneliti berusaha memeriksa data dengan menyoroti pernyataan penting dari partisipan untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena

---

<sup>1</sup> Qudsy, Saifudin Zuhri, dalam John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, 2015, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. viii

<sup>2</sup> Creswell, John, W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, alih bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi, 2015, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 105

<sup>3</sup> Habiansyah, O., Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Jurnal MediaTor, Vol.9, No.1, Juni 2008, Terakreditasi Dirjen Dikti SK No.56/DIKTI/Kep/2005*, 2008, hlm.170

<sup>4</sup> Creswell, *Loc.Cit.*, hlm.110

tersebut.<sup>5</sup> Pengesampingan prasangka dilakukan peneliti untuk menghindari bias pribadi (subjektivitas) terhadap fenomena penelitian yang tergolong sensitif ini.

Permasalahan kemudian dalam studi fenomenologi ialah bagaimana menciptakan hasil penelitian yang objektif. Objektivitas dalam fenomenologi berarti membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri.<sup>6</sup> Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik *epoche* dan *eiditik*. Sebagaimana dijelaskan Hasbiansyah sebagai berikut:

Epoche adalah proses dimana si peneliti menanggukkan atau menunda penilaian terhadap fakta/fenomena yang diamatinya walaupun ia telah memiliki prakonsepsi atau penilaian tertentu sebelumnya terhadap fenomena itu. biarkanlah fenomena itu berbicara apa adanya, tanpa intervensi penilaian baik-buruk, positif-negatif, bermoral-tidak bermoral, dsb. dari si peneliti. Eiditik adalah memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang digunakan subjek. Dalam hal ini peneliti melakukan empati, mencoba memasuki wilayah pengalaman pemikiran subjek melalui prosedur imajinatif.<sup>7</sup>

## **3.2. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN**

### **3.1.1. Tempat Penelitian**

Peneliti memilih melakukan penelitian di dua lokasi Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi, yaitu di Pondok Pesantren Al-Amin kampung Cihuni Desa dan kecamatan Cikembar dan di kampung Cigarung Desa dan Kecamatan Kebon Pedes.

### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Mei 2018 sampai Februari 2019, mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan pengumpulan hasil penelitian. Adapun rincian waktu penelitian dibuat dalam bentuk jadwal penelitian sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Qudsy, *Loc.cit.*

<sup>6</sup> Hasbiansyah, *Op.Cit*, Hlm.171

<sup>7</sup> *Ibid*,

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

N O	KEGIATAN	TAHUN/ BULAN KE :												
		2018								2019				
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
1	Studi pendahuluan	■												
2	Penyusunan proposal	■	■	■										
3	Bimbingan tesis			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	sidang pra-proposal			■										
5	Sidang proposal				■									
6	Proses Penelitian					■	■	■	■					
7	Penyusunan hasil penelitian					■	■	■						
8	Sidang Pra-Tesis									■				
9	Sidang Tesis										■			
10	Revisi dan Pengumpulan Tesis											■	■	

Sumber : Dokumentasi Pribadi

### 3.3. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

#### 3.2.1 Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus, subjek dalam konsep penelitian merujuk pada narasumber/ informan, yang hendak diminati informasi atau digali datanya. Lebih lanjut, subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek informasi dikenal dengan istilah informan. Dalam penentuan subjek penelitian, tentunya peneliti menentukan terlebih-dahulu siapa saja informan yang diasumsikan dapat memberikan data-data penelitian.

<sup>8</sup> Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Penerbit Erlangga : Jakarta, 2009), hlm. 91.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan subjek penelitian yang dapat digali informasinya untuk melengkapi data-data yang diperlukan, diantaranya ialah: warga masyarakat di lingkungan pesantren al-Amin, yang tentunya mengetahui historis keberadaan dan perkembangan pondok pesantren tersebut. Selain itu, keterangan dari tokoh agama setempat juga sangat diperlukan, mengingat pondok pesantren al-Amin diindikasikan memiliki madzhab keagamaan yang berbeda dengan mayoritas penduduk lokal; Informasi dari aparat pemerintah setempat juga sangat diperlukan untuk mengetahui legalitas pesantren sekaligus legitimasi pemerintah terhadap pesantren tersebut. Apabila memungkinkan, peneliti juga akan mencoba menggali informasi dari warga pesantren untuk mengetahui persepsi atas reaksi masyarakat terhadap mereka. Dengan demikian penentuan subjek penelitian dalam penelitian berjudul "*Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi*" ini diambil berdasarkan kategori sebagai berikut :

- 1) Adang Hidayat, Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi
- 2) Lan Maulana, Kepala Sub Unit Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi
- 3) Cep Rudi, Staff Informasi Masyarakat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sukabumi
- 4) Andi Herdiani, S.IP, PJS Kepala Desa Cikembar
- 5) Rahmat Sanjaya, A.Md, Sekretaris Desa Cikembar
- 6) Saepudin, S.Pd, Kepala Desa Kebon Pedes
- 7) Ustad Mukhliansyah, Pimpinan Khilafatul Muslimin di Cikembar
- 8) Ustad Abad Badri Tamam, Pimpinan Khilafatul Muslimin Kebon Pedes
- 9) Ustad Amin, tokoh Khilafatul Muslimin Kebon Pedes

10) Ahmad Rasyid, Santri/ anggota Ponpes Khilafatul Muslimin Cikembar

11) Apud, Ketua DKM Al-Ikhlas di Kampung Cihuni Cikembar

Pada perencanaan penelitian awal, peneliti bermaksud untuk juga melakukan wawancara di Instansi TNI dan Polri, namun karena beberapa hal, peneliti tidak berhasil mendapatkan kesempatan wawancara di instansi tersebut. Penentuan subjek penelitian tersebut ditentukan berdasarkan *purposive sampling*, yaitu teknik sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang spesifik berdasarkan kriteria-kriteria atau kategori-kategori informan yang dikehendaki peneliti sesuai dengan masalah, tujuan, dan desain penelitian yang ditetapkan.<sup>9</sup> Pengambilan sampel dengan cara *purposive* digunakan karena tipologi masyarakat di lokasi penelitian yang berupa pedesaan. Masyarakat pedesaan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga teknik *purposive sampling* dianggap paling tepat untuk dipilih.

Dengan pertimbangan banyaknya kategori subjek penelitian yang ditentukan, peneliti selanjutnya memilih menggunakan *sampling purposive heterogen (heterogeneity sampling/ maximum variation)*. Teknik ini digunakan untuk memfokuskan penelitian pada pencapaian variasi tema yang unik dan menarik yang bersumber dari aneka dokumen dan informasi yang diinginkan peneliti. Peneliti kemudian dapat mengidentifikasi pola hubungan yang terdapat dalam data dan membandingkan data yang bersumber dari variasi partisipan.<sup>10</sup> Sehingga diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pemahaman informan yang bervariasi tersebut mengenai objek yang diteliti

### 3.2.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable

<sup>9</sup> Bandur, Agustinus, *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2016), hlm.297.

<sup>10</sup> Patton (1990) dalam Bandur, *ibid*, hlm.298.

tenrtentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>11</sup> Objek dalam peneltian ini berupa persepsi dan perilaku masyarakat yang membentuk legitimasi terhadap gerakan khilafah; Narasi-narasi yang dibangun Khilafatul Muslimin untuk mendukung perkembangan gerakannya; serta respon dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gerakan khilafah KM saat ini.

### **3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya melalui *fieldwork*, yaitu suatu pekerjaan mencatat, mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan, dan menangkap semua fenomena, data dan informasi tentang kasus yang diselidiki.<sup>12</sup> Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Kelengkapan data juga diperdalam dengan dengan menggunakan teknik lain.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Peneliti juga menggunakan teknik observasi dan studi dokumen. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang kredibel.

#### **3.3.1. Wawancara**

Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi, tahapan selanjutnya ialah melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan yang diasumsikan memiliki banyak informasi yang diperlukan peneliti. Penggunaan *indepth interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pendekatan Metode Campuran*, edisi 4, (Bandung:Alfabeta,2009), hlm.38

<sup>12</sup> Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Peneleitian Sosial : Pemikiran Norman K.Denzim & Egon Guba, dan Penerapannya*, (Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta, 2001),hlm.99.

<sup>13</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2014), hal.157

<sup>14</sup> Hasbiansyah, *Op.Cit*.

masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Untuk memberi keleluasaan terhadap informan, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Selain itu, teknik ini juga mendukung peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai kebutuhan selama tetap tidak keluar dari konteks. Dengan teknik ini, peneliti hanya cukup menyediakan tema-tema umum yang hendak dialami dari informan sebagai batasan dalam proses wawancara.

### **3.3.2. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik observasi langsung terhadap subjek penelitian, atau disebut *direct observation*. Dalam *direct observation*, peneliti hanya mengamati/ melihat langsung perilaku/ fenomena tersebut tanpa terlibat langsung dalam kehidupan partisipan.<sup>16</sup> Teknik ini digunakan agar peneliti dapat memahami secara mendalam pola interaksi yang sedang terjadi di lapangan. Pola Interaksi inilah yang diharapkan dapat memberikan deskripsi kepada peneliti mengenai bagaimana legitimasi masyarakat terhadap keberadaan pesantren tersebut. Teknik ini juga dipilih untuk mengantisipasi apabila peneliti tidak memiliki akses langsung terhadap informan atau mungkin informan tidak bersedia memberikan informasinya.

### **3.3.3. Studi Dokumen**

Sebagai data pendahuluan, peneliti menemukan informasi melalui website [www.khilafatulmuslimin.com](http://www.khilafatulmuslimin.com) mengenai keberadaan pondok pesantren berideologi khilafah di kabupaten sukabumi. Dalam website tersebut, didapat informasi mengenai profil pimpinan pondok pesantren tersebut, yang telah disampaikan sebelumnya di Bab I. Memperoleh informasi dengan teknik seperti ini termasuk kedalam teknik analisis dokumen. Tentunya teknik ini diperkuat dengan dokumen-dokumen yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.108.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.105

### 3.5. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Salah satu persoalan utama dalam penelitian kualitatif ialah bagaimana mewujudkan penelitian yang kredibel, dapat dipercaya, diterapkan ditempat lain, dan/atau berlaku umum.<sup>17</sup> Pemeriksaan keabsahan data dikenal pula dengan istilah validitas data. Inilah yang menjadi pembeda sekaligus kelebihan dari penelitian kualitatif. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh.<sup>18</sup> Intinya, terdapat dua kata kunci untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas.

Lewis (2009) dan Shenton (2004) sebagaimana dikutip Agustinus Bandur, menyebutkan beberapa strategi untuk mencapai keabsahan data, yaitu Validitas Internal (kredibilitas), validitas eksternal (transferabilitas), reliabilitas (dependabilitas) dan konfirmabilitas (objektivitas).<sup>19</sup> Akan tetapi, melihat relevansi dengan desain penelitian ini, peneliti hanya mengambil tiga konsep yang diperlukan yaitu kredibilitas, meliputi metode triangulasi, *feedback*, *member check*, *tick and rich description*, pengajuan pertanyaan iteratif dan kualifikasi peneliti. Konsep selanjutnya yang dipakai yaitu reliabilitas dan konfirmabilitas. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

#### 3.4.1. Kredibilitas

Ada beberapa teknik turunan untuk mengukur kredibilitas dalam penelitian kualitatif, diantaranya ialah dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi terbagi empat, dua diantaranya dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. kedua triangulasi yang digunakan ialah triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Dalam triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti menggabungkan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari ketiga teknik ini, diharapkan mampu menghasilkan data yang kredibel berdasarkan analisa

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.281.

<sup>18</sup> Idrus, Muhammad, *op.cit*, hlm.145.

<sup>19</sup> Bandur,Agustinus, *op.cit*, hlm. 284

perbandingan data yang diperoleh. Adapun triangulasi sumber data, peneliti juga membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan sumber-sumber lain yang terkait, misalnya berupa dokumen pribadi maupun hasil temuan di lapangan.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teknik *feedback*, yaitu dengan mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut. Teknik *feedback* akan dilakukan kepada para dosen yang kompeten maupun rekan sejawat di kampus dan di luar kampus. *Feedback* sangat penting untuk mengurangi bias personal peneliti.<sup>20</sup>

*Member check* juga dipilih untuk dilakukan guna mendukung validitas data yang dihasilkan. Dalam konteks ini, peneliti mendapat masukan-masukan dari beberapa subjek penelitian yang dipilih sebagai informan kunci. Masukan mereka sangat signifikan untuk mengukur apakah analisis yang dibuat sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka alami.<sup>21</sup>

Kemudian, penulisan hasil penelitian ini diupayakan dapat berupa Deskripsi *thick* dan *rich* sebagai upaya meningkatkan validitas penelitian. Kedua istilah ini mengacu pada proses analisis data yang mendetail dan mendalam.<sup>22</sup> Dalam membuat deskripsi *thick* dan *rich*, peneliti berencana menggunakan jurnal harian kegiatan penelitian sebagai bahan utama.

Teknik lain yang direkomendasikan Agustinus Bandur dalam bukunya ialah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan *iterative*. Teknik ini dilakukan ketika peneliti melakukan wawancara, yaitu dengan mengkonfirmasi kembali apa yang disampaikan informan pada setiap akhir wawancara. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.285

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.287.

telah dipahami peneliti sama seperti yang dimaksudkan oleh informan penelitian.<sup>23</sup>

Agustinus Bandur juga menyebutkan bahwa Kualifikasi dan pengalaman peneliti juga merupakan faktor penting dalam menciptakan kredibilitas penelitian. Pemilihan rencana dan desain penelitian ini juga tentu mempertimbangan kualifikasi dan pengalaman peneliti dalam bidang dan tema terkait.

### **3.4.2. Reliabilitas**

Validitas penelitian akan melahirkan reliabilitas penelitian. Reliabilitas juga dikenal dengan istilah dependabilitas yang merupakan asesmen akan kualitas proses pengumpulan data, analisis data dan pengembangan teori berdasarkan data yang real di lapangan.<sup>24</sup> Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses dan hasil analisis data. Reliabilitas dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang, dan dalam situasi yang berbeda.<sup>25</sup>

### **3.4.3. Konfirmabilitas**

Konfirmabilitas penelitian kualitatif berkaitan dengan keyakinan bahwa hasil penelitian merupakan hasil analisis terhadap pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang diungkapkan para informan penelitian, bukan sekedar pikiran dan analisis subjektif peneliti.<sup>26</sup> Sehingga hasil penelitian ini dapat dikonfirmasi oleh peneliti selanjutnya. Miles dan Huberman menekankan bahwa kriteria kunci dari konfirmabilitas ialah sejauh mana peneliti dapat mengakui dan menjelaskan predisposisi yang diambil.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti menjelaskan alasan-alasan memilih desain penelitian serta ketrebatasannya.

## **3.6. TEKNIK ANALISIS DATA**

---

<sup>23</sup> *Ibid*,

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.289.

<sup>25</sup> Idrus Muhammad,, *op.cit*, hlm.145.

<sup>26</sup> Bandur,Agustinus, *op.cit*, hlm.289.

<sup>27</sup> *Ibid*,

Teknik atau model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) kondensasi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>28</sup> Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

### **3.5.1. Pengumpulan Data (*data collecting*)**

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan, sebagaimana telah disebutkan pada bagian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, Proses analisis data dapat pula dilakukan saat proses pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini, peran peneliti sebagai *human instrument* sangat penting dalam proses penggalan data dari subjek penelitian.

### **3.5.2. Kondensasi Data (*data condensation*)**

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.<sup>29</sup>

### **3.5.3. Penyajian Data (*display*)**

Penyajian data atau disebut juga display data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>30</sup> Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

---

<sup>28</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, (USA: Sage Publications, 2014).hlm.33

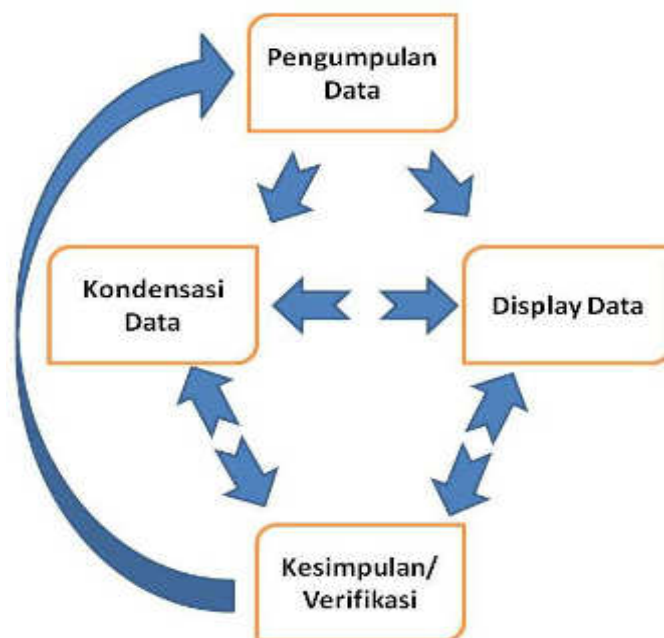
<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*,

### 3.5.4. Tahap Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data penelitian. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas), berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat.<sup>31</sup>

Teknik analisa data model interaktif terilustrasikan dalam model berikut :



**Gambar 3.1 Model Interaktif Milles dan Huberman**

Sumber :Miles & Huberman,2014

<sup>31</sup> *Ibid*,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **4.1.1.1 Kabupaten Sukabumi**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Barat. Secara astronomis, Kabupaten Sukabumi terletak antara 106<sup>o</sup>49 sampai 107<sup>o</sup> Bujur Timur dan 60<sup>o</sup>57 - 70<sup>o</sup>25 Lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi ialah : sebelah Utara dengan Kabupaten Bogor, sebelah Selatan dengan samudera Indonesia, sebelah Barat dengan Kabupaten Lebak, dan sebelah timur dengan Kabupaten Cianjur. Batas wilayah tersebut, 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki area yang cukup luas yaitu ± 419.970 Ha.<sup>1</sup>

Kondisi demografi Kabupaten Sukabumi sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu, distribusi penduduk yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuatan kebijakan pemerintah.<sup>2</sup> Pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 2.442.113 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,57 persen dan kepadatan penduduk 579,39 orang per Km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Kepadatan penduduk menurut kecamatan cukup bervariasi. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ciemas (183 jiwa per km<sup>2</sup>) dan tertinggi di Kecamatan Sukabumi (2.447 jiwa per km<sup>2</sup>).<sup>4</sup> Pemukiman padat

---

<sup>1</sup> Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, *Profil Kabupaten Sukabumi 2018*

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, hlm.II.11

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, *Loc.Cit.*

penduduk umumnya terdapat di pusat-pusat kecamatan yang berkarakteristik perkotaan dan di sepanjang jalan raya.

Ada beberapa indikator utama untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten Sukabumi. Indikator utama tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, angka kemiskinan, hingga Gini Rasio.<sup>5</sup>

Saat ini Kabupaten Sukabumi memiliki 17 kategori sektor lapangan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kategori ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sembilan kategori. Secara hierarki, Kategori tersebut diantaranya ialah: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,48%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,35%); industri pengolahan (15,14%); konstruksi (11,46%); transportasi dan pergudangan (7,43%); pertambangan dan penggalian (6,76%); jasa pendidikan (4,15%); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,43%); informasi dan komunikasi (2,34%); penyediaan akomodasi dan makan minum (2,21%); real estate (1,42%); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,02%); jasa keuangan dan asuransi (0,70%); jasa perusahaan (0,30%); pengadaan listrik dan gas (0,10%); konstruksi air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (0,03%) dan jasa lainnya (1,71%).<sup>6</sup> Secara nilai, PDRB kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi mencapai Rp.40,97 trilyun, dimana pada tahun sebelumnya hanya mencapai Rp.37,92 trilyun.<sup>7</sup>

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi berjalan cukup stabil. Pada tahun 2014, pertumbuhannya mencapai 5,48 persen. Adapun kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah; Kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, *Op.Cit*, hlm. II.14

<sup>6</sup> <https://sukabumikab.bps.go.id/>

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, *Loc.Cit*.

kategori perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi mobil dan sepeda motor). PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 mencapai Rp.16,91 juta per tahun atau sekitar Rp.1,41 juta per kapita per bulan. Di sisi lain, tingkat kemiskinan relatif mengalami penurunan hingga 8,88 %.<sup>8</sup> Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, gini rasio kabupaten Sukabumi tahun 2017 berada pada kisaran 0.334.<sup>9</sup> itu artinya distribusi pendapatan di Kabupaten Sukabumi berada pada tingkat ketimpangan rendah.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, meliputi 381 Desa dan 5 Kelurahan. Ibukota Kabupaten Sukabumi saat ini berada di Kecamatan Palabuhanratu walaupun masih ada beberapa kantor pemerintahan yang berada di kecamatan lainnya seperti di Cisaat, Cibadak dan Kota Sukabumi.<sup>10</sup> Selanjutnya dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :



**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sukabumi**

sumber : sukabumikab.go.id

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, *Op.Cit.*, hlm.II.15-II.20

<sup>9</sup><https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/08/31/578/gini-ratio-kabupaten-kota-di-jawa-barat--2008-2017.html>

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi, *Loc.Cit.*,hlm. II.2

Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tahun 2014, saat ini terdapat 802 Pondok Pesantren, 3.725 Kiai/Ustadz, dan 60.822 santri di Kabupaten Sukabumi.<sup>11</sup> Tidak mengherankan jika Kabupaten Sukabumi mendapat julukan sebagai Kota Santri. Hingga saat ini, masih banyak pesantren-pesantren tradisional di Kabupaten Sukabumi yang belum terdata oleh pemerintah.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini dikhususkan di dua desa, yaitu Desa Cikembar dan Desa Kebon Pedes. Desa Cikembar berjarak ±42 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Total jumlah penduduk desa Cikembar tahun 2018 sebanyak 12.644 orang dengan 4.009 Kepala Keluarga. Adapun sektor mata pencaharian pokok penduduk Desa Cikembar sebagian besar bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jumlah 1.605 orang, disusul petani dan buruh tani sejumlah 669 orang. Sedangkan tingkat pendidikan di Desa Cikembar didominasi oleh tamatan SD/ sederajat (3.939 orang), SMA/ sederajat (2.455 orang) dan SMP/ Sederajat (1.747 orang). Saat ini, Cikembar diduduki oleh ± 45 etnis dan 3 agama yakni Islam, Protestan, dan Budha. Selain itu, tercatat ada 8 lembaga pendidikan agama dan 44 Masjid/Mushola.<sup>12</sup> Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 2 Pesantren yang tercatat di Desa Cikembar.<sup>13</sup> Geografis wilayah Desa Cikembar cukup strategis karena sebagian besar wilayahnya berada di sepanjang ruas jalan provinsi. Desa Cikembar berada di wilayah hukum Polres Kabupaten Sukabumi dan Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi.

Lokasi Ponpes Khilafatul Muslimin Cikembar berada di kampung Cihuni. Kampung Cihuni terletak tidak jauh dari jalan protokol dan kantor Desa Cikembar, yaitu sekitar 2 Km. Akses menuju Kampung Cihuni relatif mudah karena dapat ditempuh dengan melalui jalan desa selebar 2 meter

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2015*, 2015, Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi, hlm.105

<sup>12</sup> Sekretaris Desa kebon Pedes, *Profil Desa Cikembar Kecamatan Cikembar tahun 2018* (sesuai dengan Permendagri No.12 tahun 2007)

<sup>13</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Cikembar, *Kecamatan Cikembar Dalam Angka 2018*, 2018, Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi, hlm.33

yang kondisinya setengah rusak. Sepanjang jalan menuju lokasi banyak ditemukan bangunan sekolah dan sebagian perumahan penduduk. Kampung Cihuni sendiri terdiri dari satu RT, dengan penduduk sekitar 50 rumah. Meskipun cukup dekat dari jalan protokol, namun keadaan di kampung Cihuni cukup sepi dan tidak banyak aktivitas warga yang terlihat. Di lokasi Ponpes KM, terdapat sekitar 5 rumah warga yang berada tepat di sepanjang jalan menuju Ponpes.

Ketika tiba di gerbang Kampung Cihuni, maka yang pertama akan terlihat adalah sebuah spanduk besar bertuliskan rencana pembangunan Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah (lembaga pendidikan yang dikelola KM). Disamping spanduk tersebut terdapat papan plang bertuliskan "Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Sukabumi". Dari kedua media tersebut dapat diketahui bahwa Ponpes tersebut merupakan bagian dari KM Kemas'ulan Sukabumi yang berada dalam kordinasi KM wilayah Priangan. Tidak jauh dari sana, bangunan Ponpes KM bisa langsung terlihat karena hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan kampung. Di depan bangunan Ponpes terdapat sebuah Masjid dan Gapura bertuliskan identitas Pondok.



**Gambar 4.2 Lokasi Ponpes KM di Kampung Cihuni Cikembar**

Sumber : dokumentasi pribadi

Adapun Desa Kebon Pedes berada di wilayah Kecamatan Kebon Pedes yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukaraja dan Gegerbitung. Luas Desa Kebon Pedes ±196,14 Ha dengan jarak sekitar 64 Km dari Pusat Kota/Kabupaten. Jumlah penduduk desa Kebon Pedes tercatat sebanyak 7.439 orang, dengan 2.389 Kepala Keluarga yang seluruhnya beragama Islam. Selain itu, terdapat 45 Pondok Pesantren yang berkembang di Kebon Pedes<sup>14</sup>, 16 Masjid Jami dan 32 Mushola.<sup>15</sup> Wilayah Desa Kebon Pedes termasuk kategori pedesaan dengan dominasi perekonomian pada sektor pertanian dan perikanan. Di Desa Kebon Pedes, Masih banyak ditemukan sawah dan kolam ikan milik penduduk dengan sumber air yang berlimpah. Tercatat dari total 196,14 hektar luas lahan di Desa Kebon Pedes, 115,35 hektar diantaranya digunakan untuk lahan pertanian dengan komoditi utama padi.<sup>16</sup> Berbeda dengan desa Cikembar, desa Kebon Pedes berada di wilayah kewenangan Polres Kota Sukabumi dan Kodim 0607 Kota Sukabumi.

KM Kebon Pedes berada di kampung Cigarung yang termasuk wilayah kedeskusan Ranji. Lokasinya berada di gang kecil di Kampung Cigarung yang dulu sempat dikenal sebagai “Kampung Teroris”. Di pintu masuk gang, terdapat sebuah papan plang bertuliskan identitas KM sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan lokasinya. Jarak dari pintu masuk gang sampai ke mushola KM bisa diakses dengan berjalan kaki karena hanya berjarak ±200 meter. Setelah tiba dilokasi, hampir tidak ditemukan penunjuk bangunan KM, hanya terdapat sebuah mushola dua lantai berukuran ±100 m<sup>2</sup>. Meskipun tidak ada penunjuk bangunan, namun hampir semua warga Cigarung sudah mengetahui bahwa mushola tersebut dikelola KM. Mushola bercat hijau tersebut diapit rumah-rumah warga yang merupakan keluarga Ust.Abad (Pimpinan KM Kebon Pedes).

---

<sup>14</sup> Sekretaris Desa Cikembar, *Profil Desa Kebon Pedes tahun 2018*

<sup>15</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Kebon Pedes, *Kecamatan Kebon Pedes Dalam Angka 2018*, 2018, Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi, Hlm 58

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.27-39



**Gambar 4.3 Lokasi KM Kebon Pedes**

Sumber : dokumentasi pribadi

Kampung Cigarung merupakan pemukiman padat penduduk yang cukup ramai dan berada di jalur utama jalan desa Kebon Pedes. Akses menuju Desa Kebon Pedes sangat mudah karena hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat Kota Sukabumi. Selain itu, untuk menuju kesana juga terdapat angkutan perkotaan (Angkot) yang beroperasi dari pagi sampai sore. Desa Kebon Pedes juga dilalui jalur Kereta Api yang menghubungkan Sukabumi dan Cianjur.

Berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua lokasi keberadaan KM di Kabupaten Sukabumi cukup strategis, meskipun keduanya memiliki topografi yang berbeda. Cikembar yang dikategorikan “daerah rawan penyimpangan akidah” merupakan lahan potensial masuk dan diterimanya ideologi-ideologi baru, termasuk ideologi radikal. Sedangkan Kebon Pedes, dengan melihat catatan masa lalu, juga termasuk daerah rawan terhadap penyebaran ideologi radikal. Berbagai kemungkinan negatif sangat mungkin terjadi di kemudian hari apabila gerakan ini semakin membesar.

#### 4.1.1.2 Khilafatul Muslimin

##### a. Sejarah singkat

Khilafatul Muslimin (KM) didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada 18 Juli 1997 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, Sumbawa ditetapkan sebagai kemas'ulan (satuan wilayah terkecil) pertama Khilafatul Muslimin. Sejak 1997 hingga pertengahan tahun 2000, Dakwah KM dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 2000, Kongres Mujahidin pertama berlangsung di Yogyakarta pada 5-7 Agustus. Kongres ini diklaim dihadiri 2000 orang termasuk panitia, dengan peserta dari dalam dan luar negeri. KM merupakan salah satu organisasi peserta dalam kongres ini. Sejak saat itu, dakwah KM dilakukan secara terang-terangan, menyerukan persatuan umat Islam dibawah naungan kekhalifahan KM.<sup>17</sup> Lampung ditetapkan sebagai pusat KM sekaligus tempat tinggal Abdul Qadir Hasan Baraja saat ini.

Abdul Qadir Hasan Baraja lahir pada 10 Agustus 1944 di Taliwang, Sumbawa. Dia merupakan pendiri Darul Islam di Lampung pada tahun 1970 dan ikut mendirikan Pondok Pesantren Ngruki. Hasan Baraja telah mengalami 2 kali penahanan semasa hidupnya; pertama pada Januari 1979 karena terlibat dengan kasus Teror Warman, sehingga harus ditahan selama 3 tahun. Kemudian Hasan Baraja ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, karena terbukti terlibat dalam kasus peledakan bom di Jawa Timur dan Borobudur pada tahun 1985. Kasus lain yang melibatkan Baraja ialah kasus Komando Jihad (Komji) bersama Habib Husein (1976) dan kasus Talangsari di Lampung (1989). Selama masa penahanan terakhir, Baraja mengaku telah menerima *bai'at* (sumpah setia) dari temannya di dalam tahanan, Irfan dan Jaka, untuk menjadi Khalifah. Hasan Baraja berpendapat tidak ada rumusan yang *qoth'i* (mutlak) untuk mengangkat Khalifah, sehingga walaupun dengan hanya 2 orang saja

---

<sup>17</sup> Nashroh Pusat, (Lembaga Publikasi), 17 Desember 2016, *Dokumentasi Perjalanan Khilafatul Muslimin* (Gambar Hidup), dalam [https://www.youtube.com/watch?v=To-zQ\\_ydTt4](https://www.youtube.com/watch?v=To-zQ_ydTt4), diakses pada 10 Mei 2018

sudah cukup. Sejak saat itu, melalui maklumat yang ditulisnya di dalam tahanan, sosialisasi Khalifah mulai dikumandangkan termasuk dalam pertemuan MMI tahun 2000 hingga sekarang.<sup>18</sup>



**Gambar 4.4 Abdul Qadir Hasan Baraja dan Maklumat**

Sumber : berbagai sumber

Dari informasi website *khilafatulmuslimin.com*, ditemukan fakta bahwa ada dua pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi yang tergabung dengan KM. Salah satunya ialah Pondok Pesantren al-Amin Cikembar. Pondok Pesantren Al-Amin merupakan kemas'ulan KM wilayah Sukabumi. Pondok Pesantren al-Amin dipimpin oleh Ust. Mukhlisyah, lelaki kelahiran Banjarmasin 1956. Dalam website tersebut terdapat pula wawancara khusus antara *blogger* dengan Ust. Mukhlisyah. di antara penjelasnya diantaranya ialah: Tahun 2003, Ust. Mukhlisyah berbaiat kepada KM yang berpusat di Lampung dibawah Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja. Dalam perjalanannya hidupnya, Ust. Mukhlisyah merupakan aktivis NII yang merupakan pimpinan redaksi buletin-buletin NII tahun 1980-an. Dalam kurun 1987-1989, dia juga sempat bergabung dalam pelatihan militer NII di Afghanistan selama 2 tahun. Perjalanan hidupnya tidak terlepas dari kedekatannya dengan tokoh-tokoh teroris, seperti Abu

<sup>18</sup> <https://khilafatulmusliminksb.wordpress.com/2009/10/21/biografi-ust-abdul-qadir-hasan-baraja/> diakses pada 12 Desember 2018.

Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Bahkan dia sempat menjadi DPO semasa orde baru dan diduga terlibat dalam aksi Bom Marriot tahun 2003.<sup>19</sup> Kompetensinya dalam bidang jurnalistik, membuat ia melanjutkan karier dengan menulis majalah dibawah organisasi barunya, yakni Khilafatul Muslimin.

#### **b. Keanggotaan**

Khilafatul Muslimin terus melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah Nusantara, mengajak persatuan kaum muslimin dengan berbai'at kepada KM. Proses bai'at dilakukan secara individu maupun kolektif. Mereka mengklaim sistem KM merupakan milik umat Islam satu-satunya di dunia. Keanggotaannya sebageian besar merupakan kalangan menengah kebawah dan ada pula diantaranya dari kalangan akademisi. Proses perekrutan anggota dilakukan dengan metode dakwah *amar ma'ruf*, baik secara langsung ataupun melalui media-media milik KM seperti radio, majalah, maklumat, situs internet, hingga beberapa akun di media sosial. Bagi KM, berhasil atau tidak dakwah yang dilakukan bergantung adanya hidayah dari Allah, sedangkan hidayah itu datang dengan sendirinya berdasarkan kehedak Allah, sehingga tidak dapat dipaksakan. Dakwah yang dilakukan KM berupaya untuk memberikan penyadaran kepada setiap muslim akan pentingnya hidup berjamaah dibawah khalifah.<sup>20</sup> Selanjutnya bagi siapapun yang rela dan bersedia menjadi jamaah KM akan mengikuti proses bai'at dengan konsekuensi untuk patuh pada setiap ketentuan KM. Meski demikian, tidak sedikit dari jamaah KM yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. Hingga saat ini, anggota KM diperkirakan berjumlah ±17.000 Kepala Keluarga.<sup>21</sup>

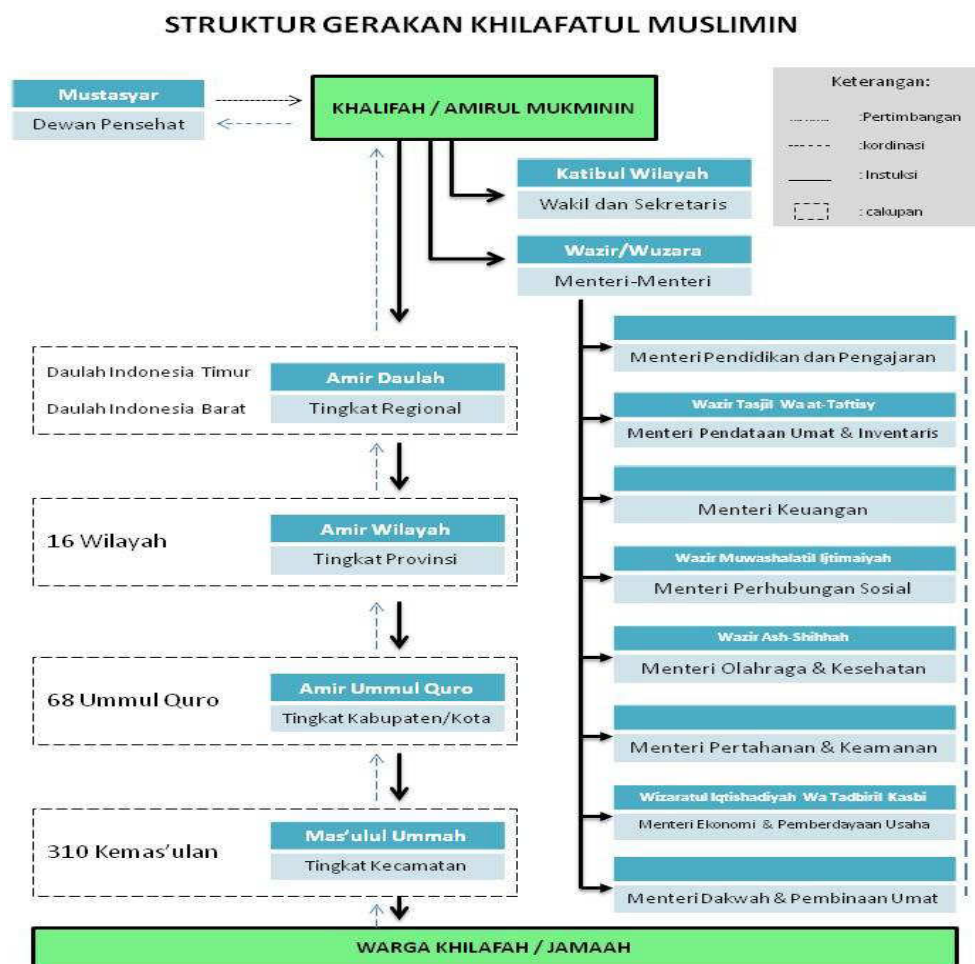
KM kini memiliki 16 wilayah di seluruh Indonesia, meliputi: Sumbawa Barat, Lampung Selatan, Bima, Dompu, Jakarta, Lampung Utara, Priangan (Jawa Barat bagian timur), Lampung Timur, Jawa

<sup>19</sup> Anonim, "Ustad Mohammad Mukhliansyah, Mujahid hingga Akhir Hayat Insya Allah", dalam <http://khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 10 Mei 2018

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ust. Mukhliansyah di Cihuni Cikembar pada 12 November 2018

<sup>21</sup> *Ibid*,

Tengah, Surabaya, Bekasi Raya, Bogor, Flores, Karawang, Cirebon dan Buton. Terdiri dari 68 Ummul Quro (ibu kota kewilayahan) dan 310 kemas'ulan (setingkat kecamatan). Dalam struktur kepengurusannya hingga saat ini, terpilih Ust. Zulkifli Rahman sebagai Amir Daulah pertama pada saat musyawarah di Klaten.<sup>22</sup> Sedangkan untuk jabatan khalifah jatuh kepada Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja sejak tahun 1999 dan diumumkan ke seluruh dunia, termasuk dalam kongres pertama di Yogya.<sup>23</sup> Adapun susunan keanggotaan KM dapat dilihat dalam organigram berikut :



**Gambar 4.5 Struktur Organisasi Khilafatul Muslimin**

Sumber : diolah dari berbagai sumber

<sup>22</sup> Nashroh Pusat, *Op.Cit*,

<sup>23</sup> Anonim, "Latar Belakang", dalam <http://khilafatulmuslimin.com/latar-belakang/> diakses pada 10 Mei 2018

### c. Kegiatan Pendidikan

Saat ini, KM telah berhasil membangun sebuah Universitas yang berlokasi di Mapin, Sumbawa-NTB.<sup>24</sup> Universitas tersebut merupakan Universitas kedua yang dibangun KM setelah yang pertama di Lampung. Totalnya, KM saat ini memiliki 14 sekolah dan 2 Universitas.<sup>25</sup> Setiap satuan sekolah terdiri dari satu paket jenjang pendidikan dari tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah atas (SLTA).

Proses pendidikan di KM memiliki sistem tersendiri yang terpisah dari sistem pendidikan nasional. Durasi pendidikannya relatif lebih singkat dan ditargetkan untuk membangun SDM jamaah yang kompeten dengan prioritas pada hapalan al-Qur'an. Untuk tingkat dasar, siswa hanya perlu menempuh waktu selama 3 tahun dengan target hapalan al-Qur'an 9 juz. Untuk setingkat SLTP, pendidikan hanya dilakukan selama 2 tahun dengan target hapalan al-Qur'an 9 juz. Kemudian di tingkat SLTA, lama pendidikan hanya 2 tahun dengan program hapalan al-Qur'an sebanyak 10 juz. Total dari tingkat SD sampai SLTA setiap santri wajib hapal 28 juz, sisa 2 juz akan diselesaikan oleh santri di tingkat Perguruan Tinggi. Selain itu, setiap sarjana lulusan Perguruan Tinggi KM diwajibkan untuk terlebih dulu melakukan pengabdian kepada lembaga KM selama 2 tahun. Para santri juga akan diikutkan dalam program pelatihan keterampilan hidup (Keterampilan Hayat) sebelum dia dikembalikan kepada masyarakatnya. Setiap lulusan lembaga pendidikan KM diharapkan dalam usia 18 tahun sudah siap untuk berdakwah di masyarakat dengan membawa misi-misi KM.<sup>26</sup>

### d. Kegiatan Sosial Keagamaan

Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan KM terkordinasi dari pusat hingga kemas'ulan dibawah satu komando Khalifah. Kegiatan rutin yang dilakukan misalnya adalah pengajian wajib (taklim) jamaah yang

<sup>24</sup> Nasroh Pusat, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyan, *Op.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid,*

dilakukan setiap dua minggu sekali. Pengajian ini bertujuan untuk memupuk kesadaran jamaah akan pentingnya hidup bersatu dalam jamaah (Khilafah). Dengan kata lain, pengajian ini menjadi sarana ideologisasi jamaah KM. Selain itu, setiap sub organisasi KM dipersilahkan untuk membuat program pengajian sendiri diluar pengajian wajib tersebut.

Kegiatan lain yang dilakukan ialah Dafis (*da'wah fisabilillah*). Kegiatan ini hampir menyerupai *Khuruj* yang dilakukan Jamaah Tablig (JT). Beberapa orang jamaah berdakwah secara berkeliling dari masjid ke masjid untuk menyampaikan ide khilafah dengan tempo yang ditentukan. Dafis dilakukan sebulan sekali secara kondisional dengan durasi waktu yang tidak menentu dan diniatkan untuk berdakwah.

Kemudian ada kegiatan sosialisasi oleh tingkat Wilayah dan Ummul Quro. Tujuan kegiatan ini sama seperti kegiatan lain, namun dengan melibatkan massa cukup banyak dalam satu jamaah masjid.<sup>27</sup> Adapula kegiatan deklarasi khilafah yang dilakukan setiap sub organisasi KM. Kegiatan ini diisi kirab dengan berjalan kaki mengelilingi kawasan jamaah KM. Sedangkan kegiatan yang lebih besar ialah Syiar Khilafah. seperti yang dilaksanakan pada November 2018 lalu.

#### **e. Hubungan KM dengan Negara**

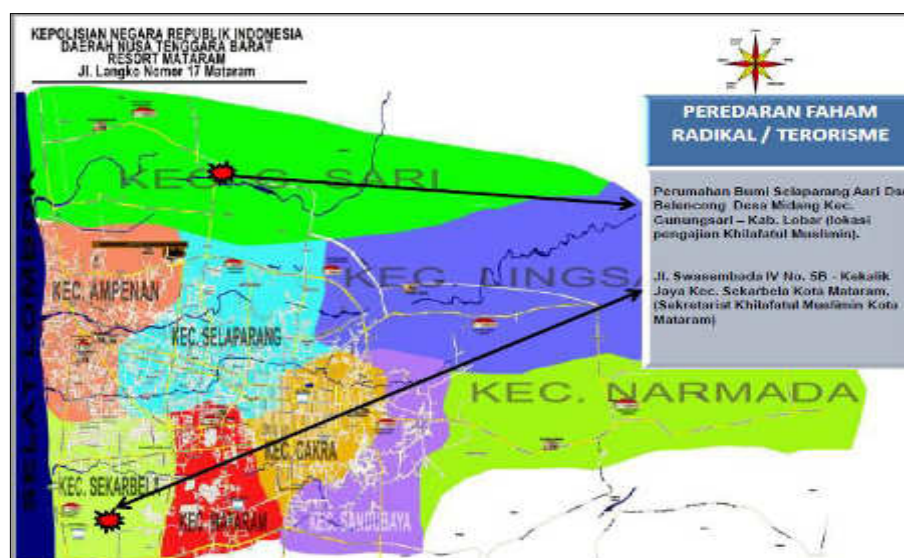
Secara historis, KM merupakan keberlanjutan perjuangan negara Islam yang dibawa oleh DI/TII (NII). Para tokoh dan pendiri KM juga merupakan mantan-mantan anggota DI/TII Kartosuwirjo, bahkan sebagian diantaranya pernah mengikuti pelatihan militer di Afghanistan. Sebelum KM didirikan, para tokohnya banyak yang terlibat dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia. Sehingga di beberapa daerah, gerakan ini mendapat pemantauan ketat dari aparat pemerintah. Meski demikian, gerakan KM memiliki beberapa perbedaan ideologis dengan organisasi pendahulunya. Diantaranya ialah pergerakan KM yang tidak berorientasi kekuasaan. Pemahaman ini berdampak pada hubungan KM dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

negara yang cenderung tidak konfrontatif. Selain itu, KM juga mengkritisi gerakan-gerakan khilafah *ashobiyah* (kewilayahan) seperti NII dan HTI. Baginya gerakan khilafah harus diwujudkan secara global, sehingga tidak boleh menyandarkan gerakan dengan atribut kewilayahan.

Mengenai Khilafatul Muslimin, beberapa institusi menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan salah satu supporter ISIS di Indonesia. misalnya, BNPT dalam beberapa forum mencantumkan Khilafatul Muslimin sebagai supporter ISIS di Indonesia. Senada dengan itu, Rohan Gunaratna dalam *9<sup>th</sup> Berlin Conference on Asian Security (BCAS)*, sebuah konferensi yang diadakan oleh *German Institute for International and Security Affairs (SWP)* tahun 2015, juga menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin merupakan organisasi pendukung ISIS di Indonesia sejak juli 2014.<sup>28</sup> Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, lokasi keberadaan Khilafatul Muslimin dimasukkan ke dalam peta daerah rawan radikalisme dan terorisme oleh Kepolisian setempat. Sebagaimana tergambar dalam peta berikut :



**Gambar 4.6 Peta Kerawanan Polres Mataram tahun 2017**

sumber: ntb.polri.go.id

<sup>28</sup> Gunaratna, Rohan, "International Dimensions of National (In)Security Concepts, Challenges and Ways Forward: Islamic State and Asia", *9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS)*: A conference jointly organized by Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Berlin, 2015, hlm.5.

Oleh karena itu, gerakan KM termasuk gerakan khilafah yang cukup massif meskipun tidak nampak dipermukaan. Keberadaan KM dapat merupakan fenomena gunung es akan potensi radikalisme tipe baru di Indonesia. Beberapa tokoh KM merupakan mereka yang memiliki catatan hitam di masa lalu dalam wadah NII. Pasca reformasi, para tokoh tersebut kembali menemukan ruang gerak baru untuk menyatukan kembali ideologinya yang dulu sempat terpasung.

#### **4.1.2 Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi**

##### **4.1.2.1 Khilafatul Muslimin Cikembar**

Khilafatul Muslimin (KM) di Cikembar diketahui telah berdiri sejak tahun 2006. Lokasi KM Cikembar berada di kampung Cihuni, desa dan kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Lokasi Kampung Cihuni cukup terpencil dari keramaian dengan jarak  $\pm$  1 KM dari jalan protokol dan kantor kecamatan. KM Cikembar merupakan bagian dari Kemas'ulan Sukabumi yang berlokasi di Kecamatan Baros. Di lokasi tersebut terdapat sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh Ust.Mukhlisyah yang diberi nama Pondok Pesantren al-Amin. Saat ini Ust.Mukhlisyah sendiri aktif menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah *Khilafah* milik KM. Pengajian di Ponpes Al-Amin mulai aktif sejak 2006, namun mulai diserahkan pengelolaannya kepada KM pada 2017. Meski begitu, Ust.Mukhlisyah mengaku mulai fokus mengelola Al-Amin pada 2013, setelah istri pertamanya meninggal dunia. Istri pertamanya turut serta mengelola Ponpes Al-Amin sampai akhir hayatnya.<sup>29</sup>

Ust.Mukhlisyah menyatakan bai'atnya kepada Hasan Baraja sejak 2003 ketika masih tinggal di Bekasi. Namun, dia mengaku mulai aktif pada 2005. Kedekatan personal menjadi alasan bai'at tersebut. selain itu, kesamaan ideologi dan perjuangan tentunya menjadi faktor utama bergabungnya Ust.Mukhlisyah kepada KM. Ideologi KM, yang bercita-

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah, *Op.Cit.*

cita mewujudkan kesatuan umat Islam (jamaah) dibawah Khilafah, diklaim sebagai ajaran Allah dan Rasulnya yang telah dilaksanakan oleh Sahabat Nabi. Kesatuan umat tersebut diwujudkan dengan adanya seorang khalifah sebagai pemimpin tunggal. Bagi KM, Khilafah tetap dapat ditegakkan meskipun tanpa adanya kekuasaan (wilayah). Aspek penting dari tegaknya khilafah ialah adanya keterpimpinan dalam menjalankan hukum-hukum Allah sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil alamin*. Cita-cita KM tergambar dalam pernyataan Ust Mukhlisyah berikut:

“Maka kita di KM ini mau memunculkan kembali khalifah ini karena sudah terkubur 100 tahun. Khilafah yang sudah terkubur ini kita mau bangkitkan lagi supaya umat Islam itu mau menyadari bahwa dulu Islam ini pernah jaya selama 1300 tahun. Dari jaman kekhalifahan Abu Bakar Asshidiq sampai Kekhalifahan Turki Utsmani 1923. Kita pernah jaya, tapi sekarang ini kita terkubur...”<sup>30</sup>

Penegakan khilafah dipahami KM sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim. KM membawa misi untuk membuka *mindset* umat Islam untuk kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya dengan jalan mewujudkan kesatuan umat dibawah pimpinan seorang khalifah. Adapun organisasi/ partai/ golongan dalam sistem khilafah harus dihapuskan. Ketaatan terhadap khalifah berada dalam batasan ketaatan terhadap syariat, bukan ketaatan mutlak. Dengan kata lain, selama khalifah taat dan memerintahkan taat terhadap Allah dan Rasulnya, tidak meyuruh pada kemakisatan, maka selama itu umat wajib taat kepadanya. sebagaimana dikatakan Ilham Mundzir dalam penelitiannya tentang KM :

“...Ketaatan terhadap *ulil amri* merupakan perintah untuk mendirikan khilafah Islamiyah sebagai satu satunya wadah bagi persatuan umat Muslim seluruh dunia berdasarkan ajaran agama. Dalam optik mereka, hanya lewat cara itulah syariat Islam bisa dilaksanakan, masyarakat Islami yang dicita-citakan bisa terwujud, serta umat Islam akan memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan peribadatannya sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing...”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*,

<sup>31</sup> Mundzir, Ilham, hlm.70

Untuk mewujudkan misi itu, KM berupaya memperkuat solidaritas dan soliditas jamaah KM dengan terus melakukan penyadaran umat agar kembali kepada aturan Rasulullah dengan berbagai metode dakwah.

Adapun yang menjadi pembeda KM dengan organisasi Islam lain dapat dipahami dalam pernyataan berikut :

“Kalau dari segi dasarnya sama, ingin medakwahkan Islam. Muhammadiyah ,NU, sama *kan* dasarnya. Kalau yang dianggap perbedaan, mungkin cita-citanya. Mungkin *ya*. Cita-cita KM ingin menyatukan umat Islam sedunia berdasarkan sunnahnya Nabi, yaitu berjamaah. berjamaah dalam arti penegakan Kekhalifahan Islam”.<sup>32</sup>

Dalam struktur organisasinya, KM langsung mengangkat seorang khalifah sebagai pemimpin umat Islam yang diklaim berlaku untuk seluruh dunia. Pengangkatan khalifah ini dimaksudkan agar umat Islam langsung fokus pada pendirian Kekhalifahan. Berbeda dengan organisasi lain, HT misalnya, yang belum menamakan pemimpinnya dengan sebutan Khalifah. KM tidak menyetujui upaya penegakan khilafah dengan cara-cara yang revolusioner untuk merebut kekuasaan, termasuk dengan aksi terorisme. Sebaliknya KM berupaya untuk merebut hati (simpati) umat dengan upaya penyadaran yang dilakukannya. KM mencoba membawa misi Islam yang membawa *rahmat* (kasih sayang) dan menghindari permusuhan dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim. KM juga mengkritisi organisasi khilafah yang menggunakan basis kewilayahan (*asshobiyah*) dalam penamaan organisasinya, seperti HTI dan NII.

KM melihat realita bahwa umat Islam saat ini terpecah-belah menjadi beberapa golongan. Hal itu menunjukkan bahwa umat Islam telah mengingkari perintah Allah dan Rasulnya untuk hidup bersatu dalam jamaah. Sebagaimana dikatakan Ust.Mukhlisyah:

“Sekarang umat pecah, karena dipimpin oleh banyak. Banyak organisasi Macam-macam yang tidak mau saling ketemu, mau ketemu hanya basa-basi. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu *kan* satu, kata Allah: *inna hadzihi ummatukum ummatan wahidah* (sesungguhnya umat kamu sekalian ini adalah umat yang

---

<sup>32</sup> Ust.Mukhlisyah, *Ibid*.

satu). Maka satu lah, jangan bercerai berai. Rasul tidak mengajarkan. Allah juga melarang, Allah benci. Apa keuntungannya orang berpecah-belah?, *Gak* ada, paling bertengkar, berdebat, cari menang-menangan. Tapi kalau bersatu *kan* apa yang terjadi? Tolong menolong, saling membantu, *rahmatan lil'alamin*, kasih-mengasihi, namanya bersatu.”<sup>33</sup>

Kemudian, cara KM dalam memandang permasalahan bangsa saat ini, Mursyid Ali dalam bukunya menjelaskan :

“menurut kelompok ini sudah waktunya kita mencari alternatif baru, mencari sistem sosial ekonomi, politik yang serasi. Mereka menawarkan Islam sebagai alternatif yang mereka yakini sebagai jalan yang mampu membawa bangsa ini keluar dari berbagai kemelut dan kesulitan yang tak berkesudahan. Melalui syariat, bangsa ini bisa diselamatkan”.<sup>34</sup>

Ponpes al-Amin, yang kini dikelola KM di Cikembar, berdiri diatas tanah seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  yang merupakan wakaf dari teman Ust.Mukhlisyah. Di lokasi Pondok, terdapat sebuah Masjid dua lantai berukuran  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang juga dijadikan tempat pengajian sekaligus tempat tinggal para santri. Selain masjid, di lokasi tersebut terdapat dua buah rumah milik Ust.Mukhlisyah dan keluarganya. Salah satu rumah difungsikan sebagai dapur umum. Tampak di dalam kawasan pondok, Ust.Mukhlisyah memiliki jasa isi ulang air minum dan mengelola beberapa ternak sebagai kegiatan usaha yang dilakukan. Menurut informasi, di pondok tersebut akan dilakukan pembangunan lanjutan guna menyambut kedatangan santri baru di tahun mendatang.<sup>35</sup>

Sejak awal berdiri, Mukhlisyah menggunakan berbagai metode dakwah untuk mencoba masuk dalam kehidupan masyarakat Cikembar. Metode dakwah yang cukup berhasil dilakukan ialah dengan cara menyediakan sembako dan berbagai keperluan lain untuk diberikan kepada jamaah dan santri di pengajiannya. Metode ini dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 tahun secara terus-menerus dari tahun

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah, *Ibid*.

<sup>34</sup> Asnawati hlm. 213.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ahmad Rasyid, santri PP al-Amin, di Cikembar pada 18 September 2018

2007-2013. Metode ini cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk mengikuti pengajian dan berbagai kegiatan di al-Amin. Setelah 2013, Ust.Mukhlisyah merubah metode tersebut karena keterbatasan pembiayaan. Alhasil, satu-persatu jamaah dan santri warga cikembar mulai berhenti mengikuti pengajian di al-Amin hingga saat ini.<sup>36</sup> Ketidaksesuaian madzhab keagamaan menjadi salah satu faktor penolakan masyarakat untuk mengikuti ajakan dakwah KM di Cikembar.

Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mengkategorikan wilayah Cikembar sebagai daerah rawan penyimpangan akidah. Demografi wilayah Cikembar sangat beragam dengan berbagai agama dan keyakinan yang berkembang hingga saat ini. Kehadiran KM yang beraliran salafi-wahabi di Cikembar menambah keragaman tersebut. Disisi lain, masyarakat Cikembar umumnya menganut aliran Islam traditional (NU) yang jelas berseberangan dengan KM dalam beberapa masalah fiqh. Sebab inilah yang menjadikan ketertarikan masyarakat terhadap KM sangat rendah. Meski demikian, bukan berarti hubungan KM dengan tokoh agama setempat tidak baik. KM tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan setempat. Sebagaimana dikatakan Mukhlisyah :

“...hampir tiap tahun kita berkumpul dengan mereka juga. Tiap Idul Fitri kadang-kadang. bahkan kadang-kadang jum’atan kita berbaur dengan mereka dengan masjid di bawah itu. kalau mereka sedang membangun, saya ada semen, saya kirim ke mereka. Kita berusaha membaur dengan mereka.”<sup>37</sup>

KM Cikembar yang berlokasi di Kampung Cihuni juga bertetangga baik dengan Yayasan Al-Imam, sebuah yayasan pendidikan yang dikelola oleh Dewan Dakwah Indonesia (DDI). Kedekatan mereka juga dikarenakan aliran keislaman keduanya yang hampir sama. Meskipun berbeda aliran keislaman, tokoh masyarakat dan agama setempat tetap bersikap toleransi dengan keberadaan KM di kampungnya.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah, *Op.Cit.*

<sup>37</sup> *Ibid,*

Tahun 2017 Ponpes al-Amin mulai diserahkan pengelolaannya kepada Khilafatul Muslimin. sejak saat itu Ponpes al-Amin menjadi bagian dari Pondok Pesantren Uhkuwah Islamiyah (PPUI) yang dikelola KM di Bekasi. Santri pondok al-Amin diketahui berasal dari luar Jawa, seperti dari Kalimantan dan Sumatera. Diawal pembukaan pondok, diisukan akan ada 30 santri yang akan belajar disana, namun pada kenyataannya hanya sekitar 10 orang dan hanya sempat tinggal beberapa bulan saja.<sup>38</sup> Saat dilakukan observasi di lokasi pondok, diketahui bahwa santri Ponpes al-Amin saat ini tinggal satu orang yang baru tinggal selama satu tahun. Berdasarkan penuturan santri tersebut, memang diawal pendirian, santri pondok al-Amin sempat banyak. namun seiring berjalannya waktu, santri tersebut satu persatu memilih untuk pulang kembali. Ditambah lagi, Ust.Mukhlisyah, selaku pimpinan pondok, kerap melakukan perjalanan ke luar kota sehingga para santri al-Amin banyak ditinggalkan.<sup>39</sup>



**Gambar 4.7 Foto peneliti bersama Ust. Mukhlisyah**  
(Pimpinan Ponpes KM di Cikembar)

Sumber :dokumentasi pribadi

Materi pembelajaran di pondok al-Amin saat ini hanya seputar Akidah, Sejarah Nabi, dan Tadarus al-Qur'an. Waktu pembelajaran dilakukan tidak jauh berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya,

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rahmat Sanjaya, Sekretaris Desa Cikembar di Kantor Desa Cikembar pada 18 September 2018

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ahmad Rasyid, *Op.Cit.*

yaitu setelah subuh, setelah ashar dan setelah isya. Semua agenda pengajian ini bersifat kondisional tergantung pada kesediaan Ust.Mukhlisyah sebagai pengajar tunggal di pondok.

Pondok al-Amin sebelumnya telah memiliki perizinan dari pemerintah Desa Cikembar. Namun perizinan tersebut masih dipertanyakan oleh tokoh masyarakat setempat. Sebabnya, izin tersebut tidak melibatkan izin lingkungan langsung dari warga kampung Cihuni sebagai lokasi berdirinya pondok.<sup>40</sup> Pada masa awal pendirian pondok, Ust.Mukhlisyah pernah mendatangi dan mendakwahi para tokoh masyarakat setempat untuk mengsosialisasikan paham khilafah yang dibawanya. Namun, karena paham khilafah dianggap tabu dalam pemahaman keislaman di masyarakat, masyarakat banyak yang tidak memperdulikannya. Selain itu, Sebagai media sosialisasi KM di Cikembar, mereka pernah melaksanakan kegiatan syiar deklarasi kekhilafahan di sekitar wilayah Desa Cikembar bersama para santri dan pengurus KM.<sup>41</sup> sampai saat ini banyak warga setempat yang tidak mengetahui dengan jelas perihal KM di desanya.

Saat terjadi kasus bom Bali II, Ponpes al-Amin sempat ramai dikunjungi aparat keamanan, termasuk dari Densus 88 Antiteror. Namun karena tidak terdapat cukup bukti keterlibatan KM Cikembar dalam kasus tersebut, situasi pondok al-Amin kembali normal.<sup>42</sup> Keberadaan KM di Cikembar sejauh ini tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Baik KM maupun masyarakat setempat sama-sama saling menjaga toleransi diantara keduanya. Selain itu, prosedur administrasi pemerintahan selalu ditempuh KM, sehingga Pemerintah Desa Cikembar pun tidak merasa keberatan dengan keberadaan KM di wilayahnya. Pemerintah desa Cikembar berprinsip; selama tidak terjadi konflik dan tidak ada pengaduan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Apud, DKM Masjid Jami kampung Cihuni pada 18 September 2018.

<sup>41</sup> Wawancara dengan staff desa Cikembar di kantor Desa Cikembar pada 18 September 2018

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rahmat Sanjaya, *Op.Cit.*

dari masyarakat setempat yang bersifat meresahkan, KM diperbolehkan melakukan kegiatannya.<sup>43</sup> Dengan demikian, keberadaan KM di Cikembar sampai sejauh ini tidak memberikan dampak yang berarti bagi tatanan kehidupan masyarakat di Desa Cikembar.

#### 4.1.2.2 Khilafatul Muslimin Kebon Pedes

Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Kebon Pedes, atau lebih dikenal dengan sebutan Kemas'ulan Ranji, terbentuk tahun 2016. Lokasinya terletak disebuah gang di jalan Bojong Galing, kampung Cigarung desa dan kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi. Kemas'ulan Ranji merupakan bagian dari Ummul Quro Bandung. Kemas'ulan Ranji dibentuk berdasarkan hasil musyawarah jamaah yang dipimpin oleh Ust. Abad Badri, alias Ayah Abad.<sup>44</sup>

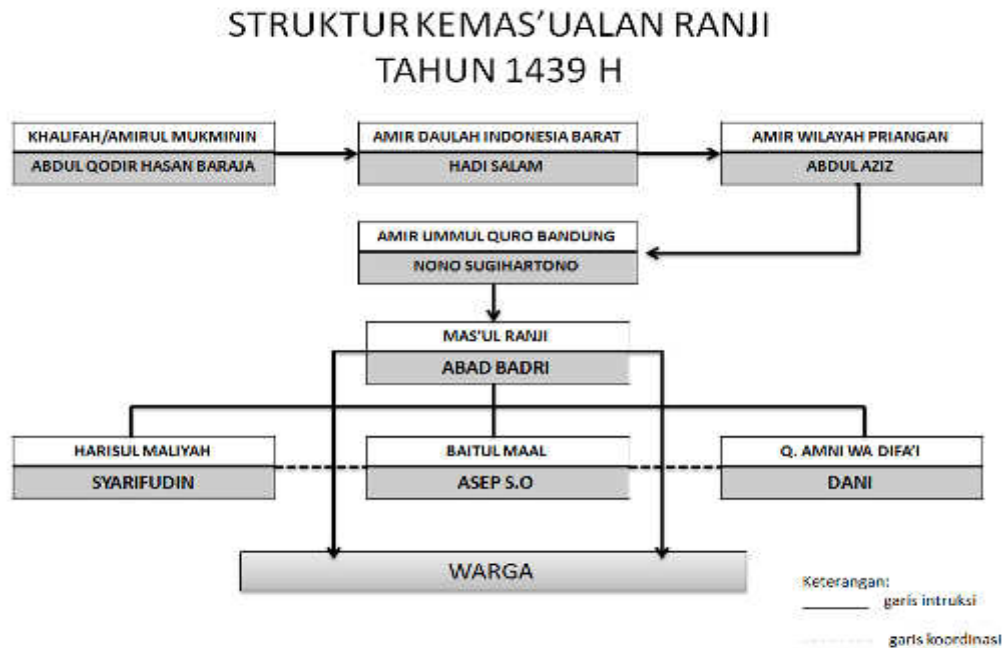
Abad Badri adalah seorang laki-laki kelahiran Aceh 17 September 1963. Sejak remaja dia aktif dalam gerakan Darul Islam (DI) bersama ayahnya, Ust. Ebeng Suhaepi. Abad Badri banyak mendapatkan pemahaman mengenai gerakan perjuangan DI dari ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Abad Badri melanjutkan perjuangan DI bersama Ust. Gaos Taufik, tokoh DI yang merupakan sahabat seperjuangan ayahnya. Gaos Taufik inilah yang kemudian memperkenalkan Abad Badri dengan tokoh-tokoh KM hingga dia diangkat menjadi *mas'ul ummah* KM di Kebon Pedes. Abad Badri hanya mengenyam pendidikan sampai SMA, selanjutnya dia mengikuti perjuangan DI dan mendapat banyak pengalaman gerakan dari sana. Saat ini Abad Badri telah beristri dan memiliki empat orang anak.<sup>45</sup>

Adapun susunan kepengurusan KM kemas'ulan Ranji saat ini ialah:

<sup>43</sup> Wawancara dengan Andi Herdiyani, PJS Kepala Desa Cikembar di Kantor Desa Cikembar pada 18 September 2018

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ust. Abad, Amir Kemas'ulan Ranji di Kebon Pedes pada 17 September 2018

<sup>45</sup> [www.khilafatulmuslimin.com](http://www.khilafatulmuslimin.com), diakses pada Agustus 2018



**Gambar 4.8 Struktur Kepengurusan KM Kebon Pedes**

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sebelum bergabung dengan KM, jamaah pimpinan Ust.Abad merupakan anggota kelompok Hizbullah Kebon Pedes. Setelah terjadi beberapa kasus terorisme yang melibatkan anggota kelompok ini, maka Hizbullah Kebon Pedes terpecah menjadi dua. Kelompok pertama, mereka yang bergabung dengan organisasi GARIS (Gerakan Reformis Islam).<sup>46</sup> GARIS Kebon Pedes dikenal sebagai organisasi Islam garis keras hingga saat ini. kelompok kedua ialah mereka yang bergabung dengan Khilafatul Muslimin dibawah pimpinan Ust.Abad.

Hingga saat ini, KM Kemas'ulan Ranji terus berupaya mengembangkan ajaran dakwahnya yang mengusung Ideologi khilafah. sejak pertama dideklarasikan hingga saat ini, terdapat kurang lebih 50 orang warga Kebon Pedes yang tergabung dalam KM Kemas'ulan Ranji.<sup>47</sup> Anggota KM tersebut sebagian besar merupakan sanak-saudara dari keluarga Ust.Abad. Pada umumnya mereka berprofesi sebagai petani

<sup>46</sup> Wawancara dengan Saefudin, Kepala Desa Kebon Pedes, di kebon Pedes pada 18 September 2018

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ust.Abad, *Op.Cit.*

dan pedagang kecil dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Saat ini, Ust. Abad memiliki warung kecil yang dikelola di rumah bersama istrinya. Kemas'ulan Ranji memiliki satu bidang mushola yang juga berfungsi sebagai majelis taklim, dan rumah Ust. Abad sendiri sebagai kantor operasional.

Mushola milik KM terdiri dari dua lantai berukuran  $\pm 100 \text{ m}^2$  yang dibangun secara swadaya dari sumbangan Jama'ah KM. Selain sebagai tempat beribadah, mushala ini juga berfungsi sebagai majelis taklim bagi para jamaah dan masyarakat umum. Sebagaimana disampaikan Abad :

“Pengajian rutin dilakukan setiap dua kali dalam seminggu, yaitu hari minggu dan rabu yang dibagi dua sesi; Sesi sore untuk pengajian jamaah perempuan, dan sesi malam untuk jamaah laki-laki. Pengajian selalu dilakukan secara terpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Untuk jamaah laki-laki dipimpin langsung oleh Ustadz Abad, sedangkan jamaah perempuan dipimpin oleh istrinya. Adapun pengajian anak-anak dilakukan setiap malam hari selepas shalat magrib”.<sup>48</sup>

Sebelumnya, Abad sempat meminta izin kepada aparat pemerintah desa setempat untuk mengadakan kegiatan pengajian KM di kampung Cigarung.<sup>49</sup>

KM menyakini bahwa kekhilafahan merupakan sistem yang diwariskan Rasulullah SAW pasca kewafatannya. Setelah berakhirnya Sistem Kenabian (*nubuwwah*) di masa Nabi Muhammad, maka berikutnya ialah sistem khilafah yang dimulai sejak masa Abu Bakar Ash-Shidiq sampai didirikannya kekhilafahan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja. Ust. Abad, sebagai amir kemas'ulan, menyadari bahwa selama ini tidak ada gerakan khilafah yang paripurna. Beliau memilih untuk bergabung dengan KM karena dianggap KM merupakan gerakan khilafah yang lebih mendekati kesempurnaan. Menurutnya, banyak ditemukan gerakan-gerakan yang memperjuangkan khilafah dengan cara-cara yang tidak semestinya dan justru menodai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> *Ibid*,

<sup>49</sup> Wawancara dengan Saefudin, *Op.Cit*.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ust. Abad, *Op.Cit*.

Satu hal yang membedakan KM dengan gerakan Islam lain yaitu KM merupakan gerakan yang berupaya menjalankan syariat Islam secara total. Dalam pandangan mereka, organisasi lain yang ada saat ini cenderung bersifat parsial dan patuh terhadap sistem pemerintahan non-Islam.<sup>51</sup> KM juga meyakini bahwa penyebab keterpurukan umat Islam saat ini adalah karena tidak dijalankannya hukum-hukum Allah secara berjamaah dalam khilafah. Tidak hanya itu, timbulnya kerusakan, bencana dan kekacauan di Indonesia saat ini juga diakibatkan oleh hal tersebut.

Sekitar 2016, Ust. Abad bersama tokoh KM lain di Kebon Pedes mulai berinstrospeksi diri dan memutuskan untuk berbai'at kepada KM. Setelah dua tahun berbaiat kepada KM, Ust. Abad banyak melakukan renovasi gerakan dan pemikiran agar tetap sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah. Selama Ust. Abad memimpin KM di Kebon Pedes, respon masyarakat cukup baik meskipun pada masa awal pendirian sering terjadi perbedaan pendapat diantara para jamaah.<sup>52</sup> Sejauh ini masyarakat sekitar tidak pernah mempermasalahkan adanya gerakan KM di Kebon Pedes, mereka hidup rukun dan saling menghormati. Sebaliknya, masyarakat di kampung Cigarung mulai mempercayakan untuk menitipkan anaknya agar belajar agama di Majelis Taklim milik KM. sebagaimana dinyatakan Abad :

“Anak-anak yang mengikuti pengajian ini tidak hanya dari warga jamaah, tapi juga dari masyarakat sekitar yang menitipkan anaknya mengaji di mushola Ust. Abad. hingga saat ini ada sekitar sembilan anak yang aktif mengaji di mushala KM ini”.

Para tokoh dan anggota KM pun kerap berbaur dengan masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan sosial.<sup>53</sup> Para tokoh agama dan masyarakat setempat cenderung melakukan pembiaran terhadap gerakan KM di desanya. pembiaran ini dikarenakan anggapan sulitnya merubah ideologi mereka apalagi ketika dihadapkan dengan dalil-dalil

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ust. Amin, tokoh KM Kebon Pedes, di Cigarung pada 17 September 2018

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ust. Abad, *loc. Cit.*

<sup>53</sup> Wawancara dengan Saefudin, *Op. Cit*

agama, serta adanya perasaan trauma dengan melihat catatan merah Jamaah Ust. Abad di masa lalu.

Selain melakukan tarbiyah melalui Majelis taklim yang dikelola, Ust. Abad juga melakukan berbagai pendekatan kepada para tokoh pemerintahan di Kebon Pedes untuk memberikan pemahaman tentang ide khilafah yang dibawa KM. Selain dengan dakwah lisan, KM juga memiliki media cetak berupa buku, maklumat, majalah dan selebaran lain yang diberikan kepada jamaah dan target dakwah mereka. Melalui tarbiyah tersebut, Ust. Abad memberikan penyadaran kepada Jamaah akan akidah (keyakinan) yang dianut dan pentingnya menjalankan syariat Islam secara totalitas. Mereka menggunakan al-Qur'an sebagai sumber utama tarbiyah mereka, mengaitkan ayat yang satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan (*tafsiru al-qur'an bi al-qur'an*). Disisi lain, penggunaan hadits jarang digunakan, serta mereka tidak terikat pada satu madzhab manapun. Adanya pemahaman keagamaan tersebut, membuat KM sulit diterima oleh masyarakat desa Kebon Pedes yang mayoritas beraliran NU dan Muhammadiyah.

Setelah bergabung dengan KM, Ust. Abad sebagai tokoh setral dikenal "tidak sekeras dulu" saat bersama Hizbullah.<sup>54</sup> Meski begitu, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat tetap bersikap waspada terhadap pemikirannya yang radikal. Salah satu tokoh penting dalam KM kemas'ulan Ranji ialah Amin, warga pendatang dari Bandung yang kemudian memperkuat kehadiran KM di Kebon Pedes. Baik Abad maupun Amin, keduanya memiliki kemampuan memahami dan menafsirkan al-Qur'an dengan baik. Selain itu, mereka juga mempelajari dengan baik sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mencari kelemahannya. Dalam keyakinan mereka, KM merupakan gerakan yang berdasarkan konstitusi ayat suci, bukan konstitusi negara.

---

<sup>54</sup> *Ibid*,



**Gambar 4.9 Foto Peneliti bersama tokoh KM Kebon Pedes<sup>55</sup>**

Sumber : dokumentasi pribadi

Keberadaan KM di Kebon Pedes yang relatif baru menambah catatan organisasi radikal di Kebon Pedes. Transformasi yang dilakukan Ust.Abad pada gerakan barunya (KM) dapat dikatakan sebagai pijakan baru dalam melanjutkan cita-cita khilafah yang dibawanya sejak dulu. Sebaliknya, KM menyediakan ruang untuk memuaskan hasrat spiritual Abad untuk hidup dibawah naungan Khilafah. KM dianggap sebagai organisasi yang mampu mengakomodir dan memperbaiki gerakan khilafah yang diusungnya.

#### **4.1.3 Pertentangan antara Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi**

Pertentangan antara gerakan KM dan Negara nampak pada pandangan-pandangan (ideologi) KM terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Pada tahap berikutnya, pandangan tersebut berwujud pada beberapa sikap yang ditunjukkan KM terhadap pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Khamdan berpendapat bahwa radikalisme sebagai suatu paham tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas pemikiran dan ideologi yang tidak

<sup>55</sup> Dari kiri ke kanan: Ust.Abad Badri (amir kemasulan KM Kebon Pedes), Ust.Amin, Peneliti.

menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan pemikiran tersebut.<sup>56</sup>

Bagi KM, Islam tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah semata, namun juga mengatur sistem bernegara. Menurutnya, Kesempurnaan ibadah kepada Allah akan tercapai manakala umat Islam berada dalam sistem pemerintahan Islam dengan adanya seorang Imam/Khalifah. KM Kebon Pedes, misalnya, tetap berpandangan bahwa kontitusi selain al-Qur'an dan Sunnah merupakan konstitusi *thogut* dan kafir.<sup>57</sup> Secara tidak langsung, KM menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sistem *thogut*. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menurut KM, telah banyak dilanggar oleh pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini menunjukkan kegagalan dari sistem pemerintahan selain Islam.<sup>58</sup>

Mengenai pandangan kafir, dalam penelitian yang dilakukan Ilham Mundzir di Pusat KM di Lampung, mengungkapkan bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja berpendapat bahwa:

Masyarakat Muslim di Indonesia hidup di bawah hukum yang kafir. Sebab, Pancasila dan UUD 945 serta KUHP yang menjadi turunannya, yang berlaku tidak memiliki pijakannya dalam Islam. Pelbagai produk undang-undang dan hukum adalah sepenuhnya buatan manusia (*man made*). Baginya, hukum Islam seperti qishash, potong tangan dan sebagainya harus ditegakkan. Sebab itulah yang dijelaskan al-Qur'an. Jika pemerintah tidak menegakkan hukum itu berarti tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam dan demikiankafir.<sup>59</sup>

Untuk memperkuat pandangannya, mereka mempelajari UUD 1945 untuk menemukan celah kelemahannya. Selain itu, mereka juga mempelajari tafsir al-Qur'an versi Kementerian Agama untuk mengkontradiksikan dengan realita yang terjadi pada muslim di Indonesia.

Pandangan KM terhadap sistem demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam tulisan Ust. Mukhlisyan berikut :

<sup>56</sup> Khamdan, Muh, *Op.Cit.* hlm.208

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ust.Amin, *Op.Cit*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Mundzir, Ilham, *Op.Cit*, hlm.73

“Perbedaan yang amat jauh 360 derajat bertolak belakang secara diametral, antara pemimpin yang diangkat dengan sistem demokrasi dengan pemimpin dalam sistem khilafah. perbedaan yang amat jauh antara langit dan bumi. Maka kedua sistem ini, jangan dicampuradukan, disentuh sedikit sajumpun tidak mungkin. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Maka ucapan yang paling tepat berdasarkan Al Qur’an yang bisa disampaikan ialah : *lakum dinukum walyadin* (bagimu sistem mu dan bagi kami sistem kami).”<sup>60</sup>

Pandangan lain tentang sistem demokrasi Indonesia juga disampaikan oleh Abdullah Azam :

“Demokrasi dan pestanya adalah haram secara mutlak. Dan hasilnya pun tetap haram dan tidak boleh diikuti (ditaati) karena pemimpin demokrasi bukanlah pemimpin yang dilegitimasi Al Qur’an dan hadits. Dan golongan ini (KM) telah berlepas diri (*bara’*) dari sistem demokrasi dan tidak mau ikut andil sedikitpun dalam perkara demokrasi.”<sup>61</sup>

Pandangan ini lahir sebagai konsekuensi dari benturan logika *Islamic world Order* yang dibawa KM dan logika *westphalian world order* yang dianut sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari pandangan ini, banyak diantara jamaah KM yang menolak untuk mengikuti proses pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Bagi KM, perjuangan menegakan khilafah harus murni dari sistem demokrasi yang batil.

“Allah melarang mencampur adukan yang Haq dan yang Batil, (QS.Al Baqarah (2):42). Demokrasi adalah sistem yang dibuat oleh orang yang bahkan tidak memiliki agama, yang menjadikan suara terbanyak dari rakyatnya menjadi suara Tuhan. Para ulama pewaris nabi yang lurus mengatakan bahwa sistem Demokrasi adalah batil dan Islam memiliki sistem sendiri.”<sup>62</sup>

KM memahami al-Qur’an secara tekstual dan menolak masuknya pemikiran (*ra’yu*) kedalamnya. Pemikiran hanya digunakan dalam hal tata

<sup>60</sup> Mohammad, Mukhlisyah, “Menyongsong Runtuhnya Demokrasi”, *Majalah Islam al-Khilafah*, edisi 69, Dzulqo’dah 1439 H, hlm.21

<sup>61</sup> Abdullah, Azam, “Umat Islam Terperangkap Demokrasi”, *Majalah Islam al-Khilafah*, edisi 69, Dzulqo’dah 1439 H hlm.85.

<sup>62</sup> Redaksi, “Kontak Pembaca”, *Majalah Islam al-Khilafah*, edisi 69, Dzulqo’dah 1439 H hlm.95

cara pelaksanaanya (*kaifiyat*). Apa yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah sangat lengkap dan jelas untuk menjadi pedoman hidup umat Islam, sehingga tidak diperlukan lagi pemikiran. Menurutnya, saat ini banyak yang *phobia* dengan syariat Islam dengan berpandangan bahwa hukum Islam cenderung kejam. KM melihat realita timbulnya permasalahan hukum di negeri ini sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya hukum-hukum Allah.<sup>63</sup>

Dengan mengutip ayat-ayat al-Qur'an, KM menyatakan bahwa umat Islam akan hidup termarginalkan sepanjang hidup mereka tidak berdasarkan hukum Islam dan al-Qur'an. Beriman tanpa menjalankan ayat suci sebagai konstitusi negara adalah suatu kesalahan. Segala bentuk kerusakan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan dampak dari tidak dijalankannya hukum-hukum Allah sebagai hukum negara. Permasalahan di Indonesia saat ini ialah sedikitnya Ulama yang menjelaskan Islam secara menyeluruh sampai pada hukum *qital* (perang), sehingga banyak gerakan yang menggunakan cara mereka sendiri-sendiri dalam memahaminya.<sup>64</sup>

Namun demikian, KM berpandangan bahwa Islam tidak destruktif. Mereka membedakan antara radikal dan anarkis. Tidak mesti yang radikal kemudian dalam aplikasinya bersifat anarkis. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam bersifat radik atau totalitas (*kaffah*) dalam beragama, dan melarang bersikap anarkis.<sup>65</sup> Mukhlisyah, misalnya, menyatakan bahwa dia sangat tidak setuju dengan tindakan peledakan bom yang dilakukan teroris. Menurutnya perilaku tersebut bukan ajaran Islam, pelakunya pasti bukan berasal dari orang Islam atau orang Islam yang bodoh terhadap Islam. Perilaku tersebut lain halnya dalam kondisi seorang muslim sedang di medan jihad (perang).<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ust.Amin, *Op.Cit.*

<sup>64</sup> *Ibid,*

<sup>65</sup> *Ibid,*

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah, *Op.Cit.*

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah setempat, jamaah KM di Kebon Pedes tidak pernah membayar pajak kepada negara hingga saat ini. Karena itu, pendapatan pajak Desa Kebon Pedes selalu terhutang setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan perilaku penentangan mereka terhadap sistem pemerintahan Indonesia. selain itu, partisipasi mereka dalam kegiatan pemilu pun sangat rendah, sebagaimana dikatakan Saepudin, Kepala Desa Kebon Pedes : “Kalau pemilu, mereka datang sih datang, tapi tidak tahu apakah dia itu memilih atau tidak. Karena banyak bolong (golput), walaupun ada bekas coblosan, ada yang dua, ada yang tiga. bahkan ada yang membuat tulisan (pada surat suara)”.<sup>67</sup>

Kasus lain, Pada 17-18 November 2018, KM berencana menyelenggarakan kegiatan Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan Dunia. Acara tersebut sudah direncanakan dengan matang dari beberapa bulan sebelumnya. Rencananya acara tersebut akan di gelar di Masjid al-Akbar Kemayoran, Jakarta, dengan dihadiri seluruh warga KM dari tiap-tiap perwakilannya.



**Gambar 4.10 Pamplet Kegiatan Syiar dan Silaturahmi Kekhalifahan**  
Sumber :dokumentasi pribadi

<sup>67</sup> Wawancara dengan Saepudin, *Op.Cit.*

Akan tetapi, kemudian diketahui bahwa acara tersebut akan berpindah lokasi ke Masjid Azzikra Sentul, Bogor. Setelah dilakukan observasi, H-1 di kawasan Azzikra terpasang beberapa spanduk betuliskan pembatalan acara tersebut dengan disertai pengamanan dari aparat kepolisian di beberapa titik menuju Azzikra. Pembatalan tersebut sempat dikonfirmasi oleh pihak Azzikra. Berikutnya, pemberitaan pembatalan tersebut juga disampaikan oleh beberapa media. Kemudian pada 18 november 2018, acara tersebut dikabarkan akan pindah digelar di kawasan Monas, Jakarta. Namun pada hari tersebut, kawasan Monas ditutup oleh pengelola karena telah diketahui sebelumnya bahwa acara tersebut tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.



**Gambar 4.11 Suasana Kawasan Azzikra 16 November 2018**

Sumber : dokumentasi pribadi

Dari deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pertentangan antara KM dan negara nyata adanya. Pandangan *thogut* terhadap Indonesia dan sistem pemerintahannya merupakan ideologi yang telah mengakar dalam pikiran jamaah KM. Pandangan ini kemudian berwujud pada sikap-sikap anti pemerintah seperti tidak membayar pajak dan tidak berpartisipasi dalam Pemilu. Sebaliknya, negara memandang bahwa ide khilafah yang dibawa KM tidak jauh berbahayanya dengan HTI yang notabene telah dibubarkan. Khiilafah dipandang sebagai ideologi yang akan merubah ideologi Pancasila yang sudah final. Sehingga setiap

gerakan perjuangan khilafah sudah barang tentu dipandang sebagai sebuah rencana gerakan makar terhadap negara.

#### **4.1.4 Strategi Pemerintah dalam Menangani Gerak Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi**

Gerakan KM di Kabupaten sukabumi relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah lain. Jamaah yang tercatat bergabung dengan KM tidak lebih dari 100 orang dan tersebar di beberapa wilayah di Sukabumi. Strategi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Sukabumi sejauh ini memfokuskan pada pendekatan kegiatan intelijen. Selain itu, Pendekatan persuasif menjadi pilihan untuk dilakukan pihak-pihak yang berwenang, baik dari Kepolisian, TNI, maupun Kementerian Agama.<sup>68</sup> Kemudian, kegiatan yang cukup rutin dilakukan untuk mencegah lahirnya paham-paham radikal di masyarakat ialah Program Diseminasi yang dimotori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba untuk tidak terlalu mempublikasikan masalah ini kepada khalayak untuk tetap menjaga citra dan kondusivitas wilayah. Pada beberapa upaya strategi tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan yang berdampak pada pencapaian tujuan strategi itu sendiri.

Dalam beberapa kegiatan KM yang bersifat melibatkan massa cukup banyak, aparat pemerintah aktif melakukan pemantauan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemantauan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Kementerian Agama, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti : Kepolisian, TNI, Satpol-PP, MUI, Ormas, aparat pemerintahan setempat, dan juga warga masyarakat. Menurut Sidratahta, sensitivitas dan tingkat kewaspadaan masyarakat menjadi selalu penting untuk ditingkatkan, terutama bila mengetahui gejala-gejala mencurigakan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada

<sup>68</sup> Wawancara dengan Cep Rudi, staff Informasi Masyarakat Kemenag Kabupaten Sukabumi di Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi, pada 17 September 2018

umumnya.<sup>69</sup> Para tokoh KM selama ini, secara terbuka, tidak segan mengundang aparat pemerintah apabila bermaksud mengadakan suatu kegiatan besar

Menegani fenomena KM di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cep Rudi, Staff Informasi Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, menyatakan sebagai berikut :

“Masalah itu belum kita rapatkan secara resmi ke tingkat yang lebih tinggi. Karena ini masih bisa ditangani oleh Inmas (subbag di Kemenag) dan Kepolisian masih tahap intelijen. Selama masih ditangani oleh itu, insyallah, dan ini tidak meluas, sekarang sudah berkurang. Penanganannya masih *person to person*, secara persuasif dan humanis.”<sup>70</sup>

Upaya-upaya *soft approach* dipandang sangat perlu untuk dikedepankan dalam penanganan penyebaran paham radikal. Sebagaimana pula dikatakan Sidratahta dalam penelitiannya mengenai strategi Pemerintah Indonesia menghadapi Terorisme berikut :

“Pendekatan kemanusiaan, dialogis dan preventif perlu dikedepankan mengingat hakikat ancaman keamanan terorisme bukanlah berasal dari ancaman asing berskala besar seperti yang dicitrakan, tetapi bentuk dan aksi terorisme Indonesia dengan khas budaya Indonesia, yakni terorisme kampung.”<sup>71</sup>

Pemantauan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi timbulnya hal-hal negatif dari adanya KM di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ditambah lagi, menyusul adanya pembubaran organisasi khilafah HTI oleh pemerintah tahun lalu. Kewaspadaan akan potensi negatif tersebut sangat beralasan dikarenakan beberapa instansi, seperti BNPT, BIN dan Polri mengkategorikan KM sebagai organisasi radikal pendukung ISIS di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan pemantauan terhadap gerakan KM merupakan langkah pertama dalam kerangka strategi pemerintah mewujudkan sistem pertahanan yang berdaya tangkal tinggi.

<sup>69</sup> Mukhtar, Sidratahta, *Op.Cit*, hlm.146-147

<sup>70</sup> Wawancara dengan Cep Rudi, *Ibid*,

<sup>71</sup> Mukhtar, Sidratahta, *Loc.Cit*, hlm.149

Adapun kegiatan Diseminasi yang dilakukan Bakesbangpol merupakan program rutin pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bekerjasama dengan berbagai unsur pemerintah di daerah. Dinyatakan oleh Lan Maulana, Kasubdit Kewaspadaan Bakesbangpol Kabupaten Sukabumi :

“Kami mengadakan kegiatan diseminasi (semacam sosialisasi), kepada masyarakat ataupun pelajar. Dalam hal ini, kita bekerjasama secara vertikal, dengan Kodim, Polres dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk narasumbernya, kita selalu kordinasi dengan Kodim. Nanti dari pihak Kodim yang memberikan materi tentang penanggulangan radikalisme tersebut.”<sup>72</sup>

Kegiatan Diseminasi, secara bertahap dan periodik, ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya pelajar dan tokoh masyarakat (termasuk LSM). Kegiatan ini merupakan bagian upaya preventif pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mencegah lahir dan berkembangnya radikalisme di wilayahnya. Adapun tujuan kegiatan tersebut, secara umum berpegang pada tugas pokok fungsi Bakesbangpol dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bakesbangpol juga membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ini.

Meski demikian, sejauh ini sasaran / peserta kegiatan diseminasi cenderung masih terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kegiatan diseminasi yang dilakukan belum secara objektif menyasar kelompok masyarakat yang diindikasi terpapar radikalisme. Keterbatasan ini juga dikarenakan faktor pembiayaan yang belum memadai. Selain itu, pergerakan radikalisme yang bergerak secara *underground* juga menjadi kendala bagi Bakesbangpol dalam upaya melakukan pemetaan radikalisme di Kabupaten Sukabumi.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Lan Maulana, Kasubdit Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Kab.Sukabumi, di Kantor Bakesbangpol Kab.Sukabumi pada 07 Februari 2019.

## 4.2 PEMBAHASAN

### 4.2.1. Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi

Perkembangan gerakan Khilafatul Muslimin (KM) di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi sejauh ini relatif stagnan. Jamaah yang tercatat sebagai anggota KM masih seputar lingkup keluarga dan kerabat dekat. Warga setempat (selain kerabat) yang secara nyata menyatakan diri untuk bergabung dengan KM nyaris tidak ada. Tercatat jamaah KM di Kebon Pedes tidak lebih dari 50 orang dan di Cikembar (kemas'ulan Sukabumi) berjumlah 35 orang. Total ada sekitar 85 warga Kabupaten Sukabumi yang bergabung bersama KM. Jumlah tersebut cenderung tidak bertambah sejak awal dideklarasikannya Khilafatul Muslimin. Meski begitu, upaya-upaya persuasif terus KM lakukan untuk memperbesar gerakannya di Kabupaten Sukabumi baik secara individual maupun kolektif. Secara bertahap, dukungan aktif dan pasif dari masyarakat mereka dapatkan.

KM menyakini bahwa kekhilafahan merupakan sistem yang diwariskan Nabi Muhammad pasca kewafatannya. Keyakinan ini sejalan dengan pemaknaan Khilafah/Imamah menurut Said at-Taftazani dan Imam Al-Mawardi. Sa'id at-Taftazani memaknai *Imamah/Khilafah* sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi SAW.<sup>73</sup> Begitupun Al-Mawardi yang memaknai Imamah/Khilafah sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Nabi dalam menjaga agama dan kehidupan politik dunia.<sup>74</sup> Dalam pandangan KM, sistem kehidupan umat Islam terdiri dari dua, yakni Nubuwwah (sistem kenabian) dan Khilafah/Imamah. Sistem Nubuwwah telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Sebagai penerus sistem tersebut adalah Khilafah, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> At-Taftazani, *Op.Cit.*

<sup>74</sup> Al-Mawardi, *Op.Cit.*

<sup>75</sup> Wawancara dengan ust.Abad, *Op.Cit.*

Sistem khilafah diyakini sebagai satu-satunya solusi untuk mewujudkan persatuan di kalangan umat Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Menegakan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi Umat Islam sebagaimana melaksanakan kewajiban ibadah yang lain. Tidak sempurna keimanan seorang muslim apabila tidak menjalankan kekhilafahan.<sup>76</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Qadir Zallun dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa mendirikan Khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan hukum pelaksanakannya sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah Swt bagi seluruh kaum muslimin.<sup>77</sup>

KM juga berpandangan bahwa Kekhilafahan merupakan kepemimpinan umat Islam tanpa mengenal batas teritorial serta tetap dapat diberlakukan meskipun tanpa adanya kekuasaan. Sampai saat ini, KM memiliki jamaah di beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Algeria dan Indonesia sendiri sebagai pusat kekhilafahan. Kekhilafahan merupakan sistem kepemimpinan tunggal dibawah seorang khalifah. Setiap wilayah kekhilafahan dipimpin oleh seorang Amir (pengurus) yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. konsep ini disebut oleh Kissinger sebagai gagasan universalitas Islam yang kemudian akan melahirkan negara *superstate multietnis*.

Dalam doktrinnya, Abdul Qadir Hasan Baraja dianggap oleh jamaah KM sebagai penerus kekhilafahan Islam pasca keruntuhan Turki Utsmani. KM memiliki urutan silsilah lengkap khalifah Islam, sejak jaman *Khulafaurrasyidin* hingga Turki Utsmani, yang menjadi pedoman bagi seluruh jamaah. Setiap jamaah wajib untuk menaati perintah khalifah selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ketaatan terhadap khalifah tersebut gugur apabila khalifah terbukti menyalahi aturan Allah. Dalam pandangan Zallun, taat kepada penguasa muslim

---

<sup>76</sup> *Ibid*,

<sup>77</sup> Zallun, *Op.Cit*.

yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun dia dzalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap *fardhu* (wajib) bagi seluruh kaum muslimin.<sup>78</sup>

Pemahaman KM sebagaimana telah disebutkan merupakan refleksi ideologi khilafah yang mereka usung. Ideologi tersebut menjadi alat kontrol sosial bagi jamaah KM sehingga melahirkan hegemoni diantara mereka. Sebagaimana telah disampaikan di Bab II, bahwa teori hegemoni Gramsci dibangun atas dasar pentingnya sebuah ide (ideologi) dalam melakukan kontrol sosial.

Ketaatan terhadap khalifah, bagi jamaah KM, merupakan suatu kewajiban, sedangkan mereka yang ingkar dianggap telah melakukan kemaksiatan. Ketaatan terhadap khalifah ini lahir sebagai konsekuensi dari *ba'iat* yang dilakukan oleh setiap jamaah kepada khalifah. Bai'at merupakan sumpah setia yang berisi persetujuan-persetujuan untuk menaati segala aturan KM melalui khalifah. Persetujuan inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan hegemoni khalifah kepada jamaahnya. Kekuasaan hegemoni merupakan kekuasaan melalui persetujuan (konsensus), yang mencakup penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

Menurut Gramsci, Hegemoni ialah menguasai berlandaskan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensus (berdasarkan kesepakatan bersama).<sup>79</sup> Abdul Qadir hasan Baraja dipercayai oleh jamaah KM sebagai Khalifah Islam pasca kehancuran Kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan membenaran menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, seluruh jamaah KM diwajibkan untuk menaati setiap perintah dan fatwa Baraja. Perintah dan fatwa khalifah merupakan landasan moral dan intelektual bagi jamaah yang kemudian membentuk Ideologi keislaman

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.309

<sup>79</sup> Gramsci, *Op.Cit.*

versi KM sendiri. Alhasil, ideologi ini akan melahirkan narasi-narasi kontra pemerintah yang berkembang dalam materi tarbiyah KM.

Untuk memperoleh hegemoni tersebut, KM melakukan berbagai upaya persuasif untuk membujuk masyarakat agar bergabung dengan KM. Upaya tersebut dilakukan melalui struktur kognitif yang dimilikinya, baik itu melalui pesantren, taklim rutin, kegiatan syiar, maupun media dakwah lain seperti majalah dan media sosial. Struktur kognitif merupakan aspek penting dalam mewujudkan hegemoni kekuasaan dalam kelompok masyarakat sipil.

KM merupakan bentuk gerakan sosial yang tidak berorientasi langsung pada kekuasaan (pembentukan negara). Namun, disisi lain KM memandang perlu adanya perubahan tatanan sosial dan politik dalam kehidupan umat Islam. Selain sistem pemerintahan, KM juga mengkritisi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. menurutnya, sistem hukum warisan Belanda tersebut telah terbukti memiliki banyak kelemahan sehingga mencederai sisi keadilan dalam hukum itu sendiri. Hukum lebih memproteksi pelaku daripada korban.<sup>80</sup> Kelemahan hukum tersebut berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. oleh karena itu, KM dipandang sebagai sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk politik penentangan (*contentious politics*) yang lahir dari ketidak-puasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Menurut Sabri, dkk.,: “Ketika perlawanan (penentangan) didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digerakan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.”<sup>81</sup> Gerakan sosial bersifat non-birokratis, bergerak untuk kepentingan yang luas, untuk memberikan suatu perspektif perubahan secara makro.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Amin, *Op.Cit.*

<sup>81</sup> Sabri, dkk. *Op.Cit*, hlm.3

<sup>82</sup> Asghar, Ali, *Op.Cit.*

Salah satu pandangan KM tentang kondisi umat Islam saat ini, salah satunya dapat dipahami dari pernyataan Ust.Amin :

“Lihat di jalanan, 73 tahun merdeka, orang masih memungut makanan dari tempat sampah, pantas *gak* ?. Kemiskinan dieksploitasi hingga mendatangkan keuntungan buat negara. kemiskinan bisa didagangkan. Munculah, dimana negara yang mayoritas umat Islam tapi tidak berdasarkan al-Qur’an, kata Allah ; sepanjang tidak berdasarkan hukum Islam dan al-Qur’an maka akan mengalami kehidupan yang termarjinalkan. Benar *gak* ? ada solusinya, kata Allah. coba buka surat al-Anfal ayat 73...”<sup>83</sup>

Menurut John McCarty dan Mayer Zald, sebagaimana dikutip Ashgar Ali, gerakan sosial merupakan seperangkat pendapat dan keyakinan di dalam kelompok yang mempresentasikan tuntutan perubahan yang bernilai sosial di beberapa elemen dalam struktur sosial.<sup>84</sup> Tuntunan perubahan yang dibawa KM dilakukan secara *soft approach* dengan berbagai metode dakwah. Berbagai pola dakwah tersebut bertujuan untuk meraih hati (*heart and mind*) umat. KM menyatakan ketidak-setujuannya kepada gerakan khilafah yang bersifat anarkis dan revolusioner, seperti HTI dan NII.

Ada empat karakteristik gerakan sosial menurut Sidney Tarrow. *Pertama*, adanya tantangan kolektif. Tantangan kolektif merupakan modal dasar gerakan sosial.<sup>85</sup> Perwujudan karakteristik ini berupa simbol-simbol seperti slogan-slogan, pakaian, serta istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut/ menamai objek tertentu. KM memiliki logo berbahasa Arab yang bertuliskan Khilafatul Muslimin, yang apabila diterjemahkan bermakna “khilafah bagi orang-orang Islam”. Tulisan logo tersebut dimaksudkan agar umat Islam langsung memahami bahwa tujuan dibentuknya KM adalah mendirikan khilafah.<sup>86</sup> Berbeda dengan organisasi lain yang tidak secara langsung menamakan dirinya sebagai gerakan khilafah. Dalam segi berpakaian, KM juga memiliki pakaian khas dengan

<sup>83</sup> Wawancara dengan Amin, *Loc.Cit.*

<sup>84</sup> Asghar Ali, *Op.Cit.* hlm.41

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.44

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah, *Op.Cit.*

perpaduan warna putih dan hijau yang digunakan dalam kegiatan ibadah dan kegiatan penting lain. Mereka memiliki penamaan khusus dalam struktur kekhilafahannya dari pusat hingga setingkat kecamatan. Selain itu, Sistem pendidikan yang dijalankan KM sangat berbeda dengan sistem pendidikan pada umumnya, serta tidak dibawah sistem pendidikan nasional. adanya simbol-simbol tersebut merupakan bentuk penentangan kolektif yang dilakukan KM.



**Gambar 4.12 Logo dan Pakaian Khas Jamaah KM**  
Sumber : [www.syiarkhilafahdunia.com](http://www.syiarkhilafahdunia.com)

*Kedua*, adanya tujuan bersama. KM memiliki tujuan untuk mempersatukan umat Islam agar kembali pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah dibawah sistem khilafah. sistem Khilafah diyakini sebagai solusi atas segala permasalahan yang terjadi saat ini.<sup>87</sup> KM berupaya menampilkan Islam yang *rahmatan lil alamin* dengan ditegakkannya kekhilafahan. KM juga kerap mendatangi para tokoh Islam penting di Indonesia untuk menyampaikan pesan dan cita-cita khilafah yang dibawanya.

<sup>87</sup> Asghar Ali, *Op.Cit.*

*ketiga*, terbentuknya solidaritas dan identitas kolektif. Sebuah gerakan sosial membentuk identitas kolektif untuk mengkonstruksikan diri yang membedakan dengan kelompok lawan dan musuh dengan wacana-wacana anti ketidak-adilan, tuntutan perubahan dan sebagainya.<sup>88</sup> Pemahaman keislaman KM yang tekstual menjadi identitas kolektif bagi gerakan ini. Pemahaman ini kemudian melahirkan wacana-wacana “anti pemerintah” dalam setiap kajian KM. Identitas kolektif membentuk solidaritas diantara para jamaah dengan dasar ketaatan kepada perintah dan fatwa Khalifah. Sebagai contoh, seluruh jamaah KM diwajibkan untuk mengikuti taklim (pengajian) rutin, sedikitnya setiap dua minggu sekali. Kewajiban tersebut didasarkan pada perintah langsung khalifah untuk dilaksanakan di tiap-tiap kemas’ulan. Selain sebagai sarana pembinaan jamaah, pengajian tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas diantara para jamaah.<sup>89</sup>

*keempat*, memelihara politik penentangan. Hal ini akan dapat merubah potensi individual menjadi aksi solidaritas bersama untuk melakukan gerakan sosial. Selain taklim rutin, KM juga melakukan berbagai kegiatan syiar kekhilafahan lain sebagai wujud sosialisasi mereka.

Salah satu sebab sulit berkembangnya KM di Sukabumi ialah karena kurangnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Menurut Suchman, Legitimasi merupakan persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas merupakan sesuatu yang dibutuhkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi-definisi yang berkembang di masyarakat.<sup>90</sup> Mayoritas masyarakat Sukabumi yang bercorak Islam tradisional (NU) akan cukup sulit untuk menerima KM yang bercorak salafi-wahabi. Ada beberapa pemahaman keislaman KM yang tidak sesuai pemahamannya umum di masyarakat Sukabumi. Persepsi masyarakat terhadap KM pun cukup beragam dan

---

<sup>88</sup> *Ibid*,

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ust.Abad, *Op.Cit*.

<sup>90</sup> Suchman, *Op.Cit*

cenderung berasumsi negatif terhadap KM. Sehingga legitimasi masyarakat sangat sulit didapatkan KM hingga saat ini. Padahal, legitimasi merupakan sumber daya penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar tetap bertahan.

Namun, ketika KM Cikembar mencoba menggunakan pola dakwah dengan menyediakan barang kebutuhan pokok bagi jamaah, masyarakat setempat sempat ramai untuk mengikuti pengajian KM. Itu artinya bahwa ada fase ketika KM Cikembar mendapatkan cukup legitimasi dari masyarakat setempat. Akan tetapi, ketika pola dakwah tersebut terhenti masyarakat pun perlahan mulai meninggalkan KM. Legitimasi seperti ini dikatakan oleh Suchman sebagai bentuk Legitimasi Pragmatis. Legitimasi Pragmatis terletak pada pertimbangan kepentingan praktis pribadi audien dari sebuah organisasi. Seringkali, kepentingan praktis ini melibatkan pertukaran langsung antara organisasi dan audien; namun hal ini juga dapat melibatkan interdependensi politik, ekonomi, atau sosial yang lebih luas, dimana tindakan organisasi tetap nampak mempengaruhi kesejahteraan audien.<sup>91</sup> Melihat keberhasilan metode ini, bukan tidak mungkin di kemudian hari, KM melakukan pola dakwah yang sama untuk mendapatkan legitimasi tersebut kembali.

Dampak akhir dari adanya legitimasi, menurut Suchman, adalah adanya dukungan aktif dan pasif dari masyarakat target. Meskipun dukungan aktif belum diperoleh KM, namun dengan adanya pemberian izin dari pemerintah desa Cikembar; atau masyarakat desa kebon pedes yang mulai menitipkan anaknya untuk belajar di mushola KM; menunjukkan bahwa dukungan pasif telah KM dapatkan dari masyarakat. Disisi lain, hal itu menunjukkan bahwa kredibilitas telah mereka dapatkan sehingga mereka mampu bertahan (kontinyu) di Kabupaten Sukabumi. Terbentuknya kontinuitas dan kredibilitas; serta adanya dukungan pasif ataupun aktif; merupakan fungsi dari adanya legitimasi.

---

<sup>91</sup> *Ibid*,

KM merupakan bentuk gerakan sosial yang kini berhasil memperluas gerakannya hingga ke Kabupaten Sukabumi. Meskipun gerakannya relatif kecil, namun secara bertahap gerakan ini terus berupaya memperkuat pondasi ideologinya melalui berbagai sarana dan metode dakwah. Perbedaan Madzhab Keagamaan menjadi faktor lambannya perkembangan KM di Cikembar dan Kebon Pedes. Mayoritas masyarakat Sukabumi yang bermadzhab Syafi'i (NU) tidak selaras dengan KM yang bermadzhab Salafi-Wahabi. Dengan demikian, respon masyarakat pun cukup rendah, bahkan terkadang memberikan persepsi negatif pada KM. Berkembangnya KM di Sukabumi, khususnya di Kebon Pedes, tidak lain dikarenakan adanya hubungan sejarah dengan perjuangan DI (Darul Islam). Tidak bisa dipungkiri, KM dan DI merupakan dua gerakan yang memiliki hubungan erat historis dan ideologis.

#### **4.2.2. Pertentangan antara Gerakan Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi**

Bentuk pertentangan yang dilakukan KM di Kabupaten Sukabumi umumnya berupa penentangan ideologis. Meskipun secara verbal KM tidak langsung menolak Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, namun secara tersirat penolakan itu nampak dalam wacana-wacana yang dibangun KM di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara selain al-Qur'an merupakan sistem kafir/thogut.<sup>92</sup> Kemudian mereka berdalih bahwa Sistem khilafah yang diusung KM justru akan melindungi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.<sup>93</sup>

Selanjutnya, penentangan tersebut juga berwujud pada beberapa perilaku yang dilakukan oleh jamaah KM, seperti tidak membayar pajak, tidak ikut dalam pemilu, tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pemerintah, hingga pada pengelolaan zakat yang hanya dilakukan di

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ust. Amin, *Op.Cit.*

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ust. Abad, *Op.Cit.*

internal KM.<sup>94</sup> Pemerintah setempat juga turut memantau setiap kegiatan besar yang dilakukan KM di Sukabumi. Pemantauan dilakukan baik secara konvensional, maupun dalam bentuk kegiatan intelijen, terkhusus untuk KM kebon Pedes yang memiliki catatan merah dalam data aparat pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk deteksi dan cegah dini akan potensi radikalisme di Kabupaten Sukabumi.<sup>95</sup>

Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba menggunakan teori peperangan asimetris untuk menganalisis pertentangan yang terjadi. Perang asimetris merupakan pertikaian antara dua pihak yang berbeda dalam hal sumber daya inti dan bentuk perjuangan. Perbedaan ini nampak pada cara interaksi dan upaya yang dilakukan untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan lawannya.<sup>96</sup> Perbedaan sumber daya inti berkaitan dengan perbandingan kekuatan dari kedua pihak yang berperang. Sedangkan bentuk perjuangan berkaitan dengan cara-cara perlawanan yang umumnya dilakukan secara tidak lazim. Pola konflik asimetris tidak dapat diprediksi dan memiliki efek samping yang luas.<sup>97</sup>

Dalam konteks negara, KM sebagai organisasi berideologi khilafah dipandang identik dengan HTI. HTI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada 2017 lalu dengan terbitnya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena aksi-aksinya yang dinilai cukup membahayakan dan diindikasikan hendak mengganti ideologi Pancasila. Merespon fenomena gerakan Khilafah, Baidhowi dalam jurnal penelitiannya mengatakan bahwa dari aspek historis, Indonesia lahir tahun 1945 dengan Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa. Ini merupakan kesepakatan para pendiri bangsa, maka jika ada yang menghendaki tegaknya khilafah, maka dapat dipahami ada yang menghendaki kehancuran Indonesia.<sup>98</sup> Beberapa lembaga, seperti BNPT

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan warga dan aparat desa setempat di Kebon Pedes dan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Cep Rudi, *Op.Cit.*

<sup>96</sup> Tomes, *Op.Cit.*

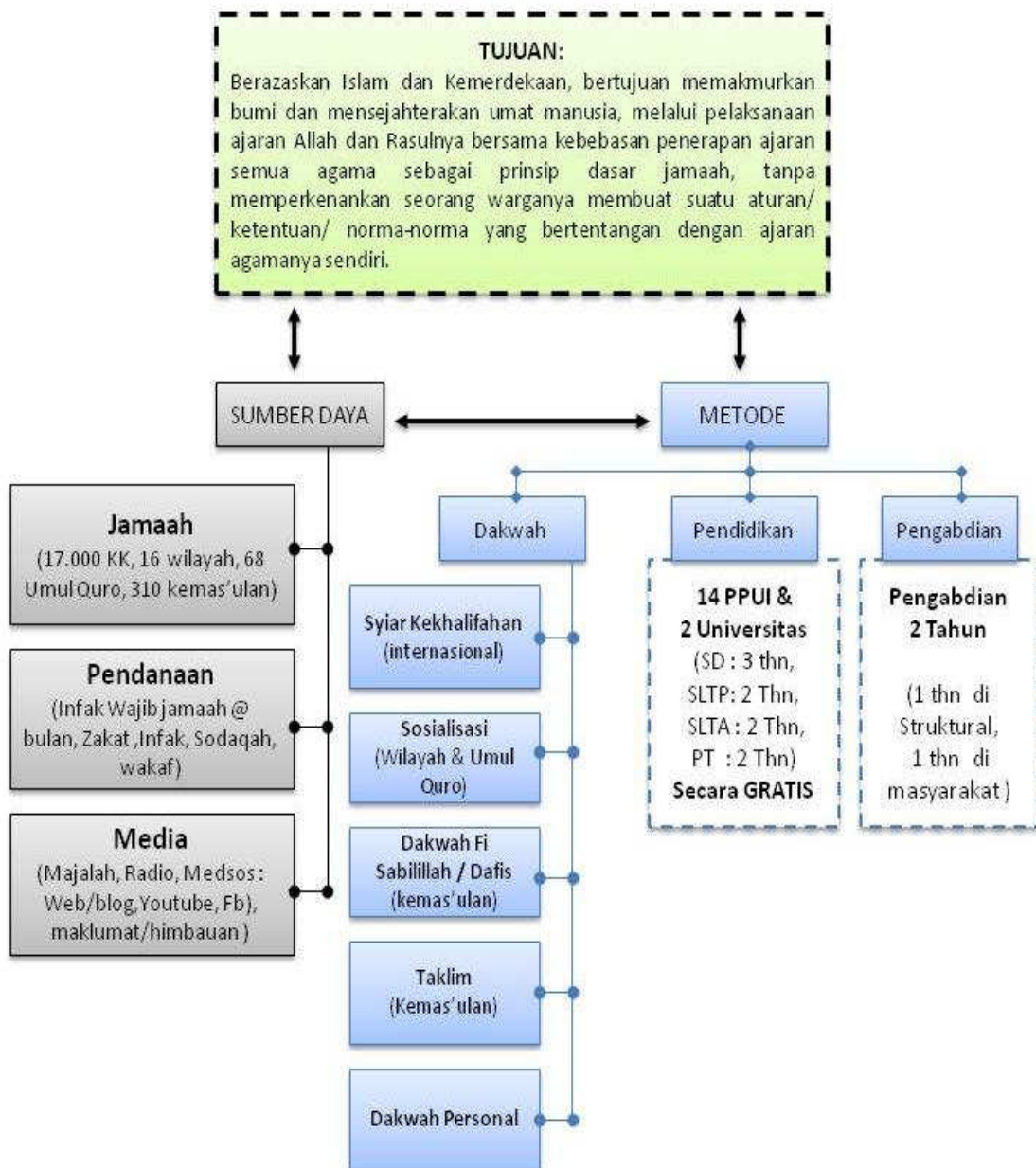
<sup>97</sup> Geiß, *Op.Cit.*

<sup>98</sup> Baidhowi, *Op.Cit.* hlm.514

dan Polri, mengklasifikasikan KM sebagai organisasi radikal. Dampaknya, beberapa aksi KM selalu mendapat pengintaian dari aparat intelijen.

Gambaran strategi dakwah KM tergambar dalam diagram berikut :

### STRATEGI KHILAFATUL MUSLIMIN



**Gambar 4.13 Strategi Khilafatul Muslimin**

sumber: diolah dari berbagai sumber

Adanya fakta-fakta dari kejadian terbaru, seperti kasus pembatalan Syiar Khilafah di Azzikra Sentul, mengindikasikan bahwa negara tidak kompatibel terhadap pergerakan KM. Potensi konflik antara KM dan negara pun semakin nampak. Selain itu, peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana bentuk interaksi yang terjadi antara KM dan Negara. Arreguín-Toft menjelaskan kunci dalam teori konflik asimetris adalah interaksi strategis (*strategic interaction*). Logika interaksi strategis menyatakan bahwa Setiap strategi memiliki kontra-strategi yang ideal. Aktor konflik dapat melakukan prediksi-prediksi terhadap musuh mereka.<sup>99</sup> Tipe pergerakan KM cenderung mengandalkan *soft power*, berdakwah secara persuasif untuk meraih hati (*heart and mind*) publik yang menjadi target dakwahnya. Disisi lain, negara dengan kekuatan nasional yang dimilikinya cenderung bersifat koersif untuk menghalau setiap pergerakan KM.

Fakta peristiwa Azzikra diatas menjelaskan bahwa negara berhasil menjalankan strateginya untuk menutup ruang gerak KM. Namun di lain pihak, KM akan semakin memperkuat politik penentangannya (*contentious politics*) terhadap negara. Wacana-wacana kontra-pemerintah dikhawatirkan akan terus berkembang dalam kajian jamaah KM. Ideologi khilafah yang telah mengakar dan menjadi sistem kontrol sosial bagi jamaah KM merupakan modal untuk tetap mempertahankan politik penentangan tersebut. sehingga pertentangan yang terjadi cenderung berkelanjutan sebagaimana ciri dari peperangan asimetris.

#### **4.2.3. Strategi Pemerintah dalam Menangani Gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi**

Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menangani gerakan KM sejauh ini diantaranya berupa pemantauan terhadap aktivitas KM, terutama aktivitas yang bersifat melibatkan massa cukup banyak. Langkah awal ini dilakukan karena memang keberadaan KM di Sukabumi sendiri cukup baru dan tidak memberikan dampak

---

<sup>99</sup> Arreguín-Toft, *Op.Cit.*

signifikan bagi tatanan sosial. KM kebon Pedes dan Cikembar secara definitif baru menyatakan bergabung dengan KM terhitung sejak 2016. Meskipun begitu, keberadaan tokoh KM di Cikembar sebenarnya dapat dikatakan sudah cukup lama, terhitung sejak 2004. Sejak awal mendeklarasikan bergabung dengan KM hingga saat ini, tidak banyak progres pergerakan KM yang terjadi.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pendekatan persuasif secara humanis dalam upaya meredam pergerakan mereka. Kementerian Agama dalam hal ini bekerja sama dengan MUI dan aparat TNI/ Polri untuk mencoba membangun komunikasi dengan KM. Kemudian, Bakesbangpol sebagai institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi secara rutin menggalakan program Diseminasi pencegahan radikalisme di wilayah kewenangannya. Belum adanya pemetaan wilayah menjadi kelemahan strategi yang dilakukan Bakesbangpol sehingga berdampak pada efektifitas strategi tersebut.

Untuk menganalisis permasalahan ini, Peneliti akan mencoba menggunakan teori Strategi Harry R. Yarger yang dibangun dengan empat aspek: *Objektives*, *Concept*, dan *Resources*, serta pertimbangan resiko (*risk*). Menurut Yarger, Strategi dalam perspektif Negara dapat didefinisikan sebagai Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer untuk menciptakan dampak strategis dalam melindungi atau memajukan kepentingan nasional di kawasan sesuai dengan panduan kebijakan.<sup>100</sup>

Tujuan (*Objektives*) dari strategi menghadapi KM ini tentunya dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman berdimensi ideologi, salah satunya ideologi khilafah. Ideologi khilafah merupakan salah satu pemicu timbulnya radikalisme dan terorisme yang merupakan ancaman nyata terhadap bangsa ini. Tujuan ini kemudian mengilhami tujuan strategi

---

<sup>100</sup> Yarger, Harry R., *Strategic Theory For The 21<sup>st</sup> Century : The Little Book on Big Strategy*, ( USA: Strategic Studies Institut, 2006), hlm.65

yang dilakukan oleh elemen Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukabumi. Bakesbangpol, misalnya, merefleksikan dalam bentuk tupoksinya untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum).

Secara konsep (*concept*), strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memiliki arahan dan batasan yang jelas dalam penanganan pergerakan KM di wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana dinyatakan dalam teori Yarger, sebuah konsep strategi harus memberikan arahan dan batasan yang eksplisit dalam perumusan strategi dan perencanaan yang lebih spesifik.<sup>101</sup> Ketidajelasan konsep strategi ini dapat dilihat dari efektivitas apa yang dilakukan. Sehingga, Pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap pergerakan KM.

Diseminasi yang dilakukan Bakesbangpol tidak menasar secara langsung pada kelompok masyarakat yang diindikasikan terpapar radikalisme. Selain karena keterbatasan pembiayaan, Bakesbangpol juga belum memiliki pemetaan radikalisme di wilayahnya. Hal ini jelas akan berdampak pada efektivitas dari sebuah strategi yang dilakukan. Saat ini, Kebon Pedes merupakan satu-satunya wilayah yang sudah diindikasikan rawan penyebaran paham radikal. Sasaran kegiatan Diseminasi cenderung diarahkan pada kelompok masyarakat yang sudah terintegrasi secara formal dengan negara, seperti pelajar dan tokoh-tokoh LSM. Sedangkan jamaah KM, umumnya mereka mengasingkan diri hal-hal sistemik formal. KM memiliki lembaga pendidikan dan wadah pembinaan jamaah tersendiri yang berkembang secara kultural di setiap cabangnya.

Disisi lain, jika dilihat dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia beberapa bulan terakhir melakukan berbagai upaya untuk membendung pergerakan KM. Misalnya, pada pertengahan 2018 lalu Pemerintah melalui Kemkominfo terpantau telah melakukan pemblokiran laman *web* utama KM, [www.khilafatulmuslimin.com](http://www.khilafatulmuslimin.com). Kemudian, pada November 2018

---

<sup>101</sup> Yarger, *Op.Cit.*

Pemerintah melalui Polri melakukan pembubaran salah satu *event* besar KM yang bertajuk “Silaturahmi dan Syiar Kekhilafahan Dunia”. Kegiatan tersebut, yang semula direncanakan di Sentul dan Jakarta, dengan terpaksa harus dibatalkan oleh KM. Polri berdalih bahwa hal itu untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang berpotensi negatif di masyarakat. Isu khilafah kini menjadi isu yang sensitif menyusul adanya pembubaran organisasi khilafah HTI oleh Pemerintah pada tahun 2017.

Disahkannya Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi alasan legal pemerintah untuk membubarkan HTI. Pasal 59 ayat 4c Perppu tersebut mengatur bahwa : “Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.<sup>102</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain: ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>103</sup>

Meskipun tidak secara tegas tersurat, Perppu tersebut mengindikasikan bahwa ideologi Khilafah merupakan ideologi terlarang yang hendak mengganti / merubah ideologi Pancasila. Tentunya, Perppu ini dapat pula digeneralisir untuk dapat dijadikan dasar legalitas pembubaran organisasi serupa seperti KM. Perppu No.2 tahun 2017 ini merupakan sumber daya (*resources*) yang dapat dijadikan senjata apabila pemerintah berkehendak untuk membendung pergerakan KM secara total.

Secara sumber daya (*resources*), dalam pemantauan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga aktif berkordinasi berbagai instansi, termasuk dengan LSM dan warga masyarakat. Itu artinya ada pelibatan berbagai sumber daya nasional yang dimiliki guna

<sup>102</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).

<sup>103</sup> *Ibid*, Penjelasan pasal 59 ayat (4c)

mewujudkan pertahanan yang tangguh dengan bercirikan kesemestaan. Namun, efektivitas sebuah strategi melekat pada *kelayakan* konsep yang dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga konsep ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

Aspek penting yang juga perlu diperhatikan dalam perumusan strategi yang baik, menurut Gondo Utomo ialah dimulai dengan evaluasi. Dengan mengutip Watson dan Noble (2005), Gondo Utomo menyampaikan:

“Evaluasi setidaknya mempertanyakan empat hal, yakni apakah yang dilakukan telah benar, kesalahan apa yang diperbuat saat melakukan sebuah tindakan, seberapa banyak kemajuan yang berhasil diraih, dan bagaimana menjadi lebih baik dengan tindakan serupa di masa mendatang. Hasil dari evaluasi itulah yang akan menentukan perencanaan atas langkah melawan radikalisme agama selanjutnya.”<sup>104</sup>

Berdasar hasil penelitian, strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memiliki sistem evaluasi yang nampak pada setiap kegiatannya. Sehingga akan cukup kesulitan ketika melakukan pengukuran mengenai keberhasilan atau kegagalan atas strategi yang telah dijalankan.

Dalam menghadapi gerakan KM ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi cenderung berhati-hati dan berupaya untuk tidak terlalu membesarkan masalah ini. Langkah tersebut dilakukan agar tetap menjaga kondusivitas wilayah serta citra Kabupaten Sukabumi di mata publik. Hal ini merupakan pertimbangan resiko yang dapat ditimbulkan dalam strategi yang dilakukan. Pemerintah Desa Cikembar sendiri berprinsip: selama tidak ada pengaduan dari masyarakat; dan tidak ada kegiatan yang mengarah kepada hal-hal negatif; selama prosedur pemerintahan (perizinan dll.) ditempuh, maka KM dipersilahkan untuk melakukan aktivitasnya di sana dan sejauh ini kondusif.<sup>105</sup> Meskipun

---

<sup>104</sup> Utomo, Gondo, Op.Cit. hlm. 108

<sup>105</sup> Wawancara dengan Andi Herdiani, Op.Cit.

begitu pemantauan dari berbagai unsur pemerintah, seperti dari TNI, Polri, termasuk Kementerian Agama, tetap terus dilakukan.

Dari gambaran diatas, strategi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat responsif. Strategi yang dirumuskan pun tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga berdampak pada pelaksanaannya yang tidak terkordinasi dengan baik. Padahal, strategi yang baik ialah tentang bagaimana menguji sebuah konsep yang layak. Terkait hal ini, Sidratahta berkomentar :

“Salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematif di Indonesia saat ini adalah belum adanya strategi, pola dan sistem keamanan yang dapat menyinergikan peran dan tugas semua instrumen keamanan nasional. Sebab, dalam menghadapi ancaman perang asimetrik yang terjadi seperti ISIS, tidak mungkin dapat diatasi dengan komprehensif tanpa kerjasama dan koordinasi antar-aktor dan lembaga keamanan nasional. Masalahnya, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang dirancang untuk sinergi dan koordinasi itu tak kunjung rampung setelah lebih dari satu dasawarsa dibahas dalam program legislasi nasional.”<sup>106</sup>

Disisi lain, KM terus berupaya memperkuat gerakannya di Kabupaten Sukabumi, baik secara kualitas maupun kuantitas. KM berupaya untuk dapat meraih simpati (*heart and mind*) publik agar memberikan dukungan kepadanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KM berupaya menggunakan pendekatan kultural, pendidikan, dan ekonomi untuk dapat diterima oleh masyarakat. KM bergerak pada masyarakat pedesaan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan mereka. KM berbaur di tengah-tengah masyarakat tanpa memperlihatkan perbedaan pemahaman mereka. Selain itu, melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya, KM mencoba menawarkan pendidikan alternatif kepada masyarakat sebagai antitesis sistem pendidikan pemerintah yang ada. Secara ekonomi, konsep Baitul Mal KM menjadi sarana untuk membantu perekonomian masyarakat, meskipun mendapat beberapa hambatan.

---

<sup>106</sup> Mukhtar, Sidratahta, *Op.Cit*,

Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep yang dapat memutus akses KM untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Sehingga, salah satu dampak strategis yang diharapkan ialah melemahnya pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi. Lebih dari itu, Interaksi strategis yang dilakukan pemerintah hendaknya memperhatikan titik temu antara KM dan negara, serta menggunakan pendekatan strategi pada aspek yang sama dengan KM, yakni pendekatan kultural, pendidikan dan ekonomi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 KESIMPULAN**

##### **5.1.1 Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi**

Perkembangan gerakan Khilafatul Muslimin (KM) di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi sejauh ini relatif stagnan. Jamaah yang tercatat sebagai anggota KM masih seputar lingkup keluarga dan kerabat dekat. Warga setempat (selain kerabat) yang secara nyata menyatakan diri untuk bergabung dengan KM nyaris tidak ada. Tercatat jamaah KM di Kebon Pedes tidak lebih dari 50 orang dan di Cikembar (kemas'ulan Sukabumi) berjumlah 35 orang. Total ada sekitar 85 warga Kabupaten Sukabumi yang bergabung bersama KM. Jumlah tersebut cenderung tidak bertambah sejak awal dideklarasikannya Khilafatul Muslimin.

##### **5.1.2 Pertentangan antara Gerakan Khilafatul Muslimin dan Negara di Kabupaten Sukabumi**

Beberapa temuan kasus menunjukkan bahwa pertentangan antara KM dan Negara nyata adanya. Pandangan *thogut* terhadap Indonesia dan sistem pemerintahannya merupakan ideologi yang telah mengakar dalam pikiran jamaah KM. Pandangan ini kemudian berwujud pada sikap-sikap anti pemerintah seperti: tidak membayar pajak; tidak berpartisipasi dalam Pemilu; yang dilakukan jamaah KM di Kebon Pedes. Sebaliknya, negara memandang bahwa ide khilafah yang dibawa KM tidak jauh berbahayanya dengan HTI yang notabene telah dibubarkan. Khilafah dipandang sebagai ideologi yang akan merubah ideologi Pancasila yang sudah final. Sehingga setiap gerakan perjuangan khilafah

sudah barang tentu dipandang sebagai sebuah rencana gerakan makar terhadap negara.

Tipe pergerakan KM cenderung mengandalkan *soft power*, berdakwah secara persuasif untuk meraih hati (*heart and mind*) publik yang menjadi target dakwahnya. Disisi lain, negara dengan kekuatan nasional yang dimilikinya cenderung bersifat koersif untuk menghalau setiap pergerakan KM. Peristiwa Pembatalan kegiatan KM di Azzikra dan beberapa tempat lain menjelaskan bahwa negara berhasil menjalankan strateginya untuk menutup ruang gerak KM. Namun di lain pihak, KM akan semakin memperkuat politik penentangannya (*contentious politics*) terhadap negara. Wacana-wacana kontra-pemerintah dikhawatirkan akan terus berkembang dalam kajian jamaah KM. Ideologi khilafah yang telah mengakar dan menjadi sistem kontrol sosial bagi jamaah KM merupakan modal untuk tetap mempertahankan politik penentangan tersebut. sehingga pertentangan yang terjadi cenderung berkelanjutan sebagaimana ciri dari peperangan asimetris.

### **5.1.3 Strategi Pemerintah dalam Menangani Gerakan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Sukabumi**

Strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani gerakan khilafah di Kabupaten Sukabumi diantaranya berupa pemantauan terhadap aktivitas KM. Pemantauan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi timbulnya hal-hal negatif dari gerakan KM di wilayah Kabupaten Sukabumi. Hal ini menyusul adanya pembubaran organisasi khilafah HTI oleh pemerintah tahun lalu. Kewaspadaan akan potensi negatif tersebut sangat beralasan dikarenakan beberapa instansi, seperti BNPT dan Polri mengategorikan KM sebagai organisasi radikal pendukung ISIS di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan pemantauan terhadap gerakan KM merupakan langkah pertama dalam kerangka strategi pemerintah mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang berdaya tangkal tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pendekatan persuasif secara humanis dalam upaya meredam pergerakan mereka. Kementerian Agama dalam hal ini bekerja sama dengan MUI dan aparat TNI/ Polri untuk mencoba membangun komunikasi dengan KM. Kemudian, Bakesbangpol sebagai institusi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi secara rutin menggalakan Program Diseminasi Pencegahan Radikalisme di wilayah kewenangannya. Belum adanya pemetaan wilayah menjadi kelemahan strategi yang dilakukan Bakesbangpol sehingga berdampak pada efektifitas strategi tersebut.

Strategi yang dilakukan pemerintah memiliki banyak kelemahan dan cenderung bersifat responsif. Strategi yang dirumuskan pun tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga berdampak pada pelaksanaannya yang tidak terkordinasi dengan baik. Disisi lain, KM terus berupaya memperkuat gerakannya di Kabupaten Sukabumi, baik secara kualitas maupun kuantitas. KM berupaya untuk dapat meraih simpati (*heart and mind*) publik agar memberikan dukungan kepadanya. Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep yang dapat memutus akses KM untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Sehingga, salah satu dampak strategis yang diharapkan ialah melemahnya pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi.

## **5.2 REKOMENDASI**

### **5.2.1 Rekomendasi Teoretis**

Bagi Pemerintah secara umum, harus dapat dipahami bahwa tipe gerakan khilafah KM dan HTI memiliki beberapa perbedaan mendasar, sehingga strategi yang digunakan pun harus dibedakan. Cara pandang pemerintah terhadap pergerakan KM tidaklah boleh disamakan dengan cara pandang terhadap HTI. Pola gerakan KM yang menyasar masyarakat akar rumput, tanpa bersinggungan secara frontal dengan pemerintah, memerlukan seperangkat konsep baru dalam penanganannya. Strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat responsif, namun juga antisipatif.

Masalah ini sangat erat kaitannya dengan isu agama yang sangat sensitif, sehingga pemerintah harus ekstra hati-hati dalam merumuskan kebijakan kontra radikalisme yang tepat.

Bagi lembaga akademik, diperlukan penelitian dan kajian ilmiah lanjutan guna mengetahui perkembangan dan pola gerakan KM dalam skala nasional. Diharapkan hasil penelitian dan kajian tersebut dapat memberikan arahan yang tepat dalam perumusan kebijakan baru pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia. Penelitian dan kajian lanjutan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pandangan kepada K/L yang berwenang, khususnya TNI, Polri, BIN, dan BNPT, dalam memaknai fenomena KM.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Sebagai langkah antisipatif menguatnya gerakan KM di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Pemerintah dipandang perlu membuat rencana strategis yang lebih komprehensif dan terkordinasi sebagai wujud Sistem Pertahanan yang bercirikan Kesemestaan. Rencana strategis yang dilakukan harus memperhatikan pola interaksi strategis KM yang menggunakan pendekatan kulutural, pendidikan, dan ekonomi.

Pendekatan kultural dapat dilakukan oleh Babinsa (TNI), Babinmas (Polri) serta aparat Intelijen Negara sebagai unsur pertahanan militer. Untuk unsur pertahanan nirmiliter, dapat dilakukan mulai dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), LSM, serta unsur masyarakat.

Pendekatan Pendidikan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dirjen Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, penyuluhan dari KUA, serta intansi pendidikan di daerah, baik negeri maupun swasta. Untuk pendekatan Ekonomi dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuk Badan Kepegawaian Daerah

untuk memberikan peluang dan fasilitas kepada jamaah KM dalam memperoleh hak pekerjaan yang layak. semua langkah strategi yang dilakukan harus memiliki sistem evaluasi yang jelas sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari sebuah strategi. Semua pendekatan strategi ini, diharapkan dapat menciptakan integrasi nilai-nilai yang dibawa KM dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku di Indonesia.